



UNIVERSITAS INDONESIA

**MEMUDARNYA PENGARUH MASYARAKAT BELANDA DI
JAKARTA PADA 1950-AN
(STUDI KASUS: MASALAH REPATRIASI)**

SKRIPSI

**RULLY SETIAWAN
NPM: 0606087132**

**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JULI 2011**



UNIVERSITAS INDONESIA

**MEMUDARNYA PENGARUH MASYARAKAT BELANDA DI
JAKARTA PADA 1950-AN
(STUDI KASUS: MASALAH REPATRIASI)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Humaniora**

**RULLY SETIAWAN
NPM: 0606087132**

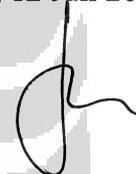
**FAKULTAS ILMU PENGETAHUAN BUDAYA
PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
DEPOK
JULI 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 12 Juli 2011



(Rully Setiawan)

HALAMAN PERNYATAAN ORSINIALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**

Nama : Rully Setiawan

NPM : 0606087132

Tanda tangan:

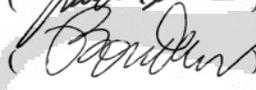
Tanggal : 12 Juli 2011

HALAMAN PENGESAHAN

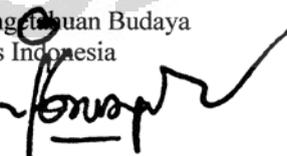
Nama : Rully Setiawan
 NPM : 0606087132
 Program Studi : Ilmu Sejarah
 Judul Skripsi : Memudarnya Pengaruh Masyarakat Belanda Di Jakarta Pada
 1950-an. (Studi Kasus: Masalah Repatriasi).

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua/ Penguji : Iman Hilman, M.Hum. ()
 Pembimbing/ Penguji : Dr. Bondan Kanumoyoso. ()
 Penguji : Siswantari, M. Hum ()
 Panitera : Tini Ismiyani, M.Hum. ()
 Ditetapkan di : Depok
 Tanggal :

oleh

Dekan
 Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya
 Universitas Indonesia

Bambang Wibawarta
 NIP. 196510231960031002

Universitas Indonesia

KATA PENGANTAR

Pertama-pertama saya ucapkan puji syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini hingga berhasil mendapatkan gelar sarjana humaniora. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Sehingga tanpa bimbingan dan bantuan mereka saya rasakan sangat cukup sulit untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- (1) Mas Bondan Kanumoyoso yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing saya hingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- (2) Para narasumber wawancara yaitu Bapak Firman Lubis, Ibu Marietje Solarbesain, dan Haji Arifin Kaldjunin yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi cerita dengan saya.
- (3) Para pegawai Perpustakaan Nasional lantai 7 terutama Mba Tika yang telah membantu saya dalam menemukan data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian skripsi ini.
- (4) Orang tua dan kakak yang telah memberikan dukungan secara materil hingga saya dapat menyelesaikan kuliah dengan baik.
- (5) Kak Yulia Yao (Kak Ule) yang selalu memberikan motivasi kepada saya agar dapat menyelesaikan skripsi ini lebih cepat tanpa harus menunda-nunda waktu lagi.
- (6) Teman-teman Kelompok Kecil yaitu Lucky Andika Putra dan Richard Lossando yang selalu memberikan dukungan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
- (7) Siska Rizky yang selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
- (8) Teman-teman luar jurusan yang telah memberikan dukungan dan keceriaan selama ini yaitu diantaranya Amar, Andre, Bekti, Carlos, David, Dede, Flo, Hotman, Ida, Kak Titi, Kara, Nadia, Karlina, Momo, Yusi, garenk No Fate, dan Ulfa.

- (9) Teman-teman satu jurusan angkatan 2004 yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada saya yaitu diantaranya Adit, Dien, Dylan, Elly, Fikri, Sulai, dan Wisnu.
- (10) Teman-teman satu jurusan angkatan 2005 yang telah memberikan bimbingan dan bantuan kepada saya yaitu diantaranya Hendri, Hendaru, Lady, Mijar, Radit, Riya, dan Ronald.
- (11) Seluruh teman-teman satu jurusan angkatan 2006 yang saya banggakan. Terima kasih kepada Amalia, Achmad Pratomo, Aditya Nugroho, A. Yudo Andrian, Ari Setyaningrum, Andi Arif, Arifanti, Ary Wibowo, Ashagi Harahap, Ahmad Dedi Fauzi, Dina Pangestu, Dwiyoga Subarkah, Firman Maulana Noor, Hasim A. Rachmat, Irwansyah, Ikra Muklis, Lucky Andika Putra, Megi Rizky, Prasetyo, Ramadhan Adi Putra, Rifky Eka Putra, Ratna Laurentia, Rima Dini Rahayu, Robiatul, Safira Basandid, Sakinah Tunufus, Sukarno Ibrahim, Syeni, dan Winda. Terimakasih atas bimbingan dan bantuan selama ini sehingga dapat menjadikan saya lebih baik. Terima kasih atas kebersamaan yang terjalin selama ini baik dalam susah ataupun senang. Skripsi ini saya persembahkan untuk kalian semua dan seluruh teman-teman lainnya. Tanpa kalian saya bukanlah apa-apa.
- (12) Seluruh teman-teman angkatan 2007 dan 2008 yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaan dan keceriaan selama ini.

Akhir kata saya berharap semoga Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 12 Juli 2011



(Rully Setiawan)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rully Setiawan
NPM : 0606087132
Program Studi : Ilmu Sejarah
Departemen : Ilmu Sejarah
Fakultas : Ilmu Pengetahuan Budaya
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan hak kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Memudarnya Pengaruh Masyarakat Belanda Di Jakarta Pada 1950-an.
(Studi Kasus: Masalah Repatriasi)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Juli 2011
Yang menyatakan,



(Rully Setiawan)

ABSTRAK

Nama : Rully Setiawan

Program Studi : Ilmu Sejarah

Judul : Memudarnya Pengaruh Masyarakat Belanda Di Jakarta Pada
1950-an. (Studi kasus: Masalah Repatriasi).

Skripsi ini membahas memudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta pada 1950-an. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Belanda di Indonesia kedudukan sosial masyarakat Belanda di Jakarta telah melemah. Namun pada beberapa bidang seperti di lingkungan sosial dan ekonomi pengaruh masyarakat Belanda masih cukup kuat. Memasuki pertengahan 1950-an hubungan Indonesia dan Belanda menjadi semakin memburuk dan memuncak dengan direpatriasinya masyarakat Belanda di Indonesia. Setelah direpatriasinya masyarakat Belanda pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta menjadi semakin memudar. Dalam perkembangannya semakin memudarnya pengaruh masyarakat Belanda tersebut maka hal ini kemudian mendorong masyarakat Indonesia terutama yang berasal dari kalangan menengah ke atas menggantikan kedudukan sosial masyarakat Belanda.

Kata Kunci:

Kedudukan sosial masyarakat Belanda, Melemah, Repatriasi, Memudar

ABSTRACT

Name : Rully Setiawan

Study Program: History

Title : The Faded of Netherland Society`s Influence in Jakarta on 1950s.
(Case Study Repatriation).

This Thesis describes about the faded of Netherland society`s influence in Jakarta on 1950s. After the end of Netherland governance in Indonesia, the Netherland society`s position in Jakarta had been weakened. Nevertheless in some section such as in social and economic the Netherland`s influence is still strong enough. Through the middle of 1950s, the relationship between Indonesia and Netherland got worser and culminated with the repatriation of the Netherlander in Indonesia. After the repatriation the influence of Netherland society in Jakarta got fader. Here after the faded of Netherland society`s influence made Indonesian society particularly the upper class to replace the position of the Netherlands society in Jakarta.

Key Words

Netherland`s social position, Weakened, Repatriation, got fader.

DAFTAR ISI

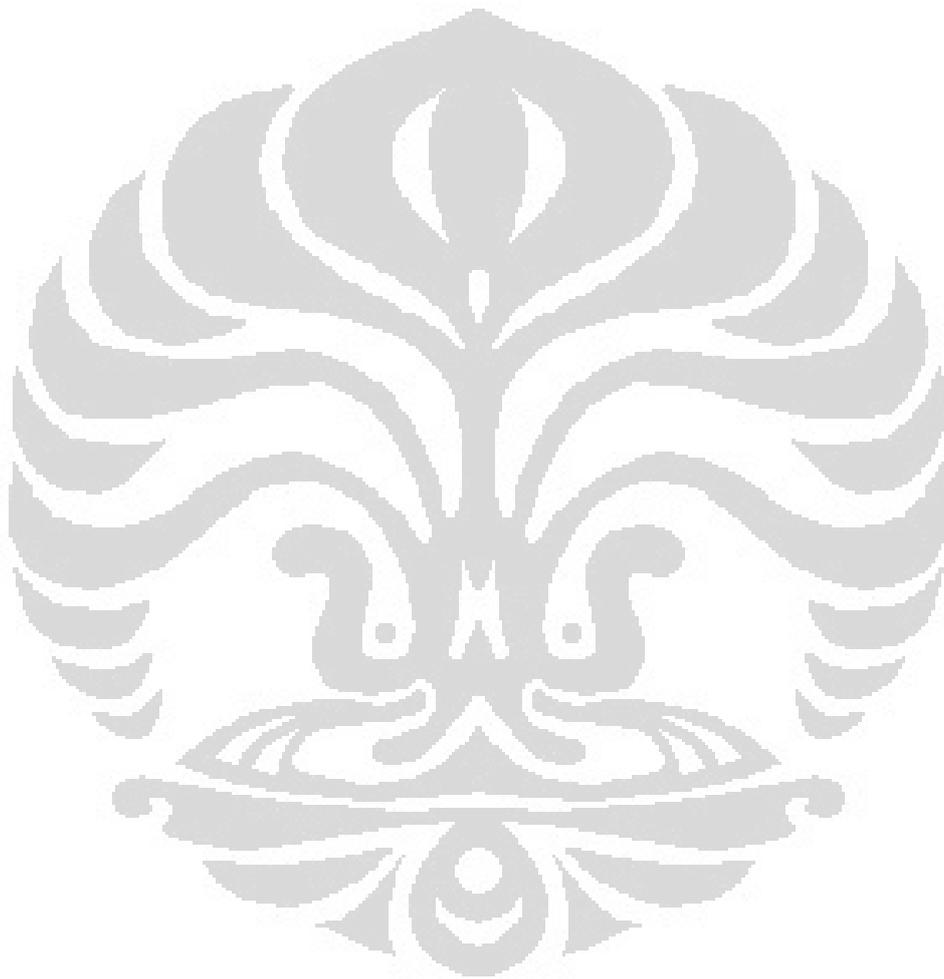
HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR ISTILAH.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
I. PENDAHULUAN.....	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2 Perumusan Masalah.....	6
I.3 Ruang Lingkup Masalah.....	7
I.4 Tujuan Penelitian.....	8
I.5 Metode Penelitian.....	8
I.6 Sumber Penelitian.....	10
I.7 Sistematika Penulisan.....	12
II. MASYARAKAT BELANDA DI JAKARTA SETELAH PENGAKUAN KEDAULATAN.....	14
II.1 Masyarakat Indo Belanda dan Belanda Totok.....	14
II.2 Kehidupan Masyarakat Indo Belanda dan Belanda Totok.....	18
II.3 Kegiatan Sosial Masyarakat Indo Belanda dan Belanda Totok	24
II.4 Kegiatan ekonomi Masyarakat Indo Belanda dan Belanda Totok....	28
III. REPATRIASI MASYARAKAT BELANDA	33
III.1 Pandangan Pemerintah Indonesia Terhadap Keberadaan Masyarakat Indo Belanda Kewarganegaraan Asing Di Indonesia.....	33
III.2 Pandangan Pemerintah Belanda Terhadap Keberadaan Masyarakat Indo Belanda Kewarganegaraan Belanda Di Indonesia.....	36
III.3 Tindakan-tindakan Keras Pemerintah Indonesia Dalam Menyelesaikan Permasalahan Irian Barat.....	40
III.4 Repatriasi Masyarakat Belanda.....	45
IV. MEMUDARNYA PENGARUH MASYARAKAT BELANDA.....	54
IV.1 Masuknya Tenaga-Tenaga Indonesia Menggantikan Jabatan-Jabatan Yang Telah Di Tinggalkan Masyarakat Belanda...	54
IV.2 Pengambilan Rumah-Rumah Belanda Oleh Pihak Indonesia.....	60

IV.3 Dirubahnya Nama-Nama Belanda Ke Dalam Bahasa Indonesia....65
IV.4Masuknya Masyarakat Indonesia Menggantikan Gaya Hidup Masyarakat
Belanda.....73

V. KESIMPULAN.....79

DAFTAR REFERENSI

LAMPIRAN



DAFTAR ISTILAH

<i>Auto</i>	: Kendaraan. Namun lebih mengacu kepada mobil.
Anarkisme	: Sebuah paham yang lebih menekankan kepada tindakan kekerasan dalam meluapkan ekspresi mereka.
Asimilasi	: Percampuran dua kebudayaan
Belanda Totok	: Orang Belanda yang terlahir dari seorang ayah dan ibu berdarah Belanda murni.
<i>Beroep</i>	: Pekerjaan
Berplesir	: Berpergian ke tempat hiburan
<i>Blijvers</i>	: Sebutan untuk sekelompok orang yang tinggal dan menetap di suatu tempat.
<i>Bridge</i>	: Bermain kartu
Boikot	: Tindakan melarang beredarnya suatu hal
<i>Charter</i>	: Menyewa
Emigrasi	: Perpindahan antar Negara
<i>Eurasia</i>	: Sebutan terhadap sekelompok orang yang terlahir dari percampuran orang Eropa dan Timur.
<i>Herregistrasi</i>	: Pendataan ulang
<i>Hollandia</i>	: Sebutan dari pemerintah Belanda untuk salah satu kota di Irian Barat
<i>Indisch</i>	: Kebudayaan yang terbentuk dari percampuran antara budaya barat dan timur.
<i>Indo</i>	: Sebutan terhadap orang yang terlahir dari percampuran diantara orang eropa dan pribumi.
Indo Belanda	: Sebutan terhadap orang yang terlahir dari percampuran diantara orang Belanda dan pribumi.
Indonesiasi	: Sebuah kebijakan yang ditujukan untuk mengIndonesiakan pengaruh asing di Indonesia.
Kamp	: Tempat penampungan
Koloni	: Daerah jajahan
<i>Midden Standers</i>	: Orang-orang yang berasal dari kalangan menengah.

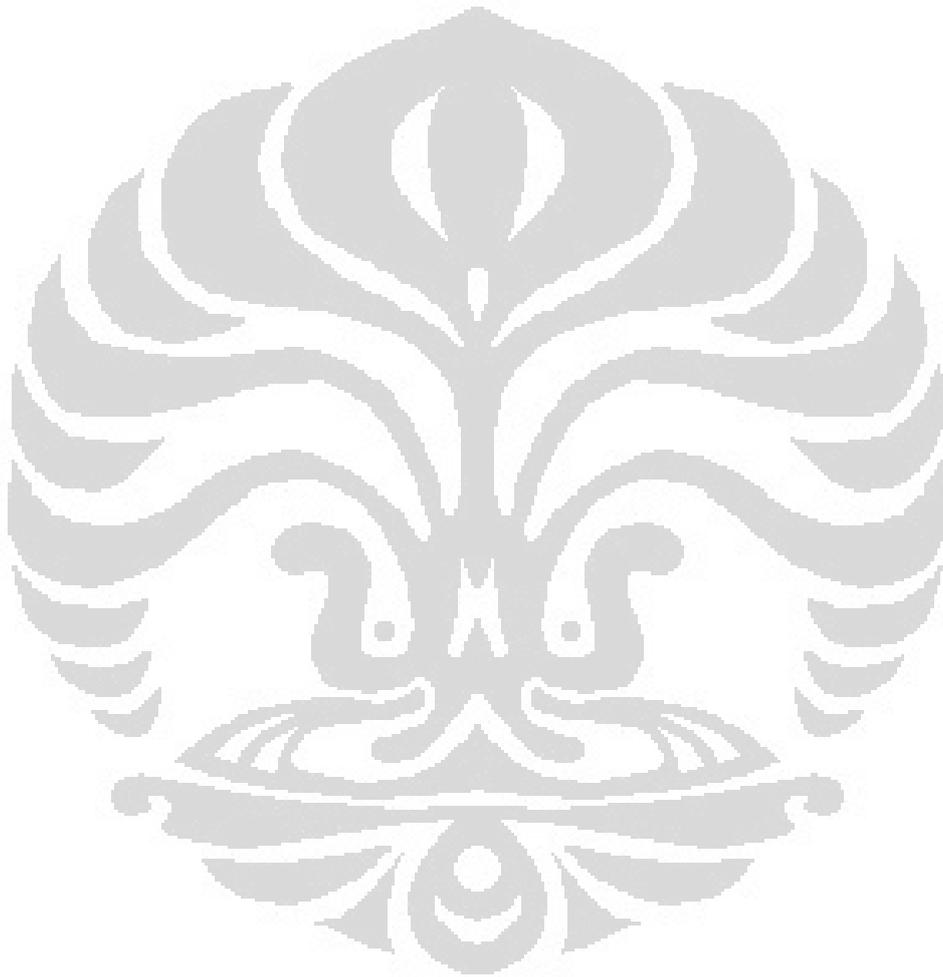
<i>Mode Show</i>	: Peragaan busana.
Naturalisasi	: Sebuah kebijakan yang dilakukan untuk mewarganegarakan masyarakat asing.
Nasionalisasi	: Sebuah kebijakan yang dilakukan untuk mengambillalih kepentingan asing.
<i>Nieuw Guinea</i>	: Irian Barat
Peranakan	: Sebutan untuk seluruh orang yang terlahir dari percampuran.
Repatriasi	: Kembali ke tanah airnya
Revolusioner	: Sekelompok orang lebih mengutamakan tindakan capat dan keras dalam menangani suatu permasalahan.
<i>Spijtoptanten</i>	: Orang-orang yang menyesali keputusannya.
<i>Steuntrekkers</i>	: Orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan.
<i>Touring</i>	: Kegiatan mengunjungi suatu tempat yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan kendaraan.
Uni	: Ikatan
Unilateral	: Dalam satu ikatan uni
<i>Vakspecialisten</i>	: Orang-orang yang berasal dari para tenaga ahli.
<i>Vestigings Bewijs</i>	: Surat izin tinggal
<i>Vrij Beroep</i>	: Pekerja bebas
Wedana	: Lurah
<i>Zwarte Piet</i>	: Pit hitam yang selalu menemani sinterklas untuk menghukum anak-anak yang nakal.

DAFTAR SINGKATAN

A.P.I	: Akademi Penerbangan Indonesia
B.O.A.C	: <i>British Overseas Airways Corporation</i>
B.V.M	: <i>Batavia Verkeer Maatschappij</i>
C.P.M	: Corps Polisi Militer
D.P.R	: Dewan Perwakilan Rakyat
F.R.O.N.I	: Fron Nasional Indonesia
G.I.A	: <i>Garuda Indonesian Air Ways</i>
G.I.K.I	: Gabungan Indo Untuk Kesatuan Indonesia
I.E.V	: <i>Indo Europeesch Verbond</i>
I.M.C	: <i>Indonesische Motor Club</i>
K.B.K.I	: Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia
K.L.M	: <i>Koninklijke Luchvaart Maatshappij</i>
K.N.I.L	: Koninklijke Nederlands Indische Leger
K.P.M	: <i>Koninklijke Paketvaart Maatshappij</i>
N.H.B	: <i>Nederlands Handels Bank</i>
N.H.M	: <i>Nederland Handels Maatschappij</i>
P.A.A	: <i>Pan American Airways</i>
P.B.B	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PELNI	: Pelayaran Nasional Indonesia
P.I.R	: Partai Indonesia Raya
P.N.I	: Partai Nasional Indonesia
P.R.I	: Partai Rakyat Indonesia
P.R.N	: Partai Rakyat Nasional
R.M.S	: Republik Maluku Selatan
S.A.S	: <i>Scandinavian Airlines System</i>
S.O.B	: <i>Staat van Oorlog en Beleg</i>
S.O.B.S.I	: Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
U.P.D	: Urusan Perumahan Djakarta
U.P.M	: Urusan Perumahan Militer
V.O.C	: <i>Verenigde Oost Indische Compagnie</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.4 Grafik Jumlah Keberangkatan Masyarakat Belanda Di Indonesia Dalam Rentang Waktu 1945-1980.....	50
Gambar IV.3 Contoh Iklan Berbahasa Belanda Pada Awal 1950-an.....	68
Gambar IV.3 <i>Sinterklaas</i> dan <i>Zwarte Piet</i>	70

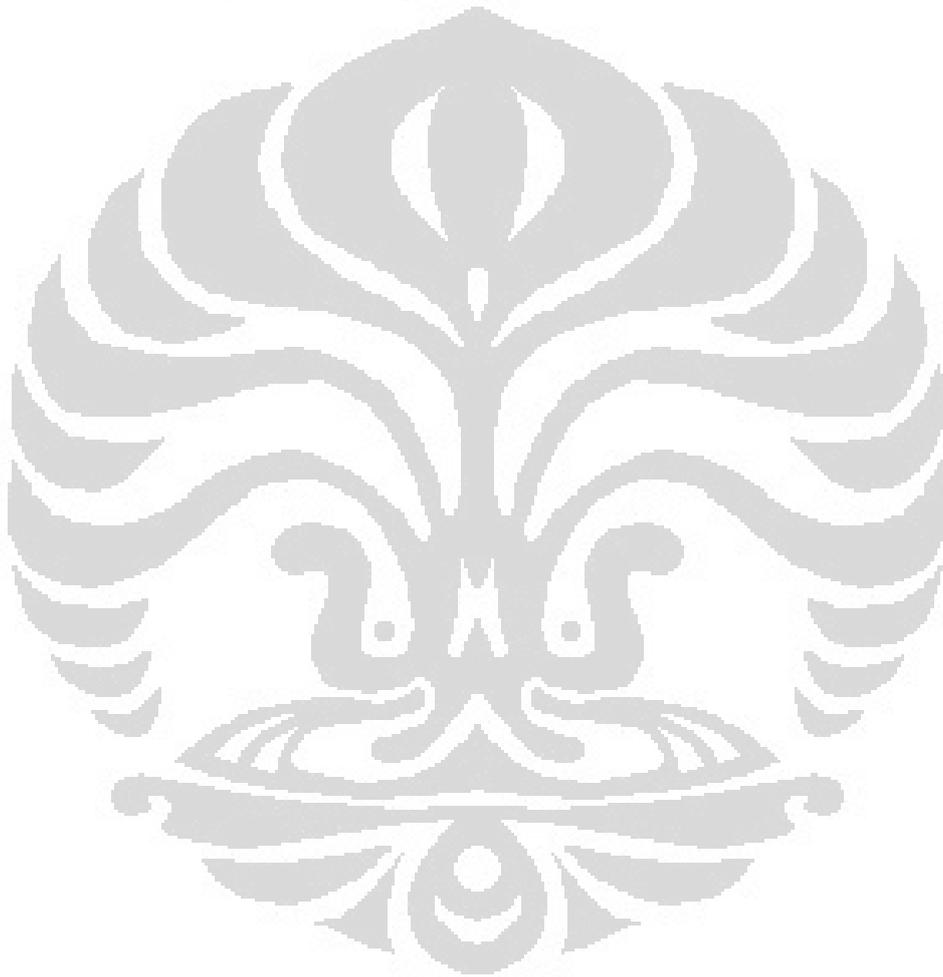


DAFTAR TABEL

Tabel II.2 Jumlah Masyarakat Belanda Yang Memilih Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Waktu Pendaftaran.....	19
Tabel II.4 Daftar Beberapa Perusahaan Belanda Di Jakarta Pada 1950-an....	30
Tabel III.4 Daftar Rencana Keberangkatan Masyarakat Belanda Di Indonesia Pada Rentang Waktu 30 Desember 1957-28 Februari 1958.....	48
Tabel IV.1 Daftar Kontrak Kerjasama Universitas Indonesia Dengan Beberapa Universitas Di Amerika Serikat.....	59
Table IV.3 Angka Kedatangan Orang Dari Luar Negeri Berdasarkan Kewarganegaraan.....	66
Tabel IV.3 Daftar Nama Perusahaan Belanda, Jalan, Rumah Sakit, Hotel, Bioskop, Dan Gedung Pertemuan Di Jakarta Pada Awal 1950-an...68	
Tabel IV.3 Daftar Nama Perusahaan Belanda, Jalan, Rumah Sakit, Hotel, Bioskop, Dan Gedung Pertemuan Di Jakarta Pada Akhir 1950-an.....	72

DAFTAR LAMPIRAN

- I. Tidak Dapat Menerima Perubahan
- II. *Java Bode Rit 1953*
- III. Kegiatan Perkumpulan *De Huis Vrouw*
- IV. Suasana Keberangkatan Di Bandara Kemayoran
- V. Memudarnya Gaya Hidup Masyarakat Belanda



BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah.

Berakhirnya masa pemerintahan Belanda di Indonesia pada 1949 yang ditandai dengan diakuinya kedaulatan Indonesia dalam Konferensi Meja Bundar. Ternyata hal ini tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan diantara pemerintah Indonesia dan Belanda. Dalam perkembangannya setelah berakhirnya masa pemerintahan Belanda di Indonesia maka kemudian muncullah berbagai permasalahan baru diantara pemerintah Indonesia dan Belanda yaitu diantaranya seperti permasalahan kewarganegaraan. Dalam menyelesaikan permasalahan ini pemerintah Indonesia dan Belanda pada dasarnya telah membicarakan hal ini pada pembahasan rancangan persetujuan Konferensi Meja Bundar. Pada pembicaraan tersebut dihasilkan sebuah keputusan yang menegaskan bahwa masyarakat Belanda di Indonesia diharuskan untuk menentukan status kewarganegaraannya dalam jangka waktu dua tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh pemerintah Belanda.

Keputusan ini tentunya cukup sulit bagi masyarakat Belanda untuk dapat menentukan pilihan status kewarganegaraannya. Begitu halnya dengan masyarakat Belanda yang berasal dari golongan Indo¹ Belanda. Jika dilihat dari keberadaannya masyarakat Belanda tersebut pada dasarnya telah cukup lama bermukim di Indonesia dan bahkan mereka juga telah beregenerasi secara turun temurun di Indonesia. Sehingga secara psikologis mereka pada umumnya lebih dekat dengan budaya ketimuran dan merasa lebih nyaman tinggal di Indonesia. Namun walaupun demikian pada akhirnya mereka tetap diharuskan untuk menentukan status kewarganegaraannya dalam jangka waktu yang telah

¹ Indo merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut mereka yang terlahir dari percampuran darah diantara masyarakat Indonesia dan Belanda. Selain itu istilah Indo ini pun juga ditujukan untuk menyebut masyarakat Belanda yang berada dalam dua kebudayaan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara psikologis semua orang Belanda yang dilahirkan dan dibesarkan di Hindia Belanda adalah termasuk dalam golongan Indo, baik kedua orang tua mereka berasal dari masyarakat Belanda Totok ataupun campuran. Lihat: Tineke Hellwig. (2007). *Citra Kaum Perempuan Di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Mengenai istilah Indo ini masih terdapat juga istilah lain yang menggambarkan hal yang sama yaitu diantaranya seperti Indo Belanda dan *Eurasia*.

ditentukan.

Disisi lain setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar kedudukan sosial masyarakat Belanda di Indonesia telah melemah. Namun walaupun demikian di beberapa bidang tertentu pengaruh masyarakat Belanda masih cukup kuat yaitu diantara seperti di lingkungan sosial dan ekonomi. Di Jakarta kuatnya pengaruh masyarakat Belanda di lingkungan sosial dapat dilihat dari masih digunakannya bahasa Belanda dalam berbagai keperluan. Pada awal 1950-an penggunaan bahasa Belanda dalam masyarakat Jakarta bukanlah merupakan hal yang aneh. Penggunaan bahasa Belanda pada dasarnya tidak hanya digunakan oleh masyarakat Belanda saja. Namun hal ini juga banyak digunakan oleh masyarakat Jakarta terutama mereka yang berasal dari kalangan terpelajar. Selain itu kuatnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta tersebut dapat dilihat juga dari masih banyak dilakukannya tradisi masyarakat Belanda yaitu seperti tradisi perayaan *Sinterklaas* yang selalu dirayakan pada setiap 25 Desember bersamaan dengan perayaan Hari Natal.

Di bidang perekonomian kuatnya pengaruh masyarakat Belanda dapat dilihat dari mendominasinya kembali berbagai perusahaan besar Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar Belanda tersebut pada umumnya dikenal dengan sebutan *The Big Five* yaitu yang terdiri dari *NV Borsumij*, *NV Jacobson van den Berg*, *NV Internatio*, *NV Lindevetes*, dan *NV Geo Wehry & Co*. Begitu halnya dengan bidang transportasi. Pada awal 1950-an kegiatan transportasi di Indonesia pada umumnya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan transportasi Belanda. Beberapa perusahaan-perusahaan transportasi tersebut diantaranya yaitu seperti *Koninklijke Luchvaart Maatschappij* (KLM), *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM), *Batavia Verkeer Maatschappij* (BVM), dan sebagainya.

Setelah berakhirnya masa penentuan kewarganegaraan di Indonesia banyak diantara masyarakat Belanda lebih memilih kewarganegaraan Belanda jika dibandingkan dengan kewarganegaraan Indonesia. Begitu halnya dengan masyarakat Indo Belanda. Keputusan masyarakat Indo Belanda tersebut pada umumnya didorong oleh berbagai faktor yang diantaranya yaitu seperti belum hilangnya pengaruh nuansa masa lalu di dalam diri mereka, masih terdapatnya

kesalahpahaman diantara masyarakat Indo Belanda dan masyarakat Indonesia, dan kepentingan ekonomi pemerintah Belanda yang lebih menjanjikan. Dalam perkembangannya setelah berakhirnya masa penentuan kewarganegaraan di Indonesia, masyarakat Indo Belanda yang telah memilih kewarganegaraan Indonesia kemudian merubah nama perkumpulan *Indo Europeesch Verbond* (IEV) yang telah terbentuk sejak masa Hindia Belanda menjadi Gabungan Indo Untuk Kesatuan Indonesia (GIKI).² Perubahan nama ini merupakan bentuk kesetiaan mereka terhadap pemerintah Indonesia, selain juga untuk memperkuat hubungan kekeluargaan diantara sesama mereka.

Sedangkan bagi masyarakat Indo Belanda yang telah memilih kewarganegaraan Belanda maka mereka secara langsung telah menjadi warga Negara asing. Dalam perkembangannya keberadaan masyarakat Indo Belanda dengan status asing ini menjadi semakin sulit di Indonesia dan bahkan banyak diantara mereka pada akhirnya kehilangan pekerjaannya. Sulitnya kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat Indo Belanda tersebut maka banyak diantara mereka pada akhirnya hanya dapat menggantungkan diri dari tunjangan yang diberikan oleh pemerintah Belanda setiap bulannya. Sedangkan bagi masyarakat Belanda Totok pada umumnya mereka lebih memilih untuk pergi ke Belanda.

Sulitnya kehidupan yang dialami oleh masyarakat Indo Belanda kewarganegaraan asing tersebut maka dalam perkembangannya hal ini mendorong munculnya pandangan dari berbagai kelompok untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan ini. Pandangan-pandangan tersebut secara umum terbagi menjadi dua kelompok yaitu diantaranya mereka yang menghendaki agar segera mewarganegarakan masyarakat Belanda tersebut melalui Undang-Undang Kewarganegaraan dan mereka yang menghendaki agar segera mengeluarkan masyarakat Belanda yang tidak dibutuhkan tersebut dari Indonesia. Pandangan pemerintah Belanda sendiri mengenai permasalahan ini pada dasarnya lebih menghendaki masyarakat Belanda tersebut untuk dapat tetap tinggal di Indonesia. Hal ini dikarenakan sulitnya mereka untuk dapat diterima oleh masyarakat di Belanda. Selain itu tindakan ini dilakukan juga untuk mengurangi beban

² GIKI ini merupakan hasil perubahan dari berbagai organisasi dan partai terdahulunya yaitu diantaranya seperti *Indische Partij*, *Insulinde*, dan *Indo Europeesch Verbond* (IEV).

permasalahan yang telah terjadi di Belanda yaitu seperti permasalahan sulitnya mendapatkan pekerjaan, perumahan, dan sebagainya. Sulitnya keadaan yang dihadapi oleh masyarakat Indo Belanda ini tentunya telah menjadikan beban yang berat bagi pemerintah Indonesia dan Belanda. Sehingga dibutuhkan upaya penyelesaian yang tepat terhadap permasalahan ini.

Memasuki pertengahan 1950-an hubungan Indonesia dan Belanda menjadi semakin memburuk. Hal ini disebabkan oleh tidak kunjung terselesaikannya permasalahan Irian Barat setelah satu tahun pengakuan kedaulatan Indonesia. Tidak terselesaikannya permasalahan ini disebabkan oleh terjadinya perbedaan penafsiran diantara pemerintah Indonesia dan Belanda. Pemerintah Indonesia menafsirkan bahwa setelah satu tahun kedaulatan atas wilayah Irian Barat akan pulih kembali.³ Sedangkan Pemerintah Belanda menafsirkan bahwa setelah satu tahun semua hubungan ketatanegaraan dengan Indonesia telah dihapuskan dan Irian Barat tetap menjadi wilayah kekuasaan pemerintah Belanda.⁴ Dalam menyelesaikan permasalahan ini pemerintah Indonesia pada dasarnya telah melakukan beberapa upaya penyelesaian yaitu diantaranya seperti upaya diplomasi bilateral yang dilakukan pada periode 1950-1952 dan melalui dewan internasional (PBB) yaitu pada periode 1954-1957. Namun upaya-upaya ini ternyata selalu mengalami kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Memasuki akhir 1950-an hubungan Indonesia dan Belanda menjadi semakin memburuk. Hal ini dikarenakan selalu gagalnya resolusi Indonesia di PBB. Dalam perkembangannya hal ini kemudian memuncak ketika gagalnya kembali resolusi Indonesia di PBB yang dibahas pada Sidang Umum PBB ke-XII. Dalam resolusinya tersebut Indonesia meminta agar permasalahan ini dapat segera dibicarakan kembali oleh Indonesia dan Belanda. Namun resolusi ini selalu mengalami kegagalan dengan jumlah suara mayoritas yang mendukung Indonesia kurang dari 2/3 suara. Berdasarkan hasil tersebut maka secara langsung hal ini telah mengubur harapan pemerintah Indonesia untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Selain itu penolakan terhadap resolusi Indonesia ini juga telah mengakibatkan ketidakpercayaan pemerintah Indonesia untuk dapat

³ E. Katoppo, Muhammad Yamin, Tambunan. (1955). *Perjuangan Irian Merdeka*. Bandung: Penerbitan Kilat Madju. 53.

⁴ *Ibid.*

menyelesaikan permasalahan ini kembali di PBB. Sebelumnya pada saat pembukaan Sidang Umum PBB ke XII Subandrio selaku Menteri Luar Negeri Indonesia telah menyatakan bahwa Indonesia akan mengambil jalan lain di luar PBB yaitu jalan yang akan mengguncangkan dunia jikalau ditolaknya kembali resolusi Indonesia di PBB. Di dalam negeri sendiri setelah gagalnya kembali resolusi Indonesia di PBB maka kemudian muncullah rasa kebencian terhadap pemerintah Belanda. Rasa kebencian ini dalam perkembangannya kemudian berubah menjadi aksi anarkisme⁵ terhadap berbagai kepentingan-kepentingan masyarakat Belanda di Indonesia. Aksi-aksi tersebut mereka tuangkan dengan mencoret-coret aset-aset kepemilikan masyarakat Belanda yang diantara yaitu seperti mobil, kantor dan sebagainya. Coretan-coretan tersebut pada umumnya menggambarkan rasa kebencian masyarakat Indonesia terhadap pemerintah Belanda yang mereka tuangkan dalam coretan cician dan makian yaitu diantaranya seperti “Usir Anjing Belanda,” “*Kill Dutchman*” dan sebagainya.

Dalam menyelesaikan permasalahan ini maka Pemerintah kemudian mengambil tindakan tegas terhadap berbagai kepentingan masyarakat Belanda di Indonesia yaitu diantaranya seperti memerintahkan melakukan aksi mogok kerja selama 24 jam kepada buruh-buruh perusahaan Belanda di Indonesia. Seruan aksi ini kemudian diikuti oleh berbagai buruh perusahaan-perusahaan Belanda. Namun dalam perkembangannya aksi ini kemudian berubah menjadi aksi pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Pada aksi pengambilalihan ini beberapa organisasi buruh yang berasal dari partai politik tertentu juga ikut turut serta dalam aksi tersebut yaitu diantaranya seperti SOBSI dan KBKI. Dalam perkembangannya aksi-aksi buruh tersebut kemudian mendapatkan dukungan dari pemerintah dengan dikeluarkannya perintah untuk menasionalisasi semua perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Tindakan-tindakan keras pemerintah tersebut ternyata tidak berhenti sampai disitu saja. Pada 5 Desember 1957 pemerintah melalui Kementerian Kehakiman memerintahkan untuk merepatriasi semua masyarakat Belanda yang ada di Indonesia. Perintah repatriasi⁶ ini pada akhirnya telah memaksa semua masyarakat Belanda di

⁵ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Anarkisme adalah merupakan sebuah pemikiran yang mengajak orang untuk melakukan tindakan kekacauan.

⁶ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Repatriasi adalah pengembalian ke tanah tumpah

Indonesia untuk pergi meninggalkan Indonesia dan pada 6 September 1958 telah tiba kapal Waterman di Rotterdam yang merupakan kapal terakhir pengangkut masyarakat Belanda tersebut⁷.

Pada pembahasan tema ini sebenarnya telah terdapat beberapa buku yang membahas peristiwa ini yaitu seperti yang ditulis oleh Firman Lubis dalam salah satu bab bukunya yang berjudul *Pengusiran Warga Belanda*. Selain itu terdapat juga buku yang ditulis oleh Joost Cote & Loes Westerbeek dalam bukunya yang berjudul *Recalling the Indies, Kebudayaan Kolonial & Identitas Poskolonial*. Dalam satu bab yang ditulis oleh Firman Lubis peristiwa repatriasi ini telah dibahas. Namun dalam satu bab tersebut lebih ditekankan terhadap dampak peristiwa ini bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat Indo Belanda di Negara lain yang menjadi semakin sulit. Sedangkan buku yang ditulis oleh Joost Cote & Loes Westerbeek pada umumnya lebih menekankan kepada budaya *Indish* baik pada masa kolonial maupun setelah masa kolonial. Mengenai masalah repatriasi dalam buku ini juga telah disinggung. Namun tidak jauh berbeda dengan apa yang telah ditulis oleh Firman Lubis yaitu lebih menekankan terhadap masyarakat Indo Belanda yang menjadi korban sebagai akibat dari peristiwa ini. Melihat hal ini maka masih terdapat ruang bagi penulis untuk dapat meneliti tema ini lebih lanjut yaitu dengan memfokuskan peristiwa repatriasi ini kepada memudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta pada 1950-an.

I. 2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat diambil suatu permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu adalah mengenai sejauh mana proses memudarnya pengaruh masyarakat Belanda Jakarta di pada 1950-an dalam studi kasus masalah repatriasi ini?

Alasan penulis memilih tema ini dikarenakan setelah direpatriasinya masyarakat Belanda di Indonesia maka hal ini telah mengakibatkan memudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta. Memudarnya pengaruh masyarakat tersebut maka hal ini menarik perhatian penulis untuk dapat meneliti lebih jauh

darahnya.

⁷ *Keesing Historisch Archief* No. 14211 (6-12 Oktober 1958), hal 14385 seperti yang di kutip oleh Oey (1991:388) dan Kanumoyoso (2001:65).

peristiwa tersebut. Dalam memfokuskan penelitian ini maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang akan membantu penulis dalam mempermudah penulisan penelitian ini. Beberapa pertanyaan tersebut yaitu:

1. Bagaimana kedudukan sosial masyarakat Belanda di Jakarta setelah pengakuan kedaulatan?
2. Bagaimana peristiwa repatriasi ini terjadi?
3. Bagaimana mudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta setelah direpatriasinya masyarakat Belanda di Indonesia?

I.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini adalah berkisar pada 1950-an. Pemilihan rentang waktu ini ditujukan untuk dapat melihat lebih jelas mudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta pada 1950-an. Pemilihan 1950 sebagai permulaan penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui kedudukan sosial dan pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta setelah berakhirnya masa pemerintahan pemerintah Belanda di Indonesia pada 1949. Sedangkan pemilihan 1959 sebagai batas akhir penelitian ini dilakukan untuk dapat melihat lebih jelas mudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta setelah terjadinya peristiwa repatriasi masyarakat Belanda pada 1957-1958 dan dikeluarkannya dekret presiden pada 1959. Disisi lain pemilihan kota Jakarta sebagai fokus penulisan ini dikarenakan selain kota ini merupakan tempat penulis tinggal. Namun kota ini juga merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian masyarakat Belanda pada saat itu. Sehingga dirasakan bahwa kota ini cukup layak untuk dapat mewakili kehidupan masyarakat Belanda dan mudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta pada 1950-an.

I.4 Tujuan Penelitian

Pada penulisan penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti lebih jauh mudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta pada 1950-an dalam masalah repatriasi. Sehingga hal ini dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas mengenai mudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta pada 1950-an. Selain itu penulisan penelitian ini juga ditujukan untuk menjawab

pertanyaan pribadi penulis terhadap terdapatnya rumah-rumah masyarakat Belanda yang dibiarkan terbengkalai ataupun telah dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan penulis tersebut diantaranya yaitu seperti mengapa rumah itu tidak ditempati dan dibiarkan terbengkalai? dan mengapa rumah tersebut dapat dimiliki oleh masyarakat Indonesia? Munculnya pertanyaan-pertanyaan tersebut bermula ketika seringnya penulis menjumpai rumah-rumah masyarakat Belanda yang telah terbengkalai atau ditempati oleh masyarakat Indonesia ketika penulis pergi ke tempat tertentu. Berdasarkan hal ini maka telah mendorong penulis untuk dapat meneliti hal ini lebih jauh.

I.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu Heuristik, Kritik, Interpretasi dan Historiografi. Dalam penggunaan metode ini juga tidak terlepas dari konsep 5 W 1 H yang terdiri dari *What? Who? Where? When? Why?* dan *How?* Pada tahap Heuristik, dimulai dengan mengumpulkan data-data yang menunjang baik data lisan ataupun tertulis. Pada tahap ini penulis mencari sumber-sumber yang dibutuhkan dengan studi kepustakaan dan kearsipan. Studi kepustakaan meliputi pencarian diberbagai Perpustakaan seperti Perpustakaan FIB UI, Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan Miriam Budiarjo FISIP UI, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Museum Satria Mandala, dan Perpustakaan Erasmus Huis. Sedangkan studi kearsipan penulis mencari data yang diperlukan dengan mendatangi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Pada proses Heuristik penulis mulai mencari sumber primer pada sumber-sumber sejarah yang tersedia yaitu seperti arsip pemerintah atau instansi, koran, majalah, dan wawancara. Dalam mencari sumber primer arsip pemerintahan atau instansi terkait penulis cukup mengalami kesulitan dalam hal birokrasi yang terlalu berbelit-belit dan cenderung mempersulit penulis. Selain itu dalam mencari sumber-sumber tersebut juga terkadang sumber-sumber yang dibutuhkan tersebut tidak tersedia pada arsip atau instansi yang terkait. Dalam mencari sumber primer koran dan majalah penulis mengalami cukup banyak kesulitan dalam

mendapatkan sumber-sumber yang membahas mengenai peristiwa ini. Hal ini dikarenakan setiap koran pada umumnya memiliki kepribadian yang berbeda-beda baik sebagai koran yang kritis terhadap pemerintah ataupun hanya sebagai corong pemerintah. Pada koran-koran yang kritis terhadap pemerintah sumber-sumber yang penulis butuhkan untuk keperluan penelitian cukup banyak tersedia. Sedangkan pada koran-koran yang kurang kritis ataupun hanya sebagai corong pemerintah maka sumber-sumber yang penulis butuhkan untuk keperluan penelitian tidak banyak tersedia. Begitu halnya dengan majalah. Sedangkan pada sumber wawancara penulis juga mengalami cukup kesulitan dikarenakan tidak semua orang yang hidup pada masa itu mengerti mengenai permasalahan ini. Selain itu juga tidak semua orang yang hidup di masa itu mau untuk diwawancarai. Dalam mencari sumber sekunder penulis juga cukup mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya penulis Indonesia yang membahas mengenai tema ini.

Pada tahap kritik penulis mencoba mengkritik sumber-sumber yang telah didapat yaitu baik yang berasal dari arsip pemerintah atau instansi terkait, koran, majalah, wawancara, buku, dan jurnal. Pada tahap ini penulis mencoba untuk menganalisis sumber-sumber yang telah didapat tersebut yaitu apakah sumber-sumber tersebut dapat dijadikan sumber yang menunjang penelitian ini atau tidak? Seperti halnya mengenai sumber-sumber yang penulis dapatkan yaitu berupa sejumlah potongan-potongan artikel kecil yang didapat dari berbagai majalah. Potongan-potongan artikel kecil ini ternyata kurang dapat untuk menggambarkan peristiwa repatriasi ini. Sehingga sumber-sumber tersebut pun tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama. Begitu halnya dengan jurnal-jurnal seaman yang membahas sekitar kehidupan masyarakat Indo Belanda dan peristiwa repatriasi masyarakat Belanda. Berdasarkan jurnal-jurnal yang penulis dapatkan tersebut tidak semua sumber-sumber ini dapat digunakan untuk menunjang kepentingan penelitian ini. Hal ini dikarenakan pembahasan sebagian jurnal-jurnal tersebut lebih menekankan kepada sisi lain yang tidak dibahas oleh penulis yaitu seperti nasib masyarakat Indo Belanda di Belanda.

Pada tahap Interpretasi fakta-fakta yang telah penulis didapatkan dari berbagai sumber tersebut. Maka kemudian penulis mencoba untuk memahami

lebih dalam terhadap fakta-fakta tersebut yaitu apakah fakta-fakta tersebut sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya? dan apakah fakta-fakta tersebut dapat digunakan sebagai data penunjang penelitian atau tidak? Hal ini seperti pada data-data jumlah masyarakat Belanda di Indonesia yang direpatriasi pada 1957-1958 ternyata sangat beragam. Dikatakan bahwa jumlah masyarakat Belanda yang telah direpatriasi terdapat sekitar 45.000, 50.000, dan bahkan 55.000. Berdasarkan data-data tersebut maka penulis pun mencoba mencari keakuratan data-data tersebut sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya.

Pada tahap Historiografi penulis akan mencoba menyusun kembali potongan-potongan kisah peristiwa ini menjadi suatu kesatuan peristiwa yang utuh berdasarkan fakta-fakta yang telah penulis dapatkan dari berbagai sumber baik arsip pemerintah tau instansi terkait, koran, majalah, wawancara, buku, dan jurnal. Selain itu penyusunan kembali peristiwa ini tentunya juga disesuaikan dengan fokus pembahasan penulis terhadap peristiwa ini. Tahap historiografi ini adalah merupakan tahapan terakhir dalam metode sejarah dengan menggambarkan peristiwa ini secara utuh dari fakta-fakta yang telah melewati beberapa tahapan yaitu seperti kritik dan interpretasi. Sehingga pada akhirnya menghasilkan sebuah penulisan yang dapat dipertanggung jawabkan.

I.6 Sumber Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini penulis banyak memanfaatkan sumber-sumber sejarah yang tersedia baik berupa koran, majalah, buku, jurnal dan wawancara. Namun dari sumber-sumber tersebut penulis lebih banyak menggunakan sumber primer yaitu diantaranya dokumen pemerintah ataupun instansi, koran, majalah, ataupun wawancara. Hal ini dikarenakan sangat sedikitnya penulis lain yang membahas tema ini. Sumber-sumber primer yang berasal dari dokumen pemerintah ataupun instansi yaitu diantaranya seperti Kementerian Luar Negeri. "Hutang Apa Jang Kita Bataalkan?" Jakarta: 1957, Laporan Tahunan Universitas Indonesia 1957-1958, Lembaran Kota Pradja Djakarta Raja No. 22 tahun 1959, Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/016/1957, dan *Statistical Pocket Book of Indonesia* 1960.

Sedangkan sumber primer yang berasal dari koran diantaranya yaitu seperti

koran Indonesia Raya, Pedoman, Suluh Indonesia, dan Pemandangan. Sumber-sumber primer yang didapatkan dari majalah diantaranya yaitu seperti Majalah Berita Masjumi, Majalah Berita Baperki, Majalah *De Huisvrouw*, Majalah *Het Motor Verkeer*, Majalah Hikmah Mingguan Islam Populer, Majalah Ikhtisar Indonesia Sepekan, Majalah Kota Pradja, Majalah Merdeka, Majalah Mingguan Sadar, Majalah Nasional, Majalah Pembimbing, Majalah Sikap, Majalah *The Commercial Weekly*, Majalah Wanita dan Rumah Tangga, Majalah Warta Dagang Sepekan, dan Majalah Warta Imigrasi. Disisi lain dalam melengkapi sumber-sumber tersebut penulis pun juga melakukan wawancara terhadap orang-orang yang hidup di masa itu atau mereka yang mengalami langsung peristiwa tersebut yaitu diantaranya seperti Bapak Firman Lubis, Ibu Marietje Solarbesain, dan Bapak Haji Arifin Kaldjunin.

Selain menggunakan wawancara dalam melengkapi penelitian ini penulis juga menggunakan sumber sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal. Beberapa jurnal-jurnal tersebut diantaranya yaitu Gross, Andrew. *From Tong-Tong To Tempoe Doeloe: Eurasian Memory Work And The Bracketing Of Dutch Colonial History, 1957-1961*. Van Der Kroef, Justus M. "Disunited Indonesia." *Far Eastern Survey*, 4 (1958): 49-63. Van Der Kroef, Justus M. "The Eurasian Minority In Indonesia." *American Sociological Review*, vol 18, no. 5 (1953): 483-493, dan Van Der Veur, Paul W. "Eurasian Dilema In Indonesia" *The Journal of Asian Studies*, vol. 20. No. 1 (1960): 45-60. Sedangkan sumber-sumber sekunder yang berasal dari buku diantaranya seperti: Hellwig, Tineke. (2007). *Citra Kaum Perempuan Di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, J.E. Ellemers dan R.E.F. Vaillant. (1985). *Indische Nederlanders en Grepatrierden*. Muiderberg: Dick Coutinho, Kraak, J.H. (1957). *De Repatriering uit Indonesie: Een onderzoek naar de integratie van de grepatrierden uit Indonesie in de Nederlandse samenleving*. Gravehage: Staatsuitgeverij dan Soekiman, Djoko. (2000). *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya Di Jawa Abad XVIII-Medio Abad XX*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Dalam melengkapi sumber-sumber tersebut penulis pun juga menggunakan buku-buku yang membahas mengenai peristiwa pada rentang waktu yang sama ataupun berdekatan. Selain itu penulis juga menggunakan buku-buku memoar dan

karya sastra dalam bentuk novel. Buku-buku tersebut diantaranya yaitu Kahin, Audrey R. dan George McT. Kahin. (1997). *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Grafiti, dan Kanumoyoso, Bondan. (2001). *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia 1957-1959*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Sedangkan buku-buku yang berasal dari memoar yaitu Lubis, Firman. (2008). *Jakarta 1950-an, Kenangan Semasa Remaja*. Jakarta: Masup Jakarta. dan Utrecht, Elieen. (2006). *Melintasi Dua Jaman, Kenangan Tentang Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan*. Jakarta: Komunitas Bambu. Sumber-sumber lainnya yang berasal dari karya sastra dalam bentuk novel yaitu seperti E. Breton de Nijs. (1975). *Bayangan Memudar, Kehidupan Sebuah Keluarga Indo*. Jakarta: P.T. Bumi Restu, Mahieu, Vincent. (1976). *Cuk*. Jakarta: Djambatan dan Mahieu, Vincent. (1976). *Cis*. Jakarta: Djambatan.

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari V bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang akan membantu dalam memperdalam penjelasan dari permasalahan yang diteliti. Kelima bab tersebut tersebut yaitu:

BAB I yang merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan masalah, Ruang lingkup permasalahan, Tujuan penulisan, Metode penelitian, Sumber sejarah dan Sistematika penulisan.

Pada BAB II akan membahas mengenai masyarakat Belanda di Jakarta setelah pengakuan kedaulatan.

Pada BAB III akan membahas mengenai peristiwa repatriasi masyarakat Belanda di Jakarta sebagai akibat dari permasalahan Irian Barat.

Pada BAB IV akan membahas mengenai memudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta.

Pada BAB V akan membahas mengenai kesimpulan dari penelitian ini

BAB II

MASYARAKAT BELANDA DI JAKARTA SETELAH PENGAKUAN KEDAULATAN

II. 1 Masyarakat Indo Belanda dan Belanda Totok

Jakarta adalah merupakan kota multietnis dan multibangsa yang terdiri dari berbagai masyarakat baik pribumi ataupun asing yang mendiami kota tersebut. Keberadaan masyarakat asing di Jakarta pada umumnya telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan mengalami proses yang panjang. Begitu halnya dengan masyarakat Belanda. Awal kedatangan masyarakat Belanda di Jakarta ini dimulai pada masa VOC yang diawali dengan melakukan perdagangan di wilayah nusantara. Dalam perkembangannya untuk menunjang kegiatan perdagangan tersebut maka kemudian didirikanlah Batavia setelah merebutnya dari penguasa setempat. Setelah terbentuk Batavia maka pemerintah VOC kemudian mulai mendatangkan orang-orang Eropa yang sebagian besar adalah merupakan orang Belanda untuk dipekerjakan kepada perusahaan dagang tersebut. Pada umumnya orang-orang Eropa tersebut dipekerjakan sebagai pegawai sipil dan militer. Dalam perkembangannya keberadaan orang-orang Belanda di Batavia ini mulai dikeluhkan oleh Gubernur Jenderal J.P. Coen terutama mereka yang berada di dalam bidang kemiliteran. Orang-orang Belanda yang berada di bidang ini dinilai sebagai orang yang malas, bodoh, dan tidak dapat berbahasa Belanda dengan baik⁸. Hal ini tentunya tidaklah mengherankan dikarenakan mereka yang mendaftar menjadi prajurit VOC pada umumnya adalah merupakan orang-orang miskin dan tersingkir. Bahkan beberapa prajurit juga diambil dari orang-orang yatim piatu yang terdapat di panti asuhan.

Selain untuk mengisi kebutuhan akan tenaga kerja di VOC kedatangan orang-orang Eropa di Batavia juga ditujukan untuk membentuk suatu masyarakat Eropa yang tetap dan menetap di wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan banyak dari pegawai VOC ketika sudah menyelesaikan pekerjaannya maka mereka akan kembali ke Belanda. Menurut G.A. Andriess para orang-orang Belanda tersebut

⁸ Surat tertanggal 3 November 1628 dalam H. T. Colenbrander, *Jan Pietersz. Coen, bescheiden omtrent zijn bedrift in Indie* (s-Gravenhage: M. Nijhoff, 1923), 5:130. Seperti yang dikutip oleh Jean Gelman (2009:8).

dimasukkan ke dalam golongan *Trekkers* (orang yang hanya singgah). Sedangkan bagi pegawai VOC yang telah menyelesaikan tugasnya dan memutuskan untuk menetap di Batavia. Maka mereka digolongkan sebagai *Blijvers* (orang yang tinggal dan menetap). Keberadaan kaum *Blijvers* tersebut tentunya cukup sulit di Batavia. Selain jauh dari tanah air mereka juga harus bertahan dengan segala keterbatasan yang mereka miliki dan ditambah dengan berbagai peraturan pemerintah yang bersifat mengekang.⁹ Dalam perkembangannya untuk dapat memenuhi kebutuhan biologisnya maka banyak diantara mereka pada akhirnya jatuh ke dalam praktek pergundikan¹⁰ hingga menghasilkan suatu ras campuran yang biasa disebut sebagai Mestizo, Kreol, *Indo*¹¹ *European*, *Eurasia*, ataupun Indo Belanda.

Kemunculan anak-anak dari hasil hubungan yang tidak sah ini tentunya sangat tidak diinginkan oleh orang Belanda tersebut dan masyarakat Belanda secara umum. Sehingga status masyarakat Indo Belanda di masyarakat Belanda bersifat tidak jelas yaitu apakah mereka masuk ke dalam golongan Eropa ataukah pribumi? Mengenai hal ini pada umumnya hanya tergantung kepada ayah dari anak tersebut yaitu apakah ia mengakui anak-anak itu sebagai anaknya atau tidak. Apabila ia mengakui anak tersebut sebagai anaknya maka anak-anak tersebut secara langsung akan dimasukkan ke dalam golongan Eropa dan tentunya dengan beserta hak-hak yang layaknya dimiliki oleh seorang anak Eropa. Sedangkan bagi anak-anak yang tidak diakui oleh ayahnya maka mereka secara langsung akan hidup layaknya seperti masyarakat pribumi. Berdasarkan hal ini maka dapat

⁹Peraturan yang mengekang ini berupa larangan-larangan terhadap para pegawai Belanda seperti larangan membawa pasangan ke tanah jajahan, larangan menikah dalam jangka waktu tertentu, dan sebagainya, untuk lebih jelas lihat: Tineka Hellwig. (2007). *Citra Kaum Perempuan Di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Obor. Dan Jean Gelman Taylor. (2009). *Kehidupan Sosial Di Batavia, Orang Eropa Dan Eurasia Di Hindia Timur*. Jakarta: Masup.

¹⁰Pergundikan merupakan suatu istilah yang menggambarkan kehidupan masyarakat Hindia Belanda pada saat itu yang hidup dengan wanita simpanan tanpa ikatan pernikahan yang resmi dan biasanya para wanita tersebut berasal dari masyarakat pribumi. Mengenai gundik ini terdapat istilah lain yang sama menggambarkan hal ini yaitu nyai. Istilah nyai pada abad ke 17-18 masih bersifat murni yaitu lebih mengacu kepada sebutan terhadap istri. Namun ketika memasuki abad ke 19 istilah nyai telah mengalami pergeseran makna menjadi sebutan terhadap wanita simpanan.

¹¹ Mengenai konsep pengertian dari Indo ini masih bersifat fleksibel sesuai dengan perkembangan jaman. Pada saat itu istilah Indo hanya ditujukan kepada masyarakat hasil percampuran antara Indonesia dan Belanda. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat asing yang ada di Indonesia secara umum adalah Belanda. Namun dalam perkembangannya istilah ini pun mulai mengalami pergeseran makna dimana sekarang setiap orang Indonesia yang memiliki hubungan percampuran darah dengan orang asing dapat dikatakan sebagai Indo walaupun untuk kriteria orang asing ini menjadi kabur dan luas yang mencakup siapa saja yang dapat digolongkan kepada orang asing.

dikatakan bahwa di dalam masyarakat Indo Belanda terbagi menjadi dua lapisan masyarakat yaitu masyarakat Indo Belanda yang berasal dari golongan atas dan golongan masyarakat bawah.

Secara umum masyarakat Indo Belanda digambarkan oleh masyarakat Belanda sebagai seorang yang memiliki penguasaan bahasa Belanda yang buruk, seorang yang lamban, tidak dapat diandalkan, terlalu bersikap tunduk atau sebaliknya. Sedangkan bagi para wanita terkenal sebagai wanita yang sensual, genit, dan suka merayu kaum laki-laki.¹² Dalam perkembangannya keberadaan masyarakat Indo Belanda tersebut kemudian mulai mendapatkan diskriminasi dari masyarakat Belanda Totok. Hal ini dikarenakan sebagian besar diantara mereka berbeda dengan masyarakat Belanda secara umum yaitu seperti memiliki kulit yang gelap dan sebagainya. Memasuki abad ke 19 sikap diskriminasi ini menjadi semakin meningkat seiringan dengan meningkatnya jumlah kedatangan masyarakat Belanda ke Hindia Belanda. Masyarakat Belanda tersebut pada umumnya memandang bahwa masyarakat Belanda yang berada di Hindia Belanda adalah orang daerah pedalaman yang tidak berbudaya dan sangat berbeda dengan budaya yang ada di Belanda. Kedatangan para masyarakat Belanda Totok tersebut secara langsung telah memaksa kebudayaan *Indis*¹³ yang telah mengakar di dalam masyarakat Batavia semakin ditinggalkan dan lebih menuju kepada Eropanisasi di segala bidang.

Keadaan ini secara langsung telah berdampak terhadap masyarakat Indo Belanda dimana unsur kebudayaan *Indis* yang sangat erat dengan kehidupan mereka pun kini telah ditolak dan ditinggalkan. Melihat kenyataan ini maka dalam perkembangannya keberadaan mereka menjadi semakin terpinggirkan. Sehingga banyak diantara mereka kemudian beralih kepada usaha perkebunan. Hal ini dikarenakan telah tertutupnya kemungkinan bagi mereka untuk dapat menempati posisi yang penting di dalam pemerintahan. Sedangkan disisi lain kedudukan masyarakat Belanda Totok semakin kuat di dalam pemerintahan dengan segala

¹² Tineke Hellwig. (2007). *Citra Kaum Perempuan Di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 28.

¹³ Kebudayaan *Indis* merupakan kebudayaan yang terbentuk akibat percampuran dari kebudayaan Eropa dan pribumi. Kebudayaan ini sangat kuat dan mengakar dalam masyarakat Belanda di Batavia, untuk lebih jelas lihat: Djoko Soekiman. (2000). *Kebudayaan Indis Dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya Di Jawa Abad XVIII-Medio Abad XX*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

kemudahan yang mereka dapatkan. Sehingga bukan hal yang aneh apabila seorang pendatang dari Belanda dapat dengan mudah menempati posisi-posisi penting dalam pemerintahan. Ketika masa pendudukan Jepang 1942-1945 sebagian besar masyarakat Belanda dimasukkan ke dalam tempat penahanan. Sedangkan sebagian kecil lainnya tidak dimasukkan ke dalam tempat penahanan. Hal ini dikarenakan kadar campuran darah Belanda di dalam diri mereka lebih rendah dibandingkan kadar darah Indonesia.

Dalam menahan masyarakat Belanda militer Jepang menggunakan pendekatan asal usul untuk membedakan masyarakat Belanda murni ataupun campuran. Apabila mereka berasal dari Belanda Totok maka mereka secara langsung akan dimasukkan ke dalam tempat penahanan. Begitu pula dengan masyarakat Belanda yang memiliki percampuran darah dengan masyarakat Indonesia. Namun dalam hal ini terdapat aturan yang lebih ketat yaitu hanya mereka yang memiliki kadar darah Belanda lebih besar saja yang dimasukkan ke dalam tempat penahanan. Sedangkan bagi mereka yang memiliki kadar campuran darah Belanda lebih rendah maka mereka pun tidak akan ditahan. Setelah berakhirnya perang dunia II kehidupan masyarakat Belanda tidak sepenuhnya membaik. Hal ini dikarenakan munculnya kembali masa-masa sulit bagi mereka yaitu diantaranya seperti masa bersiap dan revolusi.

Disisi lain populasi masyarakat Indo Belanda di Indonesia terus berkembang secara pesat sehingga sebagian besar dari mayoritas masyarakat Belanda di Indonesia adalah berasal dari masyarakat Indo Belanda. Hal ini dapat dilihat pada sensus penduduk 1940 yang menyatakan bahwa dari sekitar 120.000 masyarakat Belanda yang tinggal di Indonesia dan dua pertiga dari jumlahnya adalah berasal dari masyarakat Indo Belanda. Sedangkan sisanya adalah masyarakat Belanda totok.¹⁴ Pada awal 1950-an populasi masyarakat Belanda di Indonesia terdapat sekitar 80.000 orang dan di Jakarta tercatat sebanyak 56.834 orang.¹⁵ Namun jumlah ini terus berkurang hingga akhir tahun 1950-an dan pada

¹⁴ Firman Lubis. (2008). *Jakarta 1950-an, Kenangan Semasa Remaja*. Jakarta: Masup Jakarta, 281.

¹⁵ Pada akhir 1950 di Jakarta tercatat terdapat 56.834 masyarakat Eropa dan pada akhir Oktober 1951 tercatat sebanyak 52.405 masyarakat Eropa yang terdiri dari 17.053 laki-laki, 17.546 perempuan, 9.108 pemuda, dan 8.693 pemudi. Lihat: I.R. (1951, 3 Desember). "Europese bevolking van Djakarta". *Warna Warta Dagang Sepekan*, 13.

1957-1958 jumlah masyarakat Belanda di Jakarta terdapat sekitar 14.000 orang.¹⁶ Masyarakat Belanda tersebut pada umumnya hanya tinggal di daerah-daerah tertentu saja yaitu seperti Menteng, Gondangdia, Gambir, Petojo, Salemba, Matraman, Jatinegara, Kebayoran Baru, Manggarai, Kramat, dan sebagainya.

II. 2 Kehidupan Masyarakat Indo Belanda dan Belanda Totok.

Setelah berakhirnya masa Konferensi Meja Bundar pada 1949 maka masyarakat Belanda yang telah lama berada di Indonesia kini diharuskan untuk menentukan nasibnya sendiri yaitu terutama mengenai status kewarganegaraan. Pada pembahasan rancangan persetujuan Konferensi Meja Bundar pemerintah Indonesia telah menekankan bahwa masyarakat keturunan asing di Indonesia baik Indo Belanda, Arab, dan Tionghoa berlaku sistem pasif pada diri mereka yang berarti bahwa dengan sendirinya mereka telah dianggap sebagai warga Negara Indonesia.¹⁷ Namun hal ini ditolak oleh para delegasi Belanda dalam Konferensi Meja Bundar dengan alasan bahwa peraturan tersebut tidak memberikan ruang kepada masyarakat peranakan untuk dapat menentukan status kewarganegaraannya.

Dalam menindaklanjuti hal ini maka pemerintah kemudian memberlakukanlah sistem aktif bagi masyarakat keturunan Belanda. Berdasarkan Konferensi Meja Bundar maka masyarakat Belanda yang telah lama berada di Indonesia diharuskan untuk menentukan status kewarganegaraannya dalam jangka waktu dua tahun setelah penyerahan kedaulatan Indonesia. Sebagai hasilnya yaitu sebagian besar dari masyarakat Belanda tersebut pada umumnya lebih memilih kewarganegaraan Belanda dan sebagian kecil lainnya memilih kewarganegaraan Indonesia. Perbandingan jumlah masyarakat Belanda tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

¹⁶ Lubis, *Op. Cit.*, 280.

¹⁷ Hal Ini dilandaskan oleh UUD No.3, 10 April 1946. Lihat: I.E. (1951, 25 November). "Menindjau Soal Minoriteit". *Madjalah Kota Pradja*, 4.

Tabel II.2
Jumlah Masyarakat Belanda Yang Memilih Kewarganegaraan Indonesia
Berdasarkan Waktu Pendaftaran

Rentang Waktu	Laki-laki (N=9.505)	Janda (N=1.696)	Wanita Lajang (N=2.376)	Jumlah (N=13.577)
Desember 1949- Juni 1950	11.32	1.90	2.06	8.51
Juli-Desember 1950	10.20	8.07	5.35	9.08
Januari-Juni 1951	10.73	8.08	7.36	9.82
Juli-Desember 1951	(67.53)	(80.83)	(84.52)	(72.17)
Juli 1951	1.57	2.54	1.22	1.63
Agustus 1951	2.03	1.59	1.30	1.85
September 1951	2.90	2.83	2.19	2.77
Oktober 1951	5.52	5.78	5.64	5.58
November 1951	11.27	12.04	12.28	11.54
Desember 1951	44.24	56.05	61.89	48.80
Setelah batas masa penentuan	0.21	1.12	0.63	0.40
Tidak diketahui	0.01	0.08	0.02
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Paul W. Van Der Veur, (1960). "Eurasian Dilema in Indonesia". *Journal of Asian Studies*, Vol 20, No. 1, 45-60.

Keterangan:

*N= Jumlah

*Angka dalam bentuk persentase

Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa selama masa penentuan kewarganegaraan jumlah keseluruhan masyarakat Belanda yang telah memilih kewarganegaraan Indonesia adalah sebanyak 13.577 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 9.505 orang, janda sebanyak 1.696 orang, dan wanita yang belum menikah sebanyak 2.376 orang. Sedangkan masyarakat Belanda lainnya memilih kewarganegaraan Belanda.

Hal ini tentunya sangatlah wajar dengan melihat berbagai pertimbangan di dalam diri mereka sendiri yaitu diantaranya seperti kenangan pahit yang mereka dapatkan pada masa-masa sebelumnya yaitu masa pendudukan Jepang, kemerdekaan, bersiap, dan revolusi. Pada masa-masa tersebut banyak diantara

masyarakat Belanda mengalami perlakuan yang kurang baik dari masyarakat Indonesia sehingga kemudian mengakibatkan kebencian dan traumatis di dalam diri mereka. Namun disisi lain masalah perekonomian juga menjadi pertimbangan mereka untuk memilih kewarganegaraan Belanda. Pada umumnya masyarakat Belanda memandang bahwa sangat sulit untuk dapat melanjutkan kehidupan di Indonesia yang merupakan sebuah negara yang baru merdeka dengan keadaan ekonomi yang masih kurang baik. Selain itu masih terdapatnya uni Indonesia-Belanda pun juga menjadi pertimbangan mereka untuk memilih kewarganegaraan Belanda.¹⁸ Sedangkan bagi masyarakat Belanda yang memilih kewarganegaraan Indonesia terutama masyarakat Indo Belanda pada umumnya mereka memandang bahwa dengan menjadi warga negara Indonesia maka mereka akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar dan perlakuan yang sama di dalam bidang perekonomian jika dibandingkan dengan menjadi orang asing¹⁹.

Pemerintah Belanda sendiri mengenai permasalahan ini pada umumnya lebih menekankan kepada masyarakat Belanda yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia terutama masyarakat Indo Belanda atau *Eurasia* untuk memilih kewarganegaraan Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah Belanda merasa sulit²⁰ untuk dapat menerima dan mengakui keturunan dari para pionir pegawai Belanda terdahulu. Sehingga pada akhirnya hal ini mengakibatkan dilematis tersendiri bagi para masyarakat Indo Belanda dengan ketidaktentuan yang mereka hadapi. Disisi lain selama berlangsungnya masa penentuan kewarganegaraan di Indonesia terdapat dua kelompok masyarakat Belanda yang saling berbeda pandangan mengenai pilihan status kewarganegaraan yang harus ditentukan oleh masyarakat Belanda di Indonesia. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya yaitu terdiri dari masyarakat Belanda yang anti dan pro terhadap pemerintah Indonesia.

Kelompok yang anti terhadap pemerintah Indonesia mereka menekankan kepada masyarakat Belanda ataupun Indo Belanda untuk segera memilih kewarganegaraan Belanda dan segera membentuk koloni baru di Hollandia (Irian

¹⁸ Firman Lubis. (2011, 10 Juni). Wawancara pribadi.

¹⁹ Paul W. Van Der Veur. (1960). "Eurasian Dilema in Indonesia". *Journal of Asian Studies*, Vol 20, No. 1, 49.

²⁰ Sulitnya pemerintah Belanda untuk menerima para masyarakat Indo Belanda ini selain dikarenakan masalah perbedaan fisik namun disisi lain juga terkait mengenai masalah biaya yang akan dikeluarkan oleh pemerintah Belanda untuk menampung mereka sehingga pemerintah Belanda lebih menerapkan kebijakan emigrasi dari pada menampung mereka.

Barat). Hal ini ditujukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik terhadap masyarakat Belanda tersebut. Pada umumnya para kelompok yang anti terhadap pemerintah Indonesia ini tergabung dalam sebuah organisasi yang dibentuk untuk mengajak para masyarakat Belanda membentuk koloni baru di Irian Barat. Organisasi-organisasi tersebut diantaranya yaitu seperti *Groter Nederland Actie* dan *Kolonisatie Nieuw Guinea*.

Sedangkan bagi kelompok yang pro terhadap pemerintah Indonesia mereka menekankan kepada masyarakat Belanda terutama yang berasal dari kalangan Indo Belanda untuk segera memilih kewarganegaraan Indonesia dan melakukan asimilasi secara keseluruhan dengan masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan selain untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Namun hal ini juga dilakukan untuk mengajak masyarakat Indo Belanda menjadi warga Negara Indonesia sepenuhnya dan dapat lebih mencintai tanah kelahirannya. Kelompok ini pada umumnya terdiri dari beberapa organisasi yaitu diantaranya seperti *Indo National Partij* dan Front Nasional Indonesia (FRONI) yang terdiri dari beberapa organisasi lainnya yaitu seperti Federasi Penghapus Minoriteit, Gerwi, Giwi, dan Kospam.²¹ Dalam perkembangannya upaya-upaya ini ternyata mendapatkan dukungan dari para pengusaha dan perusahaan besar lainnya yang banyak mempekerjakan masyarakat Belanda. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pengusaha Belanda dan asing lainnya yang tergabung dalam perusahaan bersama.

Dalam mengajak masyarakat Belanda untuk memilih kewarganegaraan Indonesia perusahaan tersebut melakukan kebijakan Indonesiasi terhadap pegawainya yang merupakan sebagian besar berkewarganegaraan Belanda. Selain itu terdapat juga beberapa perusahaan besar yang melakukan tindakan lebih keras yaitu dengan memberhentikan tidak hormat terhadap pegawainya yang tidak memilih kewarganegaraan Indonesia.²² Disisi lain tindakan keras ini juga dilakukan oleh orrganisasi *Ondernemersbond voor Indonesie* (Persatuan Pekerja untuk Indonesia). Pada 24 November 1951 organisasi ini mengirimkan surat peringatan kepada anggotanya untuk segera memilih kewarganegaraan Indonesia dengan harapan bahwa sebelum batas waktu penentuan kewarganegaraan berakhir mereka telah menjadi kewarganegaraan Indonesia.

²¹ Sukarma (1951, 21 Februari). "Tentang Soal Minoriteit III". *Sikap: Majalah Mimbar Politik*, 3.

²² Van den Veur, *op. cit.*, 50.

Setelah berakhirnya masa penentuan kewarganegaraan di Indonesia maka dalam perkembangannya muncullah permasalahan baru terhadap masyarakat Belanda dengan status asing yang tinggal di Indonesia. Keberadaan masyarakat Belanda ini dalam perkembangannya menjadi semakin sulit dan terpinggirkan. Sehingga banyak diantara mereka pada akhirnya kehilangan pekerjaannya. Hal yang sama terjadi pula terhadap masyarakat Indo Belanda terutama mereka yang berstatus sebagai warga negara asing. Pada umumnya sebagian besar masyarakat Indo Belanda tersebut adalah berasal dari kalangan masyarakat ekonomi lemah dan tidak memiliki kemampuan khusus. Sehingga hal ini pada akhirnya semakin mempersulit keadaan mereka.

Kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat Indo Belanda tersebut maka keberadaan mereka menjadi cukup lemah dalam perekonomian nasional Indonesia. Sehingga mereka dapat dengan mudah digantikan oleh pekerja Indonesia yang didukung oleh politik nasional dengan lebih mengutamakan pekerja Indonesia diberbagai bidang. Keadaan ini tentunya semakin sulit bagi masyarakat Indo Belanda. Sehingga pada akhirnya banyak diantara mereka kehilangan pekerjaannya. Dalam perkembangannya masyarakat Belanda yang telah kehilangan pekerjaannya tersebut maka banyak diantara mereka kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan Indonesia. Sedangkan bagi masyarakat Indo Belanda pada umumnya memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia²³ dengan bantuan tunjangan²⁴ dari pemerintah Belanda. Dalam mengatasi permasalahan ini kemudian muncul wacana yang mengusulkan untuk mewarganegarkan masyarakat Indo Belanda tersebut dengan melakukan naturalisasi. Namun hal itu tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila tidak terdapat keinginan dari masyarakat Belanda tersebut untuk menjadi warga negara Indonesia.

²³ Para masyarakat Indo Belanda masih diperbolehkan oleh pemerintah Indonesia untuk tetap tinggal di Indonesia dikarenakan mereka memiliki hubungan erat dengan Indonesia selain itu juga dikarenakan Negara nenek moyang mereka (Belanda) tidak bersedia mengangkut mereka ke Belanda. Untuk lebih jelasnya lihat: Sukarna (1953, 5 Oktober). "Undang-Undang Kewarganegaraan". *Sikap: Madjalah Mimbar politik*, 2.

²⁴ Mengenai besarnya tunjangan yang diberikan pemerintah Belanda terhadap warga negaranya yang berada di Indonesia belum dapat diketahui dengan pasti aturan dan jumlahnya. Namun terdapat suatu kasus dimana terdapat sebuah keluarga Indo Belanda yang memiliki 4 orang anak dan mereka mendapatkan tunjangan sebesar Rp. 450 perbulan. Untuk lebih jelasnya lihat: "Wanita Indo, Pahit getir Wanita Indo di Indonesia, di negeri Belanda dan di Irian Barat". (1953, 22 Oktober). *Madjalah Pembimbing*, 21.

Di sisi lain masyarakat Indo Belanda yang telah menjadi warga Negara Indonesia maka mereka kemudian mengabungkan diri dengan *Indo Europees Verbond* (Ikatan Indo Belanda). Dalam perkembangannya pada 24 Maret 1951 masyarakat Indo Belanda yang telah memilih menjadi warga negara Indonesia kemudian mengadakan kongres dan merubah nama *Indo Europees Verbond* menjadi GIKI (Gabungan Indo untuk Kesatuan Indonesia). Selain tergabung di dalam GIKI para masyarakat Indo Belanda ini juga tergabung dalam organisasi lainnya yaitu Partai Indo Nasional. Masuknya para masyarakat Indo Belanda dalam organisasi ini pada umumnya selain ditujukan untuk memperkuat hubungan diantara sesama mereka. Namun hal ini juga mereka lakukan untuk memperjuangkan pengakuan dari pemerintah Indonesia terhadap masyarakat minoritas sebagai warga negara Indonesia secara penuh.

Setelah berakhirnya Konfeensi Meja Bundar maka kehidupan masyarakat Belanda pada umumnya terus berjalan seperti biasa dan dapat dikatakan bahwa sebagian besar tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya yaitu pada masa Hindia Belanda. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kegiatan dan kebiasaan lainnya yang telah dilakukan oleh masyarakat Belanda pada masa sebelumnya dan terus berlangsung hingga pertengahan tahun 1950-an. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya yaitu seperti perkumpulan-perkumpulan masyarakat Belanda dan kegiatan berplesir ke tempat-tempat hiburan. Beberapa tempat hiburan yang banyak dikunjungi oleh masyarakat Belanda yaitu diantaranya seperti *Societeit de Harmonie*, *Jachtclub*, *Hotel des Indes*, dan sebagainya.

Societeit de Harmonie ini didirikan oleh Reiner de Klerk pada 1776 dan diresmikan pada 1815 oleh pemerintahan Raffles setelah mengalami penundaan yang cukup lama. Bangunan ini merupakan bangunan yang khusus dibangun sebagai tempat pertemuan bagi kalangan Eropa dan bangsawan terutama untuk kalangan pria. Sedangkan untuk kalangan umum yang dapat dikunjungi oleh pria maupun wanita terdapat tempat lain yaitu *Societeit Concordia*. Namun walaupun demikian terkadang wanita juga diundang untuk datang ke *Societeit de Harmonie*²⁵. Begitu pula dengan *Jachtclub* dan *Hotel des Indes* tempat ini pada masa pemerintahan Hindia Belanda adalah merupakan tempat elit yang ditujukan

²⁵Irawati. (1988). "In Memoriam Societeit de Harmonie". *Batavia Kisah Jakarta Tempoe Doeloe*. Jakarta: Intisari, 107.

bagi masyarakat Belanda menengah ke atas dalam menghabiskan waktu liburnya. Pada 1950-an tempat-tempat tersebut masih sering dikunjungi oleh masyarakat Belanda dan asing lainnya. Namun selain itu terdapat juga masyarakat Indonesia dan peranakan lainnya yang datang ke tempat tersebut dan biasanya mereka adalah berasal dari kalangan menengah ke atas.

Kebiasaan-kebiasaan tersebut memang pada awal 1950-an tidak hilang begitu saja dan masih cukup melekat di masyarakat Jakarta terutama mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Begitu pula dengan pengaruh masyarakat Belanda lainnya yaitu seperti penggunaan bahasa Belanda. Pada awal 1950-an penggunaan bahasa Belanda masih banyak ditemukan di masyarakat Jakarta baik dalam percakapan sehari-hari ataupun untuk keperluan tertentu. Selain itu kuatnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta dapat dilihat juga dari masih dirayakannya tradisi masyarakat Belanda oleh masyarakat Jakarta yaitu diantaranya seperti perayaan *Sinterklaas*. Perayaan *Sinterklaas* dirayakan setiap 25 Desember bersamaan dengan hari raya Natal yang khas dengan *Zwarte Piet* nya (pit hitam). Pada perayaan ini pada umumnya tidak hanya dirayakan oleh masyarakat Belanda saja. Namun hal ini juga dirayakan oleh masyarakat Indonesia terutama yang mereka berasal dari kalangan menengah ke atas. Dalam perkembangannya menjelang akhir 1950-an perayaan ini kemudian tidak dilakukan lagi oleh masyarakat Jakarta dikarenakan hal tersebut dilarang oleh pemerintah. Begitu pula dengan berbagai pengaruh masyarakat Belanda lainnya pun ikut dilarang yaitu seperti penggunaan bahasa Belanda, nama-nama Belanda, dan sebagainya.

II. 3 Kegiatan Sosial Masyarakat Indo Belanda dan Belanda Totok

Setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar maka berbagai kegiatan masyarakat Belanda di Indonesia pulih kembali. Menguatnya kembali kegiatan masyarakat Belanda tersebut maka dalam perkembangannya mendorong munculnya kembali berbagai kegiatan sosial diantara masyarakat Belanda di Jakarta. Kegiatan-kegiatan sosial masyarakat Belanda tersebut pada umumnya tidak hanya terbatas dalam bentuk sosialisasi saja yang biasa mereka dilakukan di *Societeit Harmonie*, *Societeit Concordia*, ataupun *Hotel Des Indes*. Namun

kegiatan sosial ini juga mencakup aspek lainnya yang lebih luas yaitu diantaranya seperti aspek sosial, ekonomi, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan sosial masyarakat Belanda ini kemudian mereka tuangkan dalam bentuk berbagai kegiatan perkumpulan baik sesama masyarakat Belanda ataupun dengan masyarakat Indonesia.

Disisi lain munculnya kembali berbagai perkumpulan masyarakat Belanda pada dasarnya hal ini tidak hanya terjadi setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar. Namun hal ini telah jauh terbentuk sejak masa Hindia Belanda. Dalam perkembangannya berbagai kegiatan perkumpulan masyarakat Belanda ini kemudian menghentikan kegiatannya ketika menjelang perang dunia II. Pada awal 1950-an berbagai kegiatan perkumpulan tersebut kembali dihidupkan oleh para masyarakat Belanda di Jakarta walaupun dengan jumlah perkumpulan yang kembali terbentuk lebih sedikit dibandingkan dengan masa lalu. Kegiatan perkumpulan-perkumpulan tersebut diantaranya yaitu seperti *Indonesische Motor Club*, *Vereeniging van Huis Vrouwen*, *Vereenigingen voor Handels onderwijs in Nederlansch Indie*, *Freemasonry*, *International Woman Club*, Perkumpulan Balapan Greyhound (PBG), dan sebagainya.

Indonesische Motor Club, perkumpulan ini kembali didirikan pada 1953 dengan tujuan untuk mempererat persatuan diantara para pengendara *Auto* (Mobil) dan membimbing pengendara untuk dapat lebih mengetahui mengenai dunia seputar berkendara dan kepariwisataan di Indonesia. Terbentuknya kegiatan perkumpulan ini tidak jarang juga dijadikan sebagai wadah sosialisasi kepolisian lalu-lintas Jakarta terhadap peraturan-peraturan baru yang dikeluarkan kepada pengendara mobil yang diantaranya yaitu seperti peraturan pembatasan kendaraan bermotor dan batas kecepatan maksimum dalam berkendara untuk mengantisipasi tingginya tingkat kecelakaan.²⁶

Namun selain itu perkumpulan ini juga menjadikan dirinya sendiri sebagai wadah sarana sosialisasi dunia kepariwisataan Indonesia terhadap anggotanya dan hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dibentuk ataupun diikuti oleh perkumpulan ini. Sedangkan untuk keanggotaannya perkumpulan ini tentunya bersifat terbuka terhadap siapa saja sehingga keanggotaannya tidak hanya terbatas

²⁶ I.M.C. (1953, Januari). "Er was eens" *Het Motorverkeer*, No. 1, 3.

dari kalangan masyarakat Belanda saja. Dalam mempererat persatuan diantara sesama anggota maka perkumpulan ini juga tidak jarang membentuk kegiatan *touring* atau mengikuti perlombaan ke tempat-tempat tertentu. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya yaitu seperti perlombaan dengan rute Jakarta-Merak, *touring* menuju Bali, perlombaan yang disponsori oleh K.L.M dengan nama *K.L.M-Bloemenrit* dan perlombaan *Java Bode Rit 1953*. Lihat lampiran II.

Pada 1 Maret 1953 perkumpulan ini mengadakan kegiatan perlombaan dengan rute Jakarta-Merak melalui Serang. Rute perjalanan tersebut tentunya telah ditentukan untuk dapat melewati tempat-tempat yang menarik seperti pantai dan sebagainya. Begitu halnya dengan *touring* menuju Bali. Pada kegiatan tersebut para anggota I.M.C. juga mengunjungi tempat-tempat yang memiliki daya tarik wisata yaitu diantaranya seperti pusat kebudayaan yang terdapat di Puri Tjokorde Gde Agoeng Soekawati dan obyek wisata Tanjung Benoa. Namun disisi lain untuk dapat mengikuti kegiatan *touring* tersebut para anggota I.M.C. sebelumnya diwajibkan untuk melengkapi peraturan-peraturan tertentu sebagai syarat utama untuk dapat ikut serta dalam kegiatan *touring* dan peraturan itu yaitu diantaranya adalah harus memiliki surat jalan dari kepolisian.²⁷ Pada kegiatan ini para anggota I.M.C diharuskan untuk mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yaitu terutama mengenai biaya transportasi penyeberangan dan sebagainya. Sedangkan untuk perlombaan *K.L.M.-Bloemenrit*, kegiatan ini menempuh beberapa kota besar dengan rute Jakarta, Kerawang, Cikampek, Cirebon, Bandung, Puncak dan Bogor. Pada perlombaan ini dibagi menjadi empat bagian perlombaan yang disesuaikan dengan jenis mobil dan kapasitas mesin.²⁸ Begitu pula dengan *Java Bode Rit*, kegiatan perlombaan ini juga terbagi menjadi menjadi beberapa bagian namun lebih besar dari pada *K.L.M-Bloemenrit* yaitu delapan bagian.

Kegiatan perkumpulan lainnya yang diikuti oleh masyarakat Belanda yaitu adalah *Vereeniging van Huis Vrouwen*. Perkumpulan ini kembali didirikan pada 1950 dengan tujuan untuk mengangkat derajat rumah tangga sebuah keluarga dalam arti yang seluas-luasnya. Pada perkumpulan ini sistem keanggotaannya

²⁷ W.H. Hoogland. (1953, Februari). "Over de BALI-trip" *Het Motorverkeer*, No. 2, 44.

²⁸ Untuk lebih jelasnya lihat I.M.C. (1953, Juni). "Uitslag K.L.M.-Bloemenrit 1953" *Het Motorverkeer*, No. 6, 133.

bersifat terbuka sehingga keanggotaannya tidak hanya terbatas kepada masyarakat Belanda saja. Terbentuknya perkumpulan ini tentunya telah membawa harapan yang besar terhadap para ibu rumah tangga dalam mengembangkan kecakapan dan keterampilan mereka. Dalam merealisasikan tujuan utamanya tersebut maka perkumpulan ini kemudian membentuk berbagai kegiatan-kegiatan rutin terhadap para anggotanya dan kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya yaitu seperti *Boeken Club* (Perkumpulan Buku), *Kookdemonstraties* (Demonstrasi memasak), *Thuis Naaien Leren* (Kursus Menjahit di Rumah), *Mode Show* (Peragaan Busana), *Bridge* (Bermain Kartu), dan sebagainya. Lihat lampiran III. Kegiatan-kegiatan tersebut tentunya cukup membantu para ibu rumah tangga dalam mengembangkan kecakapan dan keterampilan mereka. Namun kegiatan-kegiatan tersebut dikenakan biaya dengan ketentuan yang berbeda terutama diantara anggota dan bukan anggota perkumpulan.

Boeken Club, kegiatan ini dibentuk untuk membimbing para ibu rumah tangga untuk menjadi lebih baik dalam kegiatan rumah tangga dengan mengikuti bimbingan dari berbagai buku yang dipinjamkan kepada para anggota perkumpulan tersebut. Hal yang sama juga dilakukan oleh *Kookdemonstraties* dan *Thuis Naaien Leren*. Namun kegiatan ini lebih menekankan kepada praktek. Pada perkumpulan *Boeken Club* setiap anggota dibebankan biaya sebesar f 25 setiap bulannya dan dalam perkembangannya perkumpulan ini kemudian juga mulai mengikutsertakan para wanita muda untuk ikut dalam kegiatan ini dengan membentuk *Boeken Club* khusus untuk para wanita muda. Sedangkan *Bridge* kegiatan ini pada dasarnya adalah sama yaitu untuk memajukan para ibu rumah tangga. Namun hal ini lebih bersifat sebagai gaya hidup. Kegiatan ini dikenakan biaya sebesar f 25 untuk anggota perkumpulan *Vereniging van Huisvrouwen* sedangkan f 40 untuk bukan anggota.

Dalam menunjang kegiatannya tersebut perkumpulan *Bridge* ini juga secara rutin mengadakan perlombaan di *Hotel Des Indes* dengan menggunakan uang taruhan sebesar 3.50 rupiah.²⁹ Begitu halnya dengan *Mode Show* kegiatan ini tidak jauh berbeda dengan *Bridge* yang lebih menekankan kepada gaya hidup terutama dalam hal berpakaian. Selain itu terdapat pula kegiatan-kegiatan lainnya diluar

²⁹ Vereniging van Huisvrouwen. (1950-1953). "Bridge". *De Huisvrouw*, No.3, 15.

agenda rutin yang dilakukan perkumpulan ini yaitu diantaranya seperti *Fancy Fair* (Pasar amal), *Kinderfeest* (Pesta anak), dan sebagainya.

Disisi lain setelah berakhirnya masa penentuan kewarganegaraan di Indonesia. Maka hal ini kemudian juga mendorong munculnya perkumpulan-perkumpulan masyarakat Indo Belanda kewarganegaraan Indonesia di Jakarta. Perkumpulan masyarakat Indo Belanda tersebut bernama Gabungan Indo Untuk Kesatuan Indonesia (GIKI). Pada perkumpulan ini sistem keanggotaannya bersifat tertutup dan hanya terbatas kepada masyarakat Indo Belanda saja yang telah memilih kewarganegaraan Indonesia. Sehingga masyarakat Indo Belanda lainnya tidak dapat masuk dalam perkumpulan ini. Terbentuknya perkumpulan ini tentunya selain ditujukan untuk memperkuat hubungan diantara sesama mereka. Namun hal ini juga ditujukan untuk menampung dan memenuhi berbagai kebutuhan anggota perkumpulan tersebut. Dalam menunjang kebutuhan anggotanya tersebut maka dalam perkembangannya perkumpulan ini kemudian mulai menyediakan kebutuhan terhadap anggotanya yaitu diantaranya seperti pendidikan khusus bagi masyarakat Indo Belanda kewarganegaraan Indonesia.

Penyediaan kebutuhan pendidikan terhadap masyarakat Indo Belanda kewarganegaraan Indonesia ini pada dasarnya bukanlah untuk bersifat eksklusif ataupun memisahkan diri dari masyarakat Indonesia. Namun hal ini dilakukan dikarenakan sekolah-sekolah pada saat itu belum menggunakan bahasa pengantar yang seragam dan lebih menekankan kepada bahasa daerah terhadap setiap daerah kegiatan pendidikan itu berlangsung. Hal ini pun tentunya cukup menyulitkan anak-anak perkumpulan tersebut untuk dapat mengikuti pendidikan dan oleh sebab itu maka kemudian dibentuklah sekolah-sekolah khusus bagi anggota GIKI yang merupakan sekolah swasta dan terdiri dari beberapa tingkatan yaitu sekolah tingkat dasar, sekolah tingkat menengah, dan sekolah tingkat atas. Pendirian sekolah-sekolah ini tentunya hampir terdapat di setiap kota-kota besar di Indonesia terutama kota-kota yang memiliki basis perkumpulan I.E.V. Dalam perkembangannya kegiatan organisasi ini pun tidak berlangsung lama dan pada awal 1960-an perkumpulan ini menghentikan kegiatannya.

II. 4 Kegiatan Ekonomi Masyarakat Indo Belanda dan Belanda Totok

Setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar diantara pemerintah Indonesia dan Belanda maka dalam perkembangannya seluruh kegiatan perekonomian masyarakat Belanda di Indonesia menguat kembali. Menguatnya kembali kegiatan perekonomian masyarakat Belanda ini dikarenakan telah dicapainya kesepakatan diantara pemerintah Indonesia dan Belanda mengenai jaminan keberlangsungannya kembali seluruh kegiatan perekonomian masyarakat Belanda di Indonesia dalam konferensi tersebut. Sehingga semua perusahaan masyarakat Belanda di Indonesia dapat kembali melakukan kegiatan perekonomiannya. Dalam perkembangannya berlangsungnya kembali kegiatan perekonomian masyarakat Belanda tersebut maka hal ini mengakibatkan berlangsungnya kembali dominasi perekonomian masyarakat Belanda di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari kuatnya pengaruh berbagai perusahaan besar Belanda di Indonesia yang hampir menguasai seluruh aspek kegiatan perekonomian. Beberapa perusahaan besar Belanda tersebut pada umumnya dikenal dengan sebutan *The Big Five* yaitu yang terdiri dari *NV Borsumij*, *NV Jacobson van den Berg*, *NV Internatio*, *NV Lindevetes*, dan *NV Geo Wehry & Co*.

Disisi lain kuatnya pengaruh dominasi perekonomian masyarakat Belanda tersebut pun hal ini dapat dilihat pula dari bidang transportasi. Pada 1950-an seluruh perusahaan transportasi di Indonesia pada umumnya masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan transportasi Belanda yang diantaranya yaitu seperti *Koninklijke Luchvaart Maatschappij* (KLM), *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM), *Batavia Verkeer Maatschappij* (BVM), dan sebagainya. *Koninklijke Luchvaart Maatschappij* (KLM) adalah merupakan perusahaan penerbangan yang telah terbentuk sejak masa Hindia Belanda untuk melayani kebutuhan transportasi dalam negeri ataupun luar negeri. Begitu halnya dengan *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM) perusahaan ini adalah merupakan perusahaan pelayaran yang telah terbentuk sejak masa Hindia Belanda untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap lalu-lintas penyeberangan antar pulau ataupun antar negara. Dalam melayani kebutuhan masyarakat terhadap transportasi perusahaan ini memiliki jaringan yang luas sehingga hal ini semakin menguatkan kedudukannya dalam bidang transportasi laut. Sedangkan *Batavia*

Veerker Maatshappij (BVM) adalah merupakan perusahaan transportasi dalam kota yang terdapat di Jakarta. Dalam memberikan pelayanannya terhadap masyarakat Jakarta perusahaan ini menyediakan beberapa sarana transportasi dalam kota yang diantaranya yaitu seperti bus dan tram.

Di Jakarta setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar maka berbagai perusahaan Belanda di Jakarta kembali melakukan kegiatan perekonomiannya. Berlangsungnya kembali kegiatan perekonomian masyarakat Belanda tersebut maka dalam perkembangannya hal ini mengakibatkan menguatnya pengaruh kegiatan perekonomian masyarakat Belanda di Jakarta. Kuatnya pengaruh perekonomian masyarakat Belanda tersebut maka hal ini dapat dilihat dari mendominasinya kembali berbagai perusahaan Belanda di Jakarta. Beberapa perusahaan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel II.4
Daftar Beberapa Perusahaan Belanda di Jakarta pada 1950-an

Nama Perusahaan Belanda	Bidang Usaha
<i>NV Machine Fabriek & Scheepswerf "Molenvliet"</i>	Pabrik Mesin dan Konstruksi Baja
<i>NV Philip's Fabricage & Handel Mij</i>	Radio, lampu listrik, bengkel, dan telekomunikasi
<i>NV Nimaf</i>	Arak, alkohol, spirtus, dan minyak kelapa
<i>NV W. A. Hoek's Machine & Zuurstof Fabriek</i>	Pabrik Mesin dan zat asam
<i>NV Industriële Mij Gebr. Van Swaay</i>	Mesin alat-alat listrik
<i>NV Beeger van Kempen</i>	Barang-barang dari alpaca dan perhiasan
<i>NV P. A. Renault's verf, inkt, & blikfabrieken</i>	Cat, tinta, dan kaleng

<i>NV Boekhandel & Drukkerij G. Kolf & Co</i>	Tinta dan percetakan
<i>NV Handel Mij "Europa Azie"</i>	Perusahaan layar dan perabot rumah
<i>NV Nimef</i>	Logam dan pengiriman
<i>NV. Bloksma Radiatoren Fabriek</i>	Bengkel mobil
<i>NV J. B. Wolters Uitgever Mij</i>	Penerbitan
<i>NV. J. J. R. Engels</i>	Gelas dan kawat
<i>NV. Termaaten</i>	Pabrik roti
<i>NV. Kohler & Anker smith</i>	Pabrik bir
<i>NV Verenigde Ijsfabriken</i>	Es

Sumber: Siahaan, (1996: 526-529). Seperti yang dikutip oleh Kanumoyoso, (2001: 132-144)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar pengaruh dominasi perekonomian masyarakat Belanda di Jakarta kembali menguat. Hal ini dapat dilihat dari beroperasinya kembali berbagai perusahaan Belanda di Jakarta yang tersebar hampir di seluruh bidang usaha. Perusahaan-perusahaan tersebut pada umumnya memiliki berbagai anak perusahaan yang tersebar di beberapa tempat dan terkadang pada salah satu anak perusahaan dari sebuah perusahaan membuka bidang usaha industry lainnya. Hal ini seperti yang terjadi terhadap *NV Nimef* dan *NV Boekhandel & Drukkerij G. Kolf & Co.* *NV Nimef* adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pabrik barang-barang logam dan pengiriman. Perusahaan ini memiliki 7 buah anak perusahaan yang tersebar di beberapa tempat. Namun salah satu anak perusahaannya yang bertempat di Mojokerto mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha lain yaitu *Fabriek Spiritus* atau pabrik Arak. Begitulahnya dengan *NV Boekhandel & Drukkerij G Kolf & Co.* Perusahaan ini adalah merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pabrik Tinta dan perusahaan ini memiliki 3 buah anak perusahaan yang tersebar di beberapa tempat. Namun pada salah satu anak perusahaannya yang bertempat di Surabaya mendirikan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha lainnya yaitu *Noordholff kolf* yang bergerak dalam bidang penerbitan.

Disisi lain kuatnya pengaruh dominasi perekonomian masyarakat Belanda

tersebut ternyata hal ini tidak dapat meningkatkan perekonomian seluruh masyarakat Belanda di Jakarta yaitu terutama para masyarakat Indo Belanda yang tidak memiliki keterampilan khusus. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Belanda di Indonesia kehidupan masyarakat Indo Belanda di Jakarta menjadi semakin tidak menentu dan hal ini kemudian semakin nyata ketika berakhirnya masa penentuan kewarganegaraan di Indonesia. Berakhirnya masa penentuan kewarganegaraan di Indonesia maka keberadaan masyarakat Indo Belanda dengan status asing ini menjadi semakin sulit. Di bidang ekonomi banyak perusahaan-perusahaan pemerintah kini menolak mempekerjakan masyarakat Indo Belanda tersebut. Hal ini dikarenakan mereka tidak memiliki keterampilan khusus. Namun selain itu hal tersebut juga dikarenakan pengaruh kebijakan pemerintah yang lebih menghendaki mempekerjakan pekerja Indonesia di segala bidang. Disisi lain hal yang sama juga dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan Belanda di Jakarta dengan menolak mempekerjakan para masyarakat Indo Belanda tersebut.

Sulitnya kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat Indo Belanda tersebut maka banyak diantara mereka pada akhirnya hanya dapat mengantungkan diri dari tunjangan yang diberikan oleh pemerintah Belanda setiap bulannya. Sedangkan bagi para wanita Indo Belanda pada umumnya mereka dapat bertahan dengan bekerja di berbagai jabatan rendah yaitu seperti pekerja di toko-toko pakaian, pelayan toko, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan wanita Indo Belanda pandai menarik pembeli, ulet dalam bekerja, dan tidak mempunyai rasa malu untuk melayani setiap pembeli. Begitulahnya dengan wanita Indo Belanda yang berasal dari kalangan terpelajar. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan oleh berbagai perusahaan dikarenakan pandai menarik hati. Sehingga banyak diantara mereka pada umumnya bekerja sebagai sekretaris ataupun sekretaris pribadi diberbagai perusahaan dagang asing. Banyaknya wanita Indo Belanda tersebut yang bekerja pada perusahaan asing hal ini dikarenakan upah yang ditawarkan lebih besar jika dibandingkan dengan bekerja pada instansi pemerintah. Namun selain itu hal ini juga dikarenakan masih terdapatnya rasa antipati mereka terhadap pemerintah Indonesia.³⁰

³⁰ "Wanita Indo, Pahit getir Wanita Indo di Indonesia, di negeri Belanda dan di Irian Barat". *Loc. Cit.*, 20.

BAB III

REPATRIASI MASYARAKAT BELANDA

III.1 Pandangan Pemerintah Indonesia Terhadap Keberadaan Masyarakat Indo Belanda Kewarganegaraan Asing di Indonesia.

Setelah berakhirnya masa penentuan kewarganegaraan maka kemudian terbentuklah dua kelompok masyarakat Indo Belanda di Indonesia yang terdiri dari masyarakat Indo Belanda dengan berstatus sebagai warga Negara Indonesia dan masyarakat Indo Belanda dengan berstatus sebagai warga Negara asing. Terbentuknya dua kelompok masyarakat ini maka kemudian semakin memperjelas kedudukan masyarakat Indo Belanda di Indonesia. Namun hal ini belum disadari oleh sebagian besar masyarakat Indo Belanda tersebut terutama masyarakat Indo Belanda dengan berstatus sebagai warga Negara asing. Masyarakat Indo Belanda dengan berstatus warga Negara asing tersebut pada umumnya mereka belum dapat menerima perubahan keadaan yang terjadi terhadap tanah kelahirannya ini. Sehingga mereka berusaha untuk tetap mempertahankan keadaan pada masa sebelumnya. Bahkan mereka juga masih memiliki kepercayaan diantara mereka bahwa suatu saat nanti pemerintah Belanda akan datangnya kembali.³¹ Dalam perkembangannya pandangan-pandangan ini terus berkembang di dalam diri mereka dan tanpa disadari bahwa hal ini pada akhirnya telah membawa mereka ke dalam suatu keterasingan di tanah kelahirannya sendiri.

Keputusan masyarakat Indo Belanda untuk menjadi warga negara asing maka hal ini harus mereka tanggung dengan akibat yang berat terhadap keputusannya tersebut. Secara umum keberadaan masyarakat Indo Belanda tersebut kini sepenuhnya telah menjadi asing dan dengan sendirinya pemerintah akan memperlakukan mereka sebagai warga Negara asing di Indonesia. Akibat dari hal itu maka kehidupan masyarakat Indo Belanda ini menjadi semakin sulit. Sehingga banyak diantara mereka yang pada akhirnya kehilangan pekerjaannya. Sulitnya kehidupan masyarakat Indo Belanda tersebut disebabkan oleh tertutupnya kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan terutama

³¹ *Ibid*, 21.

mereka yang tidak memiliki kemampuan khusus dan akibat dari hal itu maka jumlah pengangguran masyarakat Indo Belanda menjadi semakin meningkat. Dalam perkembangannya sulitnya keadaan yang mereka hadapi maka banyak diantara mereka pada akhirnya bertahan hidup dengan mengantungkan diri dari tunjangan pemerintah Belanda. Sedangkan masyarakat Indo Belanda lainnya memutuskan untuk pergi meninggalkan Indonesia dalam mencari penghidupan yang lebih baik.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Indo Belanda ini pada dasarnya bukanlah disebabkan oleh kesalahan mereka sepenuhnya. Namun melainkan terdapat faktor lain yang mendasarinya yaitu diantaranya seperti permasalahan kesalahpahaman diantara masyarakat Indo Belanda dan masyarakat Indonesia. Permasalahan kesalahpahaman ini berawal ketika pada masa pendudukan Jepang yang ditandai dengan munculnya rasa saling mencurigai diantara kedua kelompok masyarakat tersebut. Masyarakat Indonesia pada umumnya memandang bahwa masyarakat Indo Belanda adalah merupakan kaki tangan pemerintah Belanda. Sedangkan masyarakat Indo Belanda memandang bahwa masyarakat Indonesia adalah merupakan masyarakat pembenci dan penghianat. Kesalahpahaman diantara dua kelompok masyarakat ini kemudian semakin memburuk ketika memasuki masa bersiap dan akhirnya meletus dalam sebuah gerakan revolusi sosial yang disertai dengan aksi pembunuhan terhadap masyarakat Belanda. Munculnya peristiwa tersebut tentunya semakin memperdalam kesalahpahaman diantara kedua kelompok masyarakat tersebut dan akhirnya hal ini terbukti dengan sedikitnya masyarakat Indo Belanda yang memilih kewarganegaraan Indonesia setelah berakhirnya masa penentuan kewarganegaraan.

Disisi lain dalam menanggapi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Indo Belanda tersebut maka pemerintah Indonesia tidak dapat memberikan banyak pertolongan terhadap mereka dikarenakan status mereka bukanlah sebagai warga Negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri pada dasarnya hanyalah memberikan kesempatan kepada masyarakat Indo Belanda tersebut untuk menentukan kewarganegaraannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian pembagian kewarganegaraan dalam

Konferensi Meja Bundar. Namun apabila pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap mempertahankan status kewarganegaraan asingnya maka pemerintah Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap keputusannya itu dan segala konsekuensi yang akan mereka hadapi.³² Pemerintah menekankan bahwa sesungguhnya permasalahan ini pada dasarnya adalah telah berakhir sehingga tidak perlu untuk dibicarakan kembali. Namun dalam perkembangannya permasalahan ini kemudian kembali mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat luas. Sehingga mendorong munculnya berbagai pandangan terhadap upaya penyelesaian permasalahan ini. Pandangan-pandangan tersebut diantaranya yaitu menghendaki agar segera mewarganegarakan atau menaturalisasi masyarakat Indo Belanda dengan status asing tersebut. Namun disisi lain terdapat pula pandangan yang menghendaki agar segera dikeluarkannya masyarakat Indo Belanda tersebut dari Indonesia

Dalam perkembangannya pandangan-pandangan untuk mewarganegarakan atau menaturalisasi masyarakat Indo Belanda tersebut kemudian semakin banyak disuarakan oleh masyarakat dan bahkan diusulkan juga syarat-syarat pertimbangan yang lebih mudah dalam melaksanakan Undang-Undang Naturalisasi tersebut yaitu diantaranya:

1. Dilahirkan di Indonesia baik dari keturunan pertama, kedua, ataupun ketiga.
2. Keturunan dari masyarakat Indonesia baik dari tingkatan dan drajat apapun.
3. Penelitian menurut ukuran-ukuran keamanan Negara.
4. Mengetahui bahasa dan memiliki hubungan dengan masyarakat Indonesia.
5. Memiliki jaminan atau sokongan dari pihak warganegara Indonesia baik dari keluarga ataupun yang lainnya.³³

Usulan pertimbangan-pertimbangan ini dilakukan untuk mempermudah masyarakat Indo Belanda dalam mendapatkan kewarganegaraan Indonesia.

³² "Golongan Indo, 1.500 Kepala rumah-tangga memperoleh Kewarganegaraan-Indonesia". (1951, 15 Januari). *Ikhtisar Indonesia Sepekan*, 10.

³³ SK. (1952, 12 Mei). "Tentang Undang-Undang Naturalisasi". *Sikap: Madjalah Mimbar Politik*, No. 15, 5.

Sehingga dengan didapatkannya kewarganegaraan Indonesia maka kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi akan berakhir. Dalam memperjelas kedudukan masyarakat Indo Belanda tersebut maka kemudian diusulkan kembali agar dibentuknya Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia. Usulan-usulan ini kemudian diterima oleh pemerintah. Namun dalam pelaksanaannya hal ini lamban untuk direalisasikan. Begitu halnya dengan pembuatan Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesia yang terus berlarut hingga pada akhirnya baru terlaksana pada 1958. Lambannya pembuatan Undang-Undang ini disebabkan oleh buruknya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat yang belum memiliki keinginan untuk segera merealisasikan Undang-Undang tersebut.³⁴

Disisi lain semakin memburuknya hubungan Indonesia dan Belanda yang disebabkan oleh permasalahan Irian Barat maka kemudian pandangan-pandangan untuk mewarganegarakan masyarakat Indo Belanda ini kemudian semakin melemah dan bahkan lebih cenderung menghendaki terhadap pandangan yang kedua yaitu untuk segera mungkin mengeluarkan masyarakat Indo Belanda dari Indonesia. Memasuki akhir 1950-an pandangan-pandangan ini kemudian menjadi semakin kuat terutama ketika gagalnya kembali resolusi Indonesia di PBB pada 1957. Pada akhirnya hal ini kemudiani menjadi nyata ketika pemerintah memutuskan untuk merepatriasi atau memulangkan masyarakat Belanda dari Indonesia terutama masyarakat Belanda yang tidak memiliki pekerjaan. Dilaksanakannya kebijakan tersebut maka berakhirilah permasalahan masyarakat Indo Belanda dengan status asing ini di Indonesia.

III.2 Pandangan Pemerintah Belanda Terhadap Keberadaan Masyarakat Indo Belanda kewarganegaraan Belanda di Indonesia.

Permasalahan keberadaan masyarakat Indo Belanda di Indonesia pada dasarnya bukanlah hanya menjadi permasalahan bagi pemerintah Indonesia semata. Namun hal ini juga menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah Belanda. Setelah berakhirnya masa penentuan kewarganegaraan di Indonesia. Maka kemudian muncullah permasalahan terhadap keberadaan masyarakat Indo Belanda di Indonesia yaitu terutama mereka yang berstatus bukan sebagai warga

³⁴ *Ibid*

Negara Indonesia. Keberadaan masyarakat Indo Belanda ini dalam perkembangannya menjadi semakin sulit. Sehingga banyak diantara mereka pada akhirnya kehilangan pekerjaannya. Hal yang sama terjadi pula terhadap masyarakat Indo Belanda yang ingin mencari pekerjaan. Kedudukan mereka sebagai warga negara asing ternyata cukup menyulitkan mereka dalam mendapatkan pekerjaan. Sehingga pada akhirnya dapat dikatakan bahwa hampir semua kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan telah tertutup terhadap mereka.

Jauh sebelum berakhirnya masa pemerintahan Belanda di Indonesia. Pemerintah Belanda sendiri pada dasarnya telah merencanakan untuk membentuk sebuah daerah koloni tersendiri bagi masyarakat Indo Belanda yang bertempat di Irian Barat atau *Niuew Guinea*. Pembentukan daerah koloni ini selain ditujukan untuk menampung masyarakat Indo Belanda di Indonesia. Namun hal ini juga ditujukan untuk membentuk tanah air baru bagi masyarakat Indo Belanda dengan memberikan kesempatan kepada mereka membentuk pemerintahannya sendiri. Dalam merealisasikan rencana ini maka kemudian bermunculanlah berbagai organisasi yang mempropagandakan kolonisasi di Irian Barat yaitu diantaranya seperti *Groter Nederland Actie*, *Kolonisatie Nieuw Guinea*, *Verenigde Kolonisatie Niuew Guinea*, *Nederlands Cultureel Verbond*, dan sebagainya. Munculnya berbagai organisasi ini ditujukan untuk meraih simpati dari masyarakat Indo Belanda. Sehingga pada akhirnya diharapkan mereka dapat ikut serta dalam rencana tersebut. Dalam perkembangannya rencana ini ternyata kurang mendapatkan sambutan dari masyarakat Indo Belanda dan banyak diantara mereka pada akhirnya lebih memutuskan untuk pergi menuju negeri Belanda.

Banyaknya gelombang kedatangan masyarakat Indo Belanda tersebut tentunya telah menimbulkan kecemasan tersendiri bagi pemerintah Belanda terutama mengenai berbagai dampak permasalahan yang akan muncul dari hal ini. Kecemasan-kecemasan pemerintah Belanda ini pada akhirnya menjadi nyata ketika kemudian muncul penolakan dari masyarakat Belanda di negeri Belanda terhadap masyarakat Indo Belanda tersebut. Masyarakat Belanda tersebut pada umumnya merasa sulit untuk menerima dan mengakui mereka sebagai bagian dari masyarakat Belanda. Hal ini dikarenakan mereka bukanlah seorang Belanda yang sepenuhnya. Disisi lain berdatangnya masyarakat Indo Belanda tersebut juga

telah mengakibatkan semakin sulitnya kehidupan masyarakat Belanda di negeri Belanda. Keadaan ini tentunya cukup mengkhawatirkan bagi masyarakat Indo Belanda dikarenakan dapat memicu munculnya tindakan kekerasan terhadap mereka.

Dalam mengurangi beban permasalahan ini maka ketika tiga minggu menjelang sebelum berakhirnya batas masa penentuan kewarganegaraan. Pemerintah Belanda melalui A. TH Lamping yang bertugas sebagai Komisaris Agung Belanda di Jakarta menekankan kepada masyarakat Indo Belanda di Indonesia dengan menyatakan bahwa masyarakat Belanda yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia tidak memiliki alasan untuk menolak kewarganegaraan Indonesia.³⁵ Kebijakan ini kemudian mendapat dukungan dari perusahaan-perusahaan Belanda dengan melakukan Indonesiasi terhadap pegawainya yang memiliki kewarganegaraan Belanda. Dalam menjalankan kebijakannya tersebut perusahaan-perusahaan Belanda menekankan akan memecat pegawainya jikalau mereka tidak memilih kewarganegaraan Indonesia. Kebijakan ini tentunya mendapatkan reaksi keras dari masyarakat Indo Belanda. Namun kebijakan ini pada akhirnya tidak banyak memberikan pengaruh terhadap mereka.

Disisi lain munculnya berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indo Belanda dengan status asing setelah berakhirnya masa penentuan kewarganegaraan di Indonesia tentunya semakin memperberat beban permasalahan pemerintah Belanda. Melihat keadaan ini maka pemerintah Belanda kemudian memutuskan membentuk sebuah komisi khusus untuk meneliti kehidupan dan kemungkinan dapat atau tidaknya masyarakat Indo Belanda melanjutkan kehidupannya kembali di Indonesia. Komisi ini dipimpin oleh PH. Werner yang berasal dari Sekertariat Jenderal Kementerian Sosial Belanda. Dalam menjalankan tugasnya komisi ini pada akhirnya menghasilkan beberapa saran yang akan membantu pemerintah Belanda dalam menentukan kebijakannya dan saran-saran tersebut diantaranya:

1. Masyarakat Belanda yang bersifat kebaratan atau Belanda totok sebaiknya secepat mungkin diangkut ke negeri Belanda termasuk mereka

³⁵ Van Der Veur, *Op. Cit.* 51.

yang berasal dari kalangan kurang mampu.

2. Masyarakat Belanda yang bersifat ketimuran atau Indo Belanda lebih baik untuk tetap tinggal di Indonesia kecuali jikalau pemerintah Belanda menghendaki kebijakan emigrasi.
3. Dalam membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat Indo Belanda di Indonesia. Maka pemerintah Belanda diharuskan untuk membantu mereka secara bertahap yaitu: a) membentuk kerjasama antara dinas ketenagakerjaan Indonesia dan Belanda, b) memberikan bantuan keuangan untuk mendirikan perusahaan-peusahaan kecil yang berdiri sendiri, c) memberikan kursus pelatihan berupa pendidikan tehnik dan ekonomi, d) memberikan tunjangan atau pemeliharaan sosial selama masa peralihan, dan e) mendesak pemerintah Belanda untuk mempercepat asimilasi mereka dengan meminta kepada pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada masyarakat Indo Belanda yang belum menjadi warga Negara Indonesia agar dapat diterima menjadi warga Negara.³⁶

Dalam perkembangannya saran-saran ini pada akhirnya tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan semakin memburuknya hubungan Indonesia dan Belanda yang disebabkan oleh permasalahan Irian Barat. Keadaan ini kemudian semakin memburuk ketika memasuki akhir 1950-an dan memuncak ketika resolusi Indonesia di PBB mengalami penolakan kembali. Gagalnya resolusi Indonesia ini maka bersamaan dengan itu dimulailah berbagai aksi pengambilalihan terhadap kepentingan-kepentingan pemerintah Belanda di Indonesia. Keadaan ini tentunya telah mengakibatkan semakin tidak nyamannya keberadaan masyarakat Belanda di Indonesia. Hal ini kemudian diperburuk dengan munculnya berbagai demonstrasi yang menuntut agar segera dikeluarkannya masyarakat Belanda dari Indonesia. Melihat keadaan ini maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah Belanda selain mengangkut masyarakat Belanda tersebut ke negeri Belanda. Bersamaan dengan itu maka dimulailah gelombang-gelombang keberangkatan menuju negeri Belanda.

³⁶Antara. (1952, 3 November). "Tentang Masa Depan Orang-Orang Belanda di Indonesia, Dari Harapan Komisi Werner". *Pemandangan*, 2.

III. 3 Tindakan-tindakan keras Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan Permasalahan Irian Barat

Tidak terselesaikannya permasalahan Irian Barat setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar tentunya telah mengakibatkan kekecewaan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga dalam perkembangannya permasalahan ini kemudian menjadi semakin mendapat perhatian lebih dari berbagai pihak dalam upaya penyelesaiannya. Setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar perundingan sebenarnya telah dilaksanakan oleh kabinet Natsir. Namun hingga akhir 1950 permasalahan Irian Barat belum juga berhasil mendapatkan penyelesaian. Gagalnya kabinet Natsir dalam menyelesaikan permasalahan ini telah mengakibatkan hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kabinet. Sehingga hal ini mengakibatkan kabinet Natsir menjadi tidak populer di masyarakat. Dalam perkembangannya keadaan ini kemudian menjadi semakin memburuk dengan munculnya mosi tidak percaya dari beberapa partai politik di parlemen yaitu yang terdiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Indonesia Raya (PIR), Partai Rakyat Indonesia (PRI) dan Partai Katholik. Bermunculannya mosi tidak percaya dari beberapa partai politik ini pada akhirnya memaksa kabinet Natsir untuk mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada 21 Maret 1951.

Kegagalan kabinet Natsir dalam menyelesaikan permasalahan Irian Barat tidak hanya telah mengakibatkan kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Namun disisi lain hal ini juga telah mengakibatkan munculnya rasa kebencian terhadap pemerintah Belanda di masyarakat yang terus membesar dari tahun ke tahun. Munculnya rasa kebencian terhadap pemerintah Belanda ini kemudian banyak diluapkan oleh masyarakat dengan memunculkan berbagai pandangan dalam upaya penyelesaian permasalahan ini. Pandangan-pandangan tersebut pada saat itu sangat gencar disuarakan oleh masyarakat yang memiliki pendekatan pemikiran revolusioner yang menginginkan agar secepat mungkin diambil tindakan tegas terhadap pemerintah Belanda dengan tindakan-tindakan nyata seperti segera melepaskan hubungan dengan pemerintah Belanda dengan menghapus Uni Indonesia-Belanda, meninjau kembali hasil Konferensi Meja Bundar dan menghapusnya, memboikot modal-modal pemerintah Belanda di

Indonesia, dan sebagainya. Pandangan-pandangan tersebut pada dasarnya mendapatkan dukungan yang besar dari masyarakat. Namun hal ini ditentang keras oleh pemerintah dengan pertimbangan bahwa tindakan tersebut justru hanya akan merugikan Indonesia. Disisi lain munculnya rasa kebencian terhadap pemerintah Belanda maka hal ini kemudian juga mendorong munculnya berbagai organisasi perjuangan kemerdekaan untuk Irian Barat yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Organisasi-organisasi itu diantaranya yaitu seperti Komite Kesatuan Aksi Irian, Front Perjuangan Irian dan sebagainya.

Dalam perkembangannya rasa kebencian terhadap pemerintah Belanda ini kemudian terus meningkat seiring dengan gagalnya perundingan-perundingan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin menguatkan pandangan-pandangan masyarakat yang berhaluan revolusioner dan semakin menyudutkan pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas terhadap pemerintah Belanda. Hal ini tentunya cukup sulit bagi pemerintah Indonesia. Namun dalam perkembangannya pandangan-pandangan tersebut kemudian mulai diterapkan oleh pemerintah dalam berbagai kebijakan yang diambil terhadap pemerintah Belanda. Pada 1953 pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengakhiri misi bantuan militer Belanda di Indonesia. Disertakannya misi bantuan militer Belanda di Indonesia tersebut tentunya tidak terlepas dari persetujuan Konferensi Meja Bundar yang menyetujui diadakannya bantuan militer terhadap pemerintah Indonesia. Disisi lain dihapuskannya misi bantuan militer tersebut juga tidak terlepas dari keterlibatannya tentara Belanda dalam berbagai kegiatan pemberontakan yang terjadi di Indonesia yaitu diantaranya seperti pemberontakan Westerling, Andi Aziz, dan Republik Maluku Selatan (RMS).

Memasuki pertengahan 1950-an tindakan-tindakan pemerintah Indonesia menjadi semakin keras terhadap pemerintah Belanda. Pada 1954 pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan pemerintah Belanda dengan menghapuskan Uni Indonesia-Belanda. Dihapuskannya Uni Indonesia-Belanda ini disebabkan oleh tidak tercapainya penyelesaian permasalahan Irian Barat secara unilateral. Sehingga dirasakan tidak perlu lagi bagi pemerintah Indonesia untuk melanjutkan hubungan tersebut. Gagasan penghapusan uni ini

pada dasarnya telah disampaikan pada 1951 oleh Sukiman ketua umum Masyumi. Ia berpandangan bahwa ikatan ini adalah ikatan kosong yang tidak banyak memberikan keuntungan bagi Indonesia. Sehingga perlu dibentuk suatu kerjasama baru secara internasional diantara Indonesia dan Belanda.³⁷

Tindakan keras pemerintah ini mendapatkan sambutan yang besar dari masyarakat Indonesia dan semakin menguatkan tuntutan masyarakat Indonesia terhadap Irian Barat. Hal ini dapat dilihat dari rapat pembebasan Irian Barat di Jakarta yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Irian Barat pada 5 Desember 1956. Pada rapat tersebut dihasilkan sebuah resolusi yang berisi:

1. Menuntut untuk segera memasukkan Irian Barat secara unilateral ke dalam wilayah Indonesia dan menyatakan kekuasaan Pemerintah Belanda di Irian Barat sebagai agresi.
2. Segera membentuk pemerintahan provinsi Irian Barat.
3. Segera memutuskan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Belanda.³⁸

Pada 1956 tindakan keras kembali dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kabinet Ali Sastro Amijoyo dengan menolak mengakui hutang yang dibebankan oleh pemerintah Belanda dalam Konferensi Meja Bundar sebesar 3 milyar gulden.³⁹ Penolakan pemerintah Indonesia terhadap hutang tersebut dikarenakan hutang yang dibebankan oleh pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia itu adalah hutang yang digunakan oleh pemerintah Belanda untuk memerangi perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Memasuki 1957 rasa kebencian masyarakat Indonesia terhadap pemerintah Belanda menjadi semakin meningkat seiring dengan gagalnya resolusi-resolusi Indonesia di PBB. Dimasukkannya kembali permasalahan Irian Barat oleh kabinet Juanda pada Sidang Umum PBB ke XII tentunya telah memberikan sedikit harapan bagi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan ini. Namun walaupun demikian bayang-bayang kegagalan terhadap resolusi ini tetap menghantui Indonesia. Disisi lain pada 10 November 1957 bertepatan dengan

³⁷ Masjumi. (1951, 5 Januari). "Kerdja Sama Dalam Unie Sebaiknya Diputuskan". *Berita Masjumi*, No. 58, 3.

³⁸ Katoppo, *Op. Cit.*, 72.

³⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. *Hutang Apa Jang Telah Kita Batalan?*. Jakarta: 1957.

dirayakannya hari pahlawan telah dimulai gelombang pertama Aksi Pembebasan Irian Barat yang diisi dengan aksi demonstrasi terhadap kedutaan besar Belanda di Jakarta. Pada aksi demonstrasi ini para demonstran meluapkan amarah mereka dengan membakar sebuah boneka yang digambarkan sebagai pemerintah Belanda. Selain itu pada aksi ini para demonstran juga meluapkan amarah mereka dengan mencorat-coret rumah-rumah Belanda, gedung-gedung Belanda dan mobil-mobil partikelir dengan kata-kata makian seperti “Andjing Belanda”, “Bunuh Belanda”, “Usir Belanda”. “Usir Andjing Belanda”, “Usir Kolonialis”, “Ganjang Belanda”, dan sebagainya.⁴⁰

Pada 18 November 1957 gelombang kedua Aksi Pembebasan Irian Barat dilaksanakan dan dipimpin langsung oleh Presiden Sukarno. Pada aksi ini kegiatan Aksi Pembebasan Irian Barat lebih difokuskan kepada rapat besar yang dilakukan di lapangan Banteng dengan nama “Rapat Sedjuta Manusia”. Dalam rapat tersebut dihasilkan sebuah resolusi tuntutan nasional masyarakat Indonesia yang terdiri dari beberapa empat poin. Pada salah satu poin resolusi tersebut ditekankan bahwa apabila keputusan PBB nanti tidak menguntungkan Indonesia maka akan diambil tindakan-tindakan nyata dalam mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia dan tindakan-tindakan nyata tersebut diantaranya yaitu:

- 1) Segera merealisasikan pembatalan penuh Konferensi Meja Bundar dengan cara:
 - a. Tidak memperbaharui izin-izin konsensi yang telah habis.
 - b. Menasionalisasi perusahaan vital yang dimiliki Belanda.
 - c. Mengirim kembali para warga Negara Belanda yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak bermanfaat bagi pembangunan Indonesia.
- 2) Menghentikan pemasukan warga Negara Belanda ke Indonesia.
- 3) Mempercepat proses Indonesianisasi pada perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia.
- 4) Mewajibkan perusahaan-perusahaan Belanda menjadi badan hukum yang berkedudukan di Indonesia dan patuh terhadap hukum Indonesia.
- 5) Mencabut izin warga Negara Belanda yang melakukan pekerjaan bebas (*Vrij beroep*) seperti advokat, notaries, dan sebagainya.

⁴⁰ “Aksi Irian Barat”. (1957, 9 November). *Madjalah Merdeka: Berita Mingguan Untuk Indonesia*, No. 45, 12.

- 6) Mencabut izin bekerja dan berusaha bagi warga Negara Belanda terhadap pekerjaan-pekerjaan dan perusahaan yang dapat dikerjakan oleh bangsa Indonesia.⁴¹

Hasil resolusi ini kemudian diserahkan walikota Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Subandrio dan pada 5 Desember 1957 resolusi ini disetujui oleh pemerintah. Disisi lain kekhawatiran terhadap gagalnya resolusi Indonesia di PBB tetap membayangi pemerintah Indonesia. Sehingga dalam mengantisipasi hal itu maka perlu dilakukan jalan lain jika resolusi Indonesia di PBB kembali mengalami kegagalan. Gagasan ini disampaikan oleh Presiden Sukarno pada saat akhir kunjungannya ke Nusa Tenggara. Ia menyatakan bahwa Jika usul mosi di Sidang Umum PBB di tolak, perlu diambil jalan tindakan lain, suatu jalan yang akan mengejutkan dunia.⁴² Hal yang sama juga disampaikan oleh menteri luar negeri Subandrio pada Sidang Umum PBB ke XII bahwa Indonesia akan mengambil jalan lain jika tidak bisa dicapai persetujuan terakhir dengan damai.⁴³

Pemerintah Indonesia sendiri mengenai permasalahan Irian Barat pada dasarnya cukup menaruh harapan besar terhadap PBB dalam menyelesaikan permasalahan ini. Namun keadaan ini kemudian berubah ketika resolusi Indonesia di PBB mengalami penolakan kembali pada Sidang Umum ke XII. Ditolaknyanya kembali resolusi Indonesia di PBB tersebut telah mengakibatkan kekecewaan yang mendalam bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia terhadap PBB. Sehingga pada akhirnya pemerintah Indonesia memutuskan menggunakan jalan lain di luar PBB dalam menyelesaikan permasalahan ini. Disisi lain gagalnya kembali resolusi Indonesia di PBB maka hal ini semakin menguatkan rasa kebencian masyarakat Indonesia terhadap pemerintah Belanda. Dalam perkembangannya hal ini kemudian berubah menjadi tidak terkendali dan mendorong dilakukannya aksi-aksi konfrontasi langsung terhadap kepentingan-kepentingan Belanda di Indonesia. Tindakan-tindakan tersebut dimulai oleh

⁴¹ "Resolusi mengenai claim Nasional". (1957, 23 November). *Madjalah Merdeka: Berita Mingguan untuk Indonesia*, No. 47, 17.

⁴² John D. Legge. (1972). *Sukarno Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Sinar Agape Press, 334.

⁴³ Mengenai "Jalan Lain" yang diucapkan Menteri Luar Negeri Subandrio pada Sidang Umum PBB, ia menyatakan bahwa "Jalan Lain" yang dimaksudkannya itu bukanlah dimaksud menggunakan pendekatan jalan perang tetapi jalan lain di luar PBB yang dapat mewujudkan keinginan pemerintah Indonesia. Lihat: "Ketegasan Seiring Dengan Suasana Irian Barat Di Dalam Negeri". (1957, 2 Desember). *Madjalah Merdeka: Berita Mingguan Untuk Indonesia*, No.48, 13.

pemerintah pada 1 Desember 1957 dengan dikeluarkannya larangan terhadap terbitan-terbitan yang menggunakan bahasa Belanda dan larangan maskapai penerbangan Belanda KLM untuk mendarat di Indonesia. Hal ini kemudian diikuti dengan pelarangan warga Negara Belanda memasuki Indonesia. Pada 2 Desember 1957 Menteri Penerangan Sudibyo selaku ketua Aksi Pembebasan Irian Barat memerintahkan kepada semua buruh perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia untuk melakukan mogok total selama 24 jam.

Tindakan-tindakan ini kemudian semakin meluas dengan dilakukannya pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh buruhnya sendiri. Perusahaan-perusahaan yang telah diambil alih tersebut diantaranya yaitu seperti KPM, NHM, NHB, *Geo Wehry*, *Escompto*, *Hotel Des Indes Factory*, dan sebagainya. Pada 5 Desember 1957 pemerintah menutup konsulat-konsulat Belanda dan melalui Menteri Kehakiman G. A. Maengkom memerintahkan untuk merepatriasi masyarakat Belanda yang tidak dibutuhkan di Indonesia. Kebijakan ini akhirnya memaksa masyarakat Belanda untuk meninggalkan Indonesia dan bersamaan dengan hal itu maka kemudian dimulailah gelombang-gelombang keberangkatan masyarakat Belanda.

III. 4 Repatriasi Masyarakat Belanda.

Memburuknya hubungan Indonesia dan Belanda setelah berakhirnya masa pemerintahan Belanda di Indonesia maka keadaan ini kemudian berdampak terhadap keberadaan masyarakat Belanda di Indonesia. Keberadaan masyarakat Belanda tersebut dalam perkembangannya menjadi sulit untuk dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat ketika semakin memanasnya konflik permasalahan Irian Barat diantara pemerintah Indonesia dan Belanda. Keadaan ini kemudian semakin jelas terlihat ketika gagalnya kembali resolusi Indonesia di PBB pada Sidang Umum ke XII. Melihat keadaan yang semakin memburuk tersebut maka pemerintah Belanda telah mempersiapkan rencana mengungsikan masyarakat Belanda dari Indonesia jikalau memang keberadaan masyarakat Belanda sudah tidak dikehendaki lagi di Indonesia.

Dalam mempersiapkan keperluan tersebut maka pemerintah Belanda telah menghubungi perusahaan pelayaran Belanda dan asing untuk membantu

mengungsikan masyarakat Belanda tersebut ke sekitar wilayah Indonesia yaitu seperti Irian Barat (*Hollandia*), Singapura, dan kota-kota di pantai Australia Barat Utara dan Barat.⁴⁴ Dalam perkembangannya tuntutan-tuntutan masyarakat Indonesia pada akhirnya menjadi nyata ketika pemerintah kemudian memutuskan untuk merepatriasi para masyarakat Belanda tersebut dari Indonesia. Berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan Menteri Kehakiman G. A. Maengkom maka repatriasi ini akan dibagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Golongan *Steuntrekkers* (orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang-orang yang menggantungkan diri dari tunjangan pemerintah Belanda dan orang-orang yang pekerjaannya dapat dengan mudah digantikan oleh para pekerja Indonesia).
2. Golongan *Middenstanders* (orang-orang yang berasal dari kalangan menengah).
3. Golongan *Vakspecialisten* (orang-orang yang berasal dari kalangan tenaga ahli).⁴⁵

Dikeluarkannya kebijakan tersebut maka pada akhirnya memaksa masyarakat Belanda untuk pergi meninggalkan Indonesia. Dalam menindaklanjuti hal ini maka pemerintah Belanda kemudian juga meminta bantuan kepada berbagai perusahaan penerbangan asing untuk dapat membantu mengungsikan para masyarakat Belanda di Indonesia. Beberapa perusahaan tersebut diantaranya yaitu seperti *Qantas*, *British Overseas Airways Corporation* (BOAC), dan *Air India*. Di Jakarta gelombang keberangkatan masyarakat Belanda dimulai pada 10 Desember 1957 dengan menggunakan jalur udara di Bandara Kemayoran. Pada gelombang keberangkatan pertama ini dimulai pada 13.30 dengan sekitar 15 orang masyarakat Belanda meninggalkan Indonesia menggunakan maskapai *Garuda Indonesian Air Ways* (GIA). Sedangkan keberangkatan berikutnya dimulai pada 17.00 dengan menggunakan maskapai *British Overseas Airways Corporation* (BOAC). Pada keberangkatan kedua ini terdapat sekitar lebih dari 50 orang masyarakat Belanda meninggalkan Indonesia dan kebanyakan dari mereka

⁴⁴ "Nederland Siap Ungsikan Bangsa-bangsa Dari Indonesia". (1957, 5 Desember). *Indonesia Raya*, No. 316, 1.

⁴⁵ "Menteri Maengkom Perintahkan 50.000 Orang Belanda Mulai Kemarin Harus Pulang". (1957, 6 Desember). *Indonesia Raya*, No. 317, 1.

adalah terdiri dari para wanita dan anak-anak berusia di bawah 10 tahun.⁴⁶ Lihat lampiran IV.

Dalam mempercepat repatriasian masyarakat Belanda di Indonesia maka Perdana Menteri Belanda Willem Drees kemudian meminta kepada Perdana Menteri Juanda untuk membantu proses repatriasian masyarakat Belanda tersebut. Permintaan bantuan tersebut diantaranya yaitu seperti:

1. Dijaminnya kapal-kapal Belanda dan kapal-kapal lainnya untuk dapat berlayar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Diberikannya ijin terhadap pesawat-pesawat yang telah di *charter* oleh pemerintah Belanda untuk mendarat dan mengangkut masyarakat Belanda yang telah terdaftar.
3. Diberikannya berbagai fasilitas untuk menunjang keberangkatan masyarakat Belanda tersebut.

Dalam menindaklanjuti permintaan dari Willem Drees tersebut maka Perdana Menteri Juanda kemudian memberikan jawaban yaitu:

1. Pemerintah Indonesia tidak berkeberatan terhadap keinginan warga Negara Belanda untuk meninggalkan Indonesia secepat mungkin.
2. Pemerintah Indonesia akan memberikan berbagai keperluan sesuai dengan kemampuan dalam memudahkannya keberangkatan masyarakat Belanda tersebut.⁴⁷

Berdasarkan keputusan tersebut maka upaya dalam memudahkan repatriasian masyarakat Belanda kemudian dilakukan oleh pemerintah dengan beberapa kebijakan yaitu seperti meminta kepada masyarakat Belanda untuk mendaftarkan diri pada kantor-kantor penjualan karcis di pelabuhan pemberangkatan yang terdekat dan tidak mengizinkan masyarakat Belanda meninggalkan rumah sebelum menerima pemberitahuan dari pemerintah untuk memastikan bahwa mereka telah terdaftar oleh pemerintah ataupun pada perusahaan pelayaran yang akan digunakan dalam proses repatriasian ini.

Selain itu dalam membantu proses repatriasian masyarakat Belanda

⁴⁶ Wasp. (1957, 16 Desember). "Evacuation of Dutchmen Started". *The Commercial Weekly*, No. 2, 10.

⁴⁷ "Djuanda Penuhi Seruan Drees Untuk Memberikan Segala Bantuan Memulangkan Orang2 Belanda". (1957, 12 Desember). *Indonesia Raya*, No. 323, 1.

tersebut maka pemerintah Indonesia juga telah membuat rencana pemberangkatan masyarakat Belanda di Indonesia dalam rentang waktu 30 Desember 1957-31 Januari 1958. Hal ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat Belanda dalam menentukan waktu keberangkatannya. Dalam perkembangan perwakilan Diplomatik Belanda di Indonesia juga mengumumkan rencana pemberangkatan yang akan dilakukan dalam rentang waktu 28 Januari 1958-28 Februari 1958. Pada pengangkutan ini direncanakan akhir Januari 1958 telah terangkut sebanyak 19.000 orang. Sedangkan pada akhir Februari 1958 direncanakan telah terangkut sebanyak 25.000 orang yang terdiri dari beberapa tahap dan untuk lebih jelasnya lihat table berikut ini:

Tabel III.4
Daftar Rencana Keberangkatan Masyarakat Belanda Di Indonesia
Pada Rentang Waktu 30 Desember 1957-28 Februari 1958.

Tanggal	Kapal Pengangkut	Rute
30 Desember 1957	<i>Willem Ruys</i>	Tanjung Priok-Rotterdam
31 Desember 1957	<i>Waterdam</i>	Surabaya-Singapura
31 Desember 1957	<i>Orentas</i>	Singapura-Eropa
9 Januari 1958	<i>Waterman</i>	Surabaya-Tanjung Priok-Rotterdam
11 Januari 1958	<i>Oceania</i>	Tanjung Priok-Eropa
12 Januari 1958	<i>Himalaya</i>	Tanjung Priok-Belanda
15 Januari 1958	<i>Tosoano</i>	Tanjung Priok-Vinice
20 Januari 1958	<i>Grote Beer</i>	Surabaya-Tanjung Priok-Belanda
28 Januari 1958	<i>Zuiderkruis</i>	Tanjung Priok-Belanda
29 Januari 1958	<i>Oranje</i>	Tanjung Priok-Belanda
31 Januari 1958	<i>Oranje</i>	Tanjung Priok-Amsterdam
31 Januari 1958	<i>Grote Beer</i>	Surabaya-Singapura
4 Februari 1958	<i>Australia</i>	Tanjung Priok-Italia
6 Februari 1958	<i>Grote Beer</i>	Tanjung Priok-Singapura

8 Februari 1958	<i>Sidney</i>	Tanjung Priok-Italia
9 Februari 1958	<i>Orion</i>	Tanjung Priok-Belanda
15 Februari 1958	<i>Stradhaird</i>	Tanjung Priok-Belanda
27 Februari 1958	<i>Willem Ruys</i>	Tanjung Priok-Belanda
28 Februari 1958	<i>Jahn van Olden Barneveld</i>	Surabaya-Tanjung Priok-Belanda

Sumber: "Pemberangkatan Orang2 Belanda". (1957, 30 Desember). *Indonesia Raya*, No. 2,

2. Dan "Rentjana Pelajaran Kapal2 Mengangkut Pengungsi2 Bld. Achir Djanuari 19.000 Orang Sudah Pergi, Diduga Achir Pebruari sudah 25.000 Orang". (1958, 27 Januari). *Indonesia Raya*, No. 29, 2.

Pada proses repatriasian masyarakat Belanda tersebut besarnya biaya pengangkutan tidak sepenuhnya ditanggung oleh mereka masing-masing. Hal ini dikarenakan telah diberikannya subsidi oleh pemerintah Belanda terhadap masyarakat Belanda di Indonesia dengan jumlah yang bervariasi sesuai dengan tingkatan status sosial mereka di masyarakat.⁴⁸ Sehingga besarnya biaya yang harus mereka tanggung pada proses repatriasian ini besarnya berbeda-beda. Disisi lain pada pemberangkatan masyarakat Belanda tersebut ternyata masih terdapat diskriminasi terhadap para masyarakat yang berasal dari ras campuran atau Indo Belanda. Bagi masyarakat Indo Belanda setelah diberangkatkan dari Indonesia mereka tidak langsung dibawa ke Belanda. Namun mereka ditampung terlebih dahulu di *Royal Malayan Navy Camp*, Woodlands Singapura. Di dalam penampung tersebut mereka mendapatkan kehidupan kurang baik⁴⁹ jika dibandingkan pada saat berada di Indonesia. Sehingga kehidupan mereka menjadi semakin sulit. Sedangkan bagi masyarakat Belanda totok mereka tidak ditempatkan di dalam kamp terlebih dahulu melainkan langsung dibawa ke Belanda.

Menurut J. E. Ellemers (1985) berdasarkan rentang waktunya gelombang

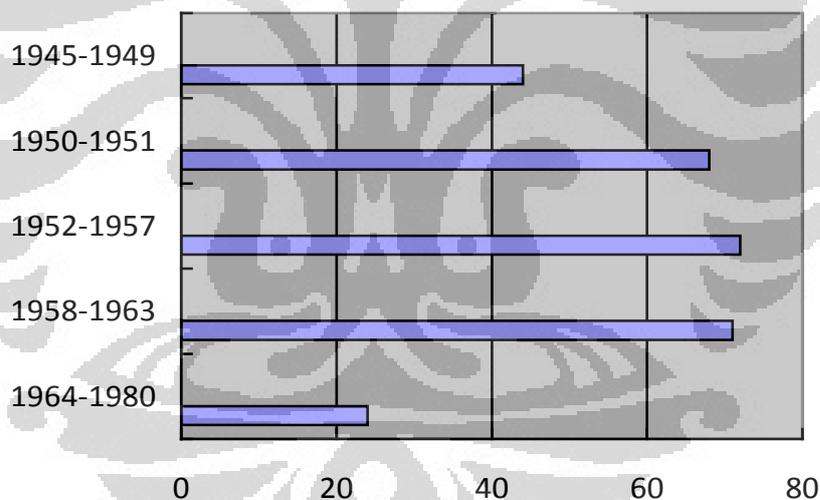
⁴⁸ Firman Lubis. (2011, 10 Juni). Wawancara pribadi.

⁴⁹ Kurang baiknya kehidupan yang mereka hadapi di dalam kamp dapat dilihat berbagai peraturan yang mereka harus lakukan diantaranya yaitu: mereka harus mengantri dan berjalan menanjak sejauh setengah kilometer untuk menuju ruangan makan, mereka harus mencuci kembali peralatan makan yang telah digunakan dari porsi makanan dan sebagainya. Lihat: "Belanda Totok Nasibnja Lebih Enak, Jang Indo Hidupnja Seperti Tawanan Perang". (1958, 14 Januari). *Suluh Indonesia*, No. 302, 1.

repatriasi atau pemulangan masyarakat Belanda ini terbagi dalam lima gelombang yaitu: gelombang pertama yang berlangsung pada rentang waktu antara 1945-1949 dengan jumlah sebanyak 44.000 orang, gelombang kedua yang berlangsung pada rentang waktu antara 1950-1951 dengan jumlah sebanyak 68.000 orang, gelombang ketiga yang berlangsung pada rentang waktu antara 1952-1957 dengan jumlah sebanyak 72.000 orang, gelombang keempat yang berlangsung pada rentang waktu antara 1958-1963 dengan jumlah sebanyak 71.000 orang, dan gelombang kelima yang berlangsung pada rentang waktu antara 1964-1980 dengan jumlah sebanyak 24.000 orang. Untuk lebih jelasnya lihat grafik di bawah ini.

Grafik III.4

Grafik Jumlah Keberangkatan Masyarakat Belanda Di Indonesia Dalam Rentang Waktu Antara 1945-1980.



Sumber: J.E. Ellemers dan R. E .F. Vaillant. (1985). *Indische Nederlanders en Gerepatrieerden*. Muiderberg: Dick Coutinho, 38-42.

Keterangan:

* Angka Dalam jumlah Puluhan Ribu.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa puncak keberangkatan masyarakat Belanda ini terjadi pada rentang waktu antara 1952-1957 dan kemudian semakin menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pada gelombang pertama (1945-1949) sebagian besar masyarakat Belanda yang meninggalkan Indonesia adalah berasal

dari para korban perang dunia II. Keberangkatan mereka ini pada umumnya ditujukan untuk memulihkan keadaan atau trauma setelah berbagai pengalaman buruk yang mereka dapatkan pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang sebagian besar masyarakat Belanda dimasukan ke dalam kamp-kamp penahanan dan selain itu mereka juga mendapatkan perlakuan kekerasan baik kekerasan secara fisik ataupun seksual. Disisi lain memburuknya kondisi keaamanan⁵⁰ setelah masa kemerdekaan Indonesia maka hal ini juga ikut mendorong masyarakat Belanda untuk pergi meninggalkan Indonesia.

Pada gelombang kedua (1950-1951) sebagian besar masyarakat Belanda yang meninggalkan Indonesia adalah berasal dari para bekas pegawai pemerintah Belanda baik dibidang pemerintahan ataupun militer. Kepergian masyarakat Belanda tersebut tentunya tidak terlepas dari berakhirnya masa kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia. Begitu halnya dengan tentara Belanda terutama tentara KNIL. Setelah berakhirnya masa kekuasaan pemerintah Belanda di Indonesia maka organisasi ketentaraan KNIL kemudian dibubarkan. Pada organisasi ketentaraan tersebut terdapat sekitar 62.000 tentara pribumi yang berasal dari beberapa daerah seperti Maluku, Minahasa, Timor, dan sebagainya. Menyikapi hal ini pemerintah Indonesia sendiri pada dasarnya telah merencanakan untuk melebur para bekas-bekas tentara KNIL tersebut ke dalam Tentara Nasional Indonesia. Namun hal ini ditolak oleh sekitar 4.000 para bekas tentara KNIL yang berasal dari suku Ambon dan dalam perkembangannya masyarakat Ambon tersebut dibawa ke Belanda oleh pemerintah Belanda. Keberangkatan masyarakat Ambon ke Belanda tersebut pada umumnya tidak diketahui sepenuhnya oleh keluarga tentara tersebut. Sehingga banyak diantara mereka pada akhirnya pun merasa tertipu.⁵¹

Pada gelombang ketiga (1952-1957) sebagian besar masyarakat Belanda

⁵⁰ Memburuknya kondisi keamanan setelah masa kemerdekaan Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai tindakan anarkis terhadap masyarakat Belanda dan tindakan-tindakan anarkis ini pun pada akhirnya mendorong munculnya revolusi sosial di masyarakat. Keadaan ini pun tentunya cukup sulit bagi para masyarakat Belanda sehingga kemudian mereka pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Indonesia.

⁵¹ Hal seperti terjadi terhadap orang tua Ibu Marietje Solarbesain. Pada awalnya pemerintah Belanda hanya memberitahukan bahwa akan memulangkan para bekas tentara KNIL tersebut ke daerah asalnya masing-masing. Namun ketika di tengah perjalanan kapal yang mereka tumpangi tersebut pun justru membawa mereka ke Belanda. Marietje Solarbesain. (2011, 14 Juni). Wawancara pribadi.

yang meninggalkan Indonesia adalah berasal dari kalangan masyarakat Indo Belanda dan pada umumnya mereka berasal dari kalangan masyarakat ekonomi lemah yang sebelumnya belum pernah pergi ke Belanda. Sulitnya keadaan yang dihadapi oleh masyarakat Indo Belanda di Indonesia setelah berakhirnya masa kekuasaan pemerintah Belanda maka akhirnya memaksa mereka untuk pergi meninggalkan Indonesia. Kesulitan-kesulitan masyarakat Belanda tersebut tentunya tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Indonesia dalam melindungi berbagai kepentingan nasionalnya diberbagai bidang seperti ekonomi dan sebagainya. Kebijakan ini pada akhirnya semakin menyulitkan masyarakat Indo Belanda dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dan hal ini kemudian semakin diperburuk dengan status kewarganegaraan asing yang mereka miliki. Dalam perkembangannya keberadaan masyarakat Indo Belanda ini menjadi semakin sulit. Sehingga kemudian banyak diantara mereka pada akhirnya kehilangan pekerjaannya. Keadaan ini tentunya cukup sulit bagi para masyarakat Indo Belanda dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan Indonesia. Disisi lain memburuknya konflik Irian Barat diantara pemerintah Indonesia dan Belanda maka hal ini juga ikut mendorong mereka untuk pergi meninggalkan Indonesia.

Pada gelombang keempat (1958-1963) sebagian besar masyarakat Belanda yang meninggalkan Indonesia adalah berasal dari para *Spijtoptanten* (mereka yang pergi dengan terpaksa dan menyesali keputusannya). Keberadaan masyarakat Belanda di Indonesia pada dasarnya telah berlangsung dari waktu yang lama. Sehingga mereka pada umumnya telah terbiasa dan merasa nyaman tinggal di Indonesia. Namun memuncaknya konflik Irian Barat pada akhir 1957 telah memaksa mereka untuk pergi meninggalkan Indonesia. Begitu halnya dengan masyarakat Belanda yang berada di Irian Barat. Memasuki 1960 konflik Indonesia dan Belanda menjadi semakin memburuk dan memicu pecahnya perang terbuka diantara kedua belah pihak. Hal ini kemudian semakin nyata ketika pemerintah Belanda mengirimkan kapal perang Karel Doorman ke wilayah perairan Irian Barat.

Melihat hal ini maka muncullah kecemasan para masyarakat Belanda yang berada di Irian Barat. Sehingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk pergi

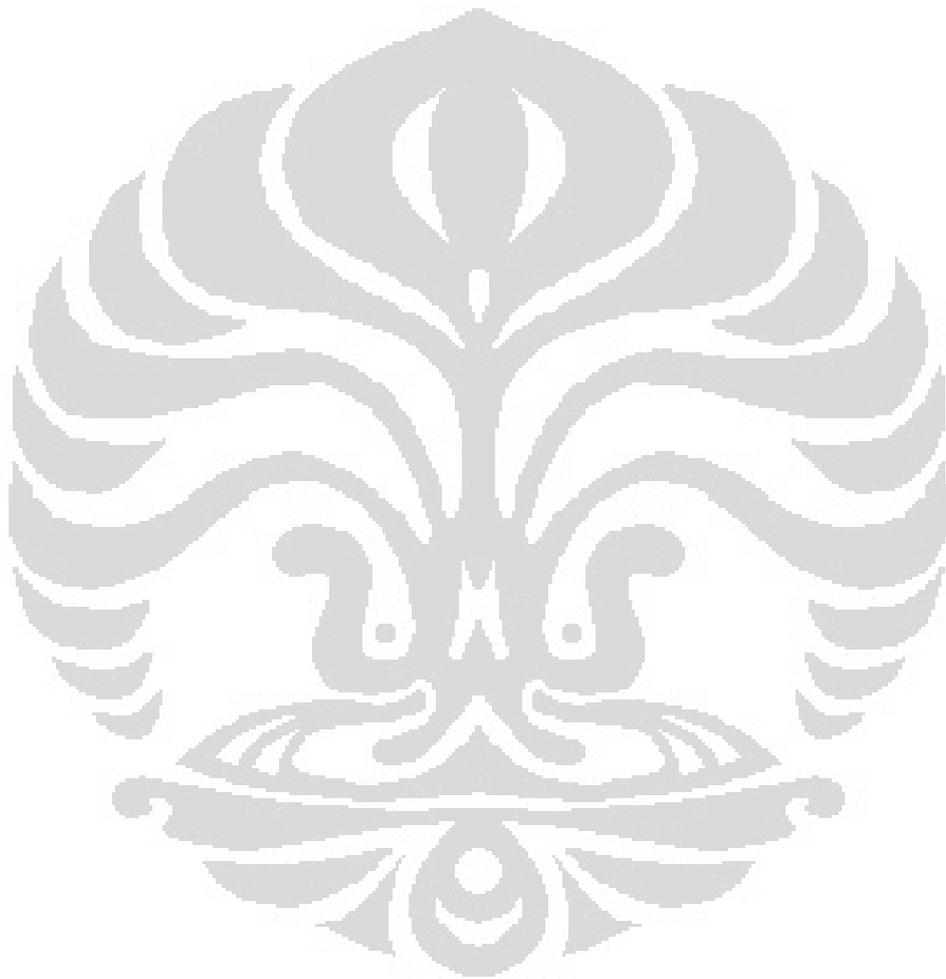
menuju Belanda. Keberangkatan para masyarakat Belanda ini pada dasarnya merupakan sebuah dilematis tersendiri bagi mereka. Disatu sisi mereka sangat mencintai tanah kelahirannya. Namun disisi lain keadaan perkembangan politik yang semakin memburuk telah memaksa mereka untuk pergi meninggalkan Indonesia dengan ketidakpastian. Gelombang keberangkatan para *Spijtoptanten* ini pada dasarnya tidak hanya berasal dari para masyarakat Belanda saja. Namun disisi lain hal ini juga berasal dari masyarakat Belanda yang telah memiliki kewarganegaraan Indonesia dengan merahasiakan keinginannya tersebut.

Pada gelombang kelima (1964-1980) sebagian besar masyarakat Belanda yang meninggalkan Indonesia adalah berasal dari para tenaga-tenaga ahli yang bekerja diberbagai bidang. Penempatan tenaga-tenaga ahli ini pada akhir gelombang repatriasi masyarakat Belanda adalah ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga agar tetap berjalannya kegiatan perekonomian di Indonesia. Dalam menjaga agar tetap berjalannya kegiatan perekonomian di Indonesia maka tenaga-tenaga ahli asing tersebut diharuskan untuk mentransfer pengetahuan mereka kepada para pegawai-pegawai Indonesia yang akan menggantikan kedudukan posisi tenaga-tenaga ahli tersebut. Disisi lain pada gelombang keberangkatan ini masih terdapat juga *Spijtoptanten* yang meninggalkan Indonesia. Kepergian *spijtoptanten* tersebut pada dasarnya tidak hanya disebabkan oleh konflik Irian Barat saja. Namun pertentangan politik yang terjadi pada masa itu juga pada akhirnya memaksa mereka untuk meninggalkan Indonesia.

Hal ini seperti yang terjadi kepada Ernst Utrecht dan Elien Utrecht. Ernst dan Elien adalah seorang Indo Belanda dan mereka memutuskan untuk menjadi warga Negara Indonesia. Namun kegiatan politik dan sikap kritis Ernst telah membawanya ke dalam permasalahan besar baik terhadap rezim Sukarno ataupun Suharto. Akibat dari hal itu maka kehidupan mereka menjadi sulit dan beberapa kali ia ditangkap dan dipenjarakan oleh penguasa militer. Melihat sulitnya kehidupan yang ia jalani maka pada akhirnya ia memutuskan meninggalkan Indonesia dengan merahasiakan keinginannya tersebut. Begitu halnya dengan Elien.⁵² Keberangkatan mereka ini pada akhirnya telah mengubur harapan mereka

⁵² Untuk lebih jelas lihat: Elien Utrecht. (2006). *Melintasi Dua Jaman, Kenangan Tentang*

untuk tinggal di Indonesia dan kini mereka memulai kembali kehidupan barunya di Belanda sebagai warga Negara Belanda.



Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan. Depok: Komunitas Bambu.

BAB IV
MEMUDARNYA PENGARUH MASYARAKAT BELANDA DI
JAKARTA

IV.1 Masuknya tenaga-tenaga Indonesia menggantikan Jabatan-Jabatan Yang Ditinggalkan Masyarakat Belanda.

Setelah dipulangkannya sebagian besar masyarakat Belanda di Indonesia maka dalam perkembangannya hal ini mengakibatkan munculnya permasalahan baru terhadap masyarakat Jakarta yaitu terjadinya kekosongan terhadap jabatan-jabatan yang telah ditinggalkan oleh masyarakat Belanda. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh G. A. Maengkom repatriasi masyarakat Belanda secara umum terbagi menjadi tiga tahap. Lihat halaman 46. Pada keberangkatan golongan pertama sebagian besar dari masyarakat Belanda yang meninggalkan Indonesia pada umumnya adalah berasal dari kalangan masyarakat Indo Belanda yang tidak memiliki keterampilan khusus. Sehingga keberangkatan mereka tidak banyak memberikan pengaruh besar terhadap kegiatan masyarakat Jakarta.

Sedangkan pada keberangkatan golongan kedua banyak diantara mereka adalah berasal dari kalangan yang cukup penting yaitu diantaranya seperti pengajar, pemimpin perusahaan, dan sebagainya. Pada keberangkatan masyarakat Belanda golongan kedua ini tentunya telah mengakibatkan kesulitan tersendiri bagi masyarakat Jakarta yaitu berupa terjadinya kekosongan terhadap jabatan-jabatan yang telah ditinggalkan oleh para masyarakat Belanda. Begitu halnya dengan pada keberangkatan golongan ketiga yang pada umumnya adalah berasal dari kalangan tenaga ahli yang sulit untuk digantikan. Sehingga hal ini pada akhirnya semakin memperburuk keadaan di Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya berbagai kegiatan yang telah ditinggalkan oleh masyarakat Belanda di Jakarta seperti perusahaan, universitas, sekolah, dan sebagainya. Buruknya keadaan tersebut maka pemerintah dituntut untuk dapat segera menyelesaikan permasalahan kekosongan jabatan-jabatan yang telah ditinggalkan oleh masyarakat Belanda.

Di bidang perekonomian kekosongan jabatan-jabatan di perusahaan Belanda yang telah ditinggalkan oleh masyarakat Belanda. Maka hal ini dalam

perkembangannya telah mendorong ikut sertanya peranan militer dalam mengelola perusahaan-perusahaan tersebut. Keikutsertaan peranan militer dalam kegiatan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia hal ini bermula ketika dikeluarkannya peraturan keadaan darurat perang (SOB) pada awal 1957. Dikeluarkannya peraturan ini maka secara langsung kekuasaan pimpinan pemerintahan berada di bawah kekuasaan penguasa militer. Sehingga pihak militer memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan mengamankan jalannya pemerintahan. Ketika memucaknya permasalahan Irian Barat yang diikuti dengan aksi pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh buruhnya dan beberapa organisasi buruh lainnya. Maka pemerintah kemudian memberikan kewenangan kepada pihak militer untuk memimpin dan mengamankan aksi pengambilalihan tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari jatuhnya perusahaan-perusahaan tersebut ketangan pihak-pihak yang tidak berwenang yaitu kelompok komunis.

Pada 13 Desember 1957 pihak militer kemudian mengumumkan penguasaan terhadap perusahaan-perusahaan Belanda yang telah diambilalih tersebut. Hal ini kemudian juga diperkuat dengan dikeluarkannya peraturan penguasa militer pada 16 Desember 1957 mengenai larangan pemindahan hak dan pembebanan hak milik perusahaan dan perseorangan warga Negara Belanda tanpa ijin.⁵³ Dalam perkembangannya kekosongan yang terjadi terhadap perusahaan-perusahaan Belanda tersebut maka hal ini kemudian mendorong keikutsertaannya peranan militer dalam mengisi kekosongan dan pengelolaan perusahaan-perusahaan Belanda tersebut. Pengelolaan yang dilakukan oleh pihak militer ini tentunya tidak menyelesaikan permasalahan kekosongan jabatan-jabatan yang telah ditinggalkan masyarakat Belanda secara keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya kemunduran terhadap perusahaan-perusahaan yang telah dikelola oleh pihak militer. Kemunduran terhadap perusahaan-perusahaan Belanda tersebut pada umumnya disebabkan oleh tidak tersedianya para tenaga ahli dalam mengelola perusahaan-perusahaan Belanda tersebut. Dalam memenuhi kebutuhan terhadap tenaga ahli maka pihak militer mensiasati hal ini dengan menempatkan para perwiranya sebagai tenaga ahli. Namun penempatan perwira-perwira tersebut

⁵³ Peraturan Penguasa Militer No. Prt/ PM/ 016/ 1957 tentang larangan pemindahan hak dan pembebanan hak milik perusahaan dan perseorangan warga Negara Belanda tanpa idzin.

sebagai tenaga ahli ini pada umumnya adalah bukan berasal dari perwira terbaik.⁵⁴ Sehingga kegiatan produksi dan ekspor menurun bahkan juga mengakibatkan kebangkrutan dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Dibidang transportasi kekosongan jabatan yang telah ditinggalakan oleh masyarakat Belanda maka hal ini cukup menyulitkan pemerintah dalam mengusahakan keberlangsungannya kegiatan pelayanan transportasi. Sehingga banyak diantara perusahaan-perusahaan transportasi yang telah tersedia pada akhirnya mengalami penurunan intensitas pengoperasian dan bahkan terjadi kelumpuhan. Hal ini seperti yang terjadi terhadap perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Pada perusahaan pelayaran PELNI sebelumnya terdapat sekitar 50 orang tenaga ahli warga Negara Belanda yang bekerja di perusahaan tersebut dan kebanyakan dari mereka adalah bekerja sebagai nahkoda, mualim, ahli mesin, dan sebagainya. Namun memuncaknya permasalahan Irian Barat hingga dipulangkannya sebagian besar masyarakat Belanda di Indonesia. Maka hal ini berdampak juga terhadap perusahaan pelayaran PELNI yang pada akhirnya ikut kehilangan para tenaga ahlinya.

Setelah dipulangkannya sebagian besar masyarakat Belanda di Indonesia maka dalam perkembangannya banyak diantara tenaga ahli yang telah bekerja di perusahaan tersebut ikut pergi meninggalkan Indonesia. Pada umumnya kepergian tenaga ahli tersebut sebagian besar adalah merupakan bermotif politis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya permohonan pengunduran diri ataupun mempersingkat masa kontrak para tenaga ahli Belanda tersebut di perusahaan pelayaran PELNI. Kuatnya motif politis dalam hal ini dapat dilihat dari peristiwa kapal *Padjonge*. Kapal *Padjonge* adalah merupakan salah satu armada pelayaran perusahaan PELNI yang dinahkodai oleh seorang kapten Belanda bernama W. Rodenburg.

Buruknya perlakuan yang dialami oleh masyarakat Belanda di Indonesia maka hal ini telah mendorong kapten W. Rodenburg untuk meninggalkan kapal *Padjonge* ketika berlabuh di Singapura. Menurut keterangannya dikatakan bahwa “saya tidak sudi lagi bekerja pada suatu perusahaan di Indonesia kerana masyarakat Belanda di Indonesia dipaksa untuk meninggalkan Indonesia”.

⁵⁴ Bondan Kanumoyoso. (2001). *Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 87.

(“Tenaga2 Bld Pada Pelni Diganti Tenaga2 Indonesia”, 1957). Disisi lain dalam mengisi kekosongan jabatan-jabatan di PELNI maka kemudian banyak diantara tenaga-tenaga ahli Indonesia mulai masuk menggantikan kedudukan para tenaga-tenaga Belanda tersebut. Namun pengantian ini tidak sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan terhadap tenaga ahli. Sehingga hal ini masih mengakibatkan kekosongan terhadap tenaga ahli di perusahaan PELNI. Dalam mengupayakan kebutuhan terhadap tenaga ahli dan armada pelayaran yang akan menggantikan perusahaan pelayaran *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM). Maka PELNI kemudian mulai melakukan pendekatan terhadap beberapa Negara yaitu diantaranya seperti Jepang, Polandia, Finlandia, Jerman, Italia, dan Yugoslavia.

Sedangkan pada perusahaan penerbangan *Garuda Indonesia Airways* (GIA) setelah dibatalkannya kontrak kerjasama diantara Indonesia dan *Koninklijke Luchvaart Maatschappij* (KLM) oleh menteri perhubungan Sukardani pada 2 Januari 1958. Maka dalam perkembangannya tenaga ahli Belanda yang telah ditempatkan pada perusahaan GIA dalam membantu kegiatan operasional perusahaan tersebut kemudian dipulangkan kembali ke negara asalnya. Pembatalan kontrak kerjasama ini maka dalam perkembangannya hal ini mengakibatkan kesulitan tersendiri bagi perusahaan GIA. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya intensitas pengoperasian perusahaan penerbangan tersebut sekitar 40%-50%.⁵⁵ Bahkan selain mengalami penurunan intensitas pengoperasian. Hal ini juga mengakibatkan dibatasinya jumlah penumpang dan angkutan barang. Sehingga hal ini tentunya mengakibatkan kerugian tersendiri bagi para pengguna jasa layanan maskapai tersebut. Kebutuhan terhadap tenaga ahli yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan penerbangan GIA pada umumnya yaitu seperti penerbang (*Pilot*), ahli mesin penerbangan (*Aircraft Engineer*), ahli perawatan alat-alat penerbangan (*Aircraft Maintenance*), dan ahli radio penerbangan (*Flight Radio Engineer*).⁵⁶

Dalam mengatasi hal ini maka perusahaan GIA telah mengupayakan kebutuhan terhadap tenaga ahli dengan mengintensifkan pelatihan calon

⁵⁵ “Menteri Perhubungan: Frekwensi GIA akan berkurang 40%-50%. Sedang Ditjari tenaga2 Dari Negara2 Tetangga Untuk Ganti Tenaga2 KLM”. (1958, 9 Januari). *Indonesia Raya*, No. 2, 1.

⁵⁶ Asnawi Idris. (1958, 22 Februari). “Pusat Pendidikan Penerbangan, Hamble di Inggris Tjurup di Indonesia”. *Madjalah Merdeka*, No. 8, 13.

penerbang di Akademi Penerbangan Indonesia (API) Curup, Tangerang. Selain itu perusahaan GIA juga mulai melakukan pendekatan terhadap beberapa Negara tetangga untuk mendapatkan tenaga ahli yaitu diantaranya seperti Birma, India, Malaya, Thailand, dan Filipina dan sebagainya. Namun upaya ini mengalami kegagalan dikarenakan para negara tersebut juga sedang mengalami kekurangan tenaga ahli. Melihat hal ini maka perusahaan GIA mulai melakukan pendekatan terhadap beberapa maskapai penerbangan lainnya yaitu seperti *Scandinavian Airlines System (SAS)*, *Pan American Airways (PAA)*, dan *British Overseas Airways Corporation (BOAC)*.

Di bidang pendidikan kekosongan terhadap tenaga pengajar cukup jelas dirasakan oleh banyak universitas di Indonesia. Begitu halnya dengan Universitas Indonesia di Jakarta. Setelah dipulangkannya sebagian besar masyarakat Belanda di Indonesia maka dalam perkembangannya hal ini mengakibatkan kesulitan tersendiri terhadap keberlangsungannya kegiatan perkuliahan. Kesulitan-kesulitan ini sangat dirasakan terutama terhadap beberapa cabang ilmu yang masih dikuasai oleh pengajar Belanda dan belum memiliki tenaga pengganti. Dalam mengatasi kekosongan terhadap tenaga pengajar tersebut maka Universitas Indonesia mengupayakan hal ini dengan memberikan kesempatan terhadap jabatan-jabatan yang lebih rendah satu tingkat terhadap para tenaga pengajar Belanda untuk menggantikan posisi mereka. Sebagai contoh yaitu kekosongan tenaga gurubesar digantikan dengan lektor kepala atau lektor. Selain itu dalam mengatasi hal ini maka pihak universitas juga menggunakan sistem asisten mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan terhadap tenaga pengajar.⁵⁷

Disisi lain dalam memenuhi kebutuhan terhadap tenaga pengajar, Universitas Indonesia juga melakukan kerjasama dengan beberapa universitas di Amerika yaitu *University of California* dan *University of Kentucky*. Kerjasama-kerjasama tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut.

⁵⁷ Laporan Tahunan Universitas Indonesia 1957-1958, 7-8.

Tabel IV.1
Daftar Kontrak Kerjasama Universitas Indonesia Dengan Beberapa
Universitas Di Amerika Serikat

Fakultas	Kerjasama	Kontrak I	Kontrak II	Dibiayai oleh
Fak. Kedokteran	University of California	Juli 1954- Juni 1957	Juli 1957- Juni 1959	I. C. A
Fak. Ekonomi	University of California	Juli 1956- Juni 1958	Juli 1958- Juni 1960	Ford Foundation
Fak. Kedokteran Hewan	University of Kentucky	Sept. 1957- Agst. 1959		I. C. A
Fak. Pertanian	University of Kentucky	Sept. 1957- Agst. 1959		I. C. A
Fak. Teknik	University of Kentucky	Juli 1956- Juni 1959		I. C. A
Fak. Ilmu Pasti dan Ilmu Alam	University of Kentucky	Juli 1956- Juni 1959		I. C. A

Sumber: Laporan Tahunan Universitas Indonesia 1957-1958, 75.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kerjasama terhadap beberapa universitas di Amerika ditujukan untuk dapat memenuhi kebutuhan tenaga ahli di beberapa Fakultas Universitas Indonesia yaitu: Fakultas Kedokteran, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Kedokteran Hewan. Dalam pelaksanaannya kerjasama ini dimulai pada 1954 hingga 1960 dengan jangka waktu kontrak selama 2 hingga 3 tahun. Namun pada Fakultas tertentu yaitu seperti Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ekonomi kontrak kerjasama yang telah dimulai pada 1954 dan 1956 ternyata dirasakan belum mencukupi untuk dapat menghasilkan tenaga-tenaga ahli baru Indonesia di bidang tersebut. Sehingga kemudian dilakukanlah kontrak kerjasama kedua yang berakhir pada 1959 dan 1960.

IV. 2 Pengambilan Rumah-Rumah Belanda oleh pihak Indonesia

Permasalahan kebutuhan terhadap perumahan yang dialami oleh masyarakat Jakarta pada dasarnya adalah merupakan permasalahan yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama yaitu tepatnya sejak setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Meningkatnya kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap perumahan hal ini disebabkan oleh banyaknya rumah-rumah masyarakat Jakarta yang telah hancur akibat dari perang dunia II dan masa revolusi. Dalam perkembangannya kebutuhan terhadap perumahan ini menjadi semakin mendesak⁵⁸ bersamaan dengan semakin meningkatnya jumlah pendatang di Kota Jakarta. Melihat keadaan ini maka walikota Suwiryo pada 1952 memutuskan untuk meneruskan kembali rencana pembangunan perumahan di wilayah Kebayoran yang belum sempat terselesaikan oleh pemerintah Belanda. Pembangunan perumahan ini diharapkan dapat segera memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap perumahan. Namun dalam perkembangannya pembangunan perumahan ini berjalan dengan lambat. Sehingga kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap perumahan tidak terpenuhi.

Disisi lain memuncaknya permasalahan Irian Barat yang telah mengakibatkan dipulangkannya sebagian besar masyarakat Belanda di Indonesia maka hal ini telah mengakibatkan kekosongan terhadap rumah-rumah Belanda yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Kekosongan rumah-rumah Belanda ini kemudian mendorong sebagian masyarakat Jakarta untuk menyerobot atau mengambil rumah-rumah Belanda yang telah ditinggalkan oleh para pemiliknya. Pengambilan rumah-rumah Belanda tersebut pada umumnya dilakukan secara sepihak dan dalam memperkuat status penggunaannya maka kemudian mereka menyogok para petugas Dinas Urusan Perumahan Daerah Jakarta untuk mengeluarkan ijin tinggal (*Vestigings Bewijs*). Aksi-aksi pengambilan rumah-

⁵⁸ Mendesaknya kebutuhan masyarakat Jakarta terhadap perumahan hal ini dapat dilihat dari perbandingan diantara jumlah penduduk dan jumlah rumah yang telah dibangun oleh pemerintah. Pada 1951-1953 Jawatan Perumahan Rakyat telah membangun sebanyak 72.120 rumah. Sedangkan jumlah penduduk Indonesia pada 1955 telah mencapai 78 juta jiwa. Menurut Serikat Buruh Pekerja Umum setiap tahunnya Indonesia kekurangan rumah sebanyak 600.000 unit. Berdasarkan hal ini pemerintah telah merencanakan hanya akan membangun rumah sebanyak 13.000 unit dan sisanya dibebankan kepada masyarakat. Namun dari 13.000 rumah yang akan dibangun ini hanya 2.423 rumah yang dapat dibangun pada 1951-1953. Lihat: "Kekurangan Perumahan Rakjat Di Asia Paling Hebat Di Seluruh Dunia, Indonesia Tiap Tahun Kekurangan 600.000 Rumah". (1955, 23 Maret). *Indonesia Raya*, No. 69, 1.

rumah Belanda ini pada dasarnya tidak hanya terjadi pada akhir 1950-an saja. Namun hal ini juga telah terjadi sejak awal 1950-an.

Berakhirnya masa pemerintahan Belanda di Indonesia pada 1949 maka keadaan ini telah mendorong munculnya berbagai pandangan dari berbagai kelompok untuk segera mengambilalih kepentingan-kepentingan masyarakat Belanda di Indonesia. Pandangan-pandangan ini pada umumnya hanya memusatkan perhatian terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi masyarakat Belanda di Indonesia. Namun dalam perkembangannya pandangan-pandangan ini juga mulai memberikan perhatian terhadap rumah-rumah Belanda. Berdasarkan Undang-Undang 1945 pemerintah menjamin penuh hak milik setiap masyarakat di Indonesia dan hal ini dapat dilihat pada pasal 26 yang dinyatakan:

1. Setiap orang berhak memiliki sesuatu baik sendiri ataupun bersama-sama.
2. Tidak seorangpun dapat dirampas hak miliknya dengan semena-mena.
3. Hak milik itu adalah bersifat fungsi sosial.⁵⁹

Berdasarkan peraturan ini maka pemerintah menjamin hak milik setiap masyarakat secara penuh. Namun pada ayat ke 3 dinyatakan bahwa hak milik itu bersifat fungsi sosial yang berarti bahwa hak milik itu memiliki kewajiban sosial atau dengan kata lain bahwa hak kepemilikan seseorang tidak dibenarkan jikalau merugikan kepentingan umum. Pada peraturan ayat ke 3 ini ternyata kurang dipahami oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sehingga kemudian banyak digunakan sebagai dasar untuk menyerobot atau mengambil rumah-rumah Belanda yang telah ditinggalkan pemiliknya.

Banyaknya aksi pengambilan rumah-rumah Belanda secara sepihak oleh sekelompok orang baik yang berasal dari kalangan pemerintahan ataupun militer maka walikota Syamsurizal kemudian bereaksi keras. Pada 1953 walikota Syamsurizal mengadakan rapat beserta dengan pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini yaitu diantaranya seperti Dinas Urusan Perumahan Jakarta dan Dewan Perumahan Jakarta. Pada rapat ini dihasilkan beberapa keputusan yaitu diantaranya:

1. Kepala Dinas Urusan Perumahan Jakarta dilarang mengeluarkan ijin tinggal (*Vestigings Bewijs*) secara sepihak dan harus mendapatkan

⁵⁹ M. Muda. (1951, 21 Maret). "Lagi Tentang UUD kita". *Sikap: Madjalah Mimbar Politik*, No. 11, 3.

persetujuan dari Dewan Perumahan Jakarta.

2. Segera melakukan pendataan ulang (*Herregistrasi*) terhadap rumah-rumah yang berada di bawah pengawasan Dinas Urusan Perumahan Jakarta.
3. Segera membentuk 7 bagian Dinas Urusan Perumahan di Jakarta dan akan ditempatkan di sekitar kantor-kantor kedewanan.
4. Memindahkan kantor Dinas Urusan Perumahan Jakarta ke Balaikota.
5. Membentuk peraturan-peraturan tata tertib pekerjaan Dinas Urusan Perumahan Jakarta dalam memungkinkan kepala Dinas Urusan Perumahan Jakarta dapat bertindak cepat dan tegas terhadap penempatan rumah-rumah secara tidak syah.⁶⁰

Hasil keputusan ini dalam perkembangannya dirasakan belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara mendasar. Maka Pada 1954 pemerintah kemudian mengajukan Rancangan Undang-Undang Perumahan kepada DPR. Pengajuan Rancangan Undang-Undang ini ditujukan untuk membentuk Undang-Undang Perumahan yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar atau landasan hukum dalam mengatur berbagai urusan perumahan di Indonesia. Rancangan Undang-Undang ini ternyata kurang mendapat dukungan dari DPR. Sehingga Rancangan Undang-Undang ini ditolak dengan alasan bahwa Rancangan Undang-Undang ini sulit untuk dapat disesuaikan dalam perkembangan waktu. Permasalahan pengambilan rumah-rumah Belanda ini dalam perkembangannya menjadi semakin rumit dikarenakan terdapatnya pihak militer yang bertindak bertentangan dengan upaya-upaya tegas yang telah dilakukan pemerintah dalam menghentikan berbagai aksi pengambilan rumah-rumah Belanda. Memasuki 1956 aksi pengambilan rumah-rumah Belanda oleh pihak militer tersebut menjadi semakin meningkat dan bahkan melibatkan pihak kepolisian. Meningkatnya aksi pengambilan rumah-rumah ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah terjadi di Jakarta yaitu diantaranya seperti kasus pengambilan rumah di jalan Pegangsaan Timur 92 dan jalan Mampang 66.

Aksi pengambilan rumah-rumah Belanda ini pada umumnya dilakukan dengan berbagai upaya oleh pihak militer dalam mewujudkan keinginannya

⁶⁰ "Walikota segera memerintahkan pentjataan kembali rumah2 UPD, perlu tangan besi terhadap pemilik2 VB gelap". (1953, 16 Mei). *Indonesia Raya*, No. 113, 2.

tersebut. Upaya-upaya tersebut diantaranya yaitu seperti melakukan intimidasi terhadap pemilik rumah yang akan meninggalkan Indonesia dan orang-orang yang dianggap menghalangi rencananya.⁶¹ Dalam perkembangannya aksi pengambilan rumah-rumah Belanda yang dilakukan pihak militer tersebut menjadi semakin besar dan melibatkan berbagai pihak yaitu diantaranya seperti: Dinas Urusan Perumahan Militer (UPM), Corps Polisi Militer (CPM), dan bahkan kepala Dinas Urusan Perumahan Djakarta (UPD) sendiri. Aksi-aksi pengambilan ini dapat dilihat dari beberapa kasus yaitu diantaranya seperti kasus pengambilan rumah di jalan Kapuas 22, jalan Kimia No.5, dan jalan Mendut 17.

Aksi pengambilan rumah di jalan Kapuas 22 yang dilakukan oleh Sutoyo seorang pegawai UPM ini bermula ketika keluarga F. R. de ceuninek v capelle sebagai pemilik dari rumah tersebut telah berangkat ke Belanda pada 27 Oktober 1955. Kekosongan rumah ini kemudian dimanfaatkan oleh Sutoyo untuk mengambil rumah tersebut. Dalam melaksanakan aksinya Sutoyo bekerjasama dengan pegawai UPD untuk mendapatkan ijin tinggal dari UPD. Setelah ijin tinggal tersebut dimiliki maka rumah yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya ini kemudian dijual oleh Sutoyo kepada orang lain. Aksi pengambilan rumah-rumah yang dilakukan oleh UPM tersebut pada dasarnya tidak hanya terjadi terhadap rumah di jalan Kapuas 22 saja. Namun hal ini terjadi juga terhadap rumah-rumah lainnya yaitu diantaranya seperti rumah di jalan Kesehatan 14, jalan Dempo 9, jalan Pasar Baru Selatan No. 19 dan sebagainya. Aksi-aksi pengambilan yang dilakukan oleh UPM tersebut pada saat itu dapat dikatakan telah menjadi pekerjaan (*Beroep*) dalam mendapatkan penghasilan lebih banyak.

Sedangkan aksi pengambilan rumah di jalan Kimia No. 5 yang dilakukan oleh CPM berawal ketika terjadi masalah ijin tinggal ganda. Pemilik rumah ini pada dasarnya telah memiliki ijin tinggal yang diberikan oleh seorang masyarakat Belanda yang telah pergi ke Belanda. Disisi lain pihak CPM menyatakan juga memiliki ijin tinggal terhadap rumah tersebut.⁶² Akibat dari hal itu maka terjadilah jalan buntu dari kedua pihak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun

⁶¹ "Lagi2 Soal Penjerobotan Rumah, Seorang Siswa Akademi Hukum Militer Memasuki Sebuah Kamar Tanpa VB dan Robek Zegel CPM". (1955, 10 Maret). *Indonesia Raya*, No. 59, 1.

⁶² Ijin tinggal yang dimiliki oleh CPM ini diduga diperoleh dengan cara ilegal seperti menyogok pegawai Urusan Perumahan Djakarta dan sebagainya.

dalam menyelesaikan permasalahan tersebut CPM menggunakan jalan lain yaitu dengan memaksa para penghuninya untuk meninggalkan rumah tersebut secepatnya. Melihat hal ini maka pemilik rumah tersebut mengadukan permasalahan ini kepada UPD dan UPD kemudian mengeluarkan perintah kepada UPM untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. Laporan dari UPD ini kemudian ditindaklanjuti oleh UPM dan Kejaksaan tentara kemudian mengirim surat kepada CPM untuk menanggukkan pengambilan rumah tersebut. Hal yang sama juga dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan. Namun pihak CPM tetap bersikeras untuk menempati rumah tersebut bahkan mereka rela tidur di pekarangan dengan membuat tenda.

Disisi lain aksi pengambilan rumah-rumah ini juga melibatkan kepala UPD sendiri seperti yang terjadi pada rumah di jalan Mendut 17. Aksi pengambilan ini berawal ketika walikota Sudiro melakukan kunjungan kerja ke Peking. Kepergian walikota Sudiro ini kemudian dimanfaatkan oleh Sudarmojo yang merupakan kepala UPD untuk membuat ijin tinggal perumahan atas dirinya sendiri. Setelah surat tersebut selesai dibuat maka ia kemudian mengambil rumah di jalan Mendut 17. Dalam mengamankan tindakannya tersebut maka ia kemudian meminta bantuan militer untuk berjaga di rumah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 19/1955 rumah-rumah Belanda yang telah ditinggalkan oleh para pemiliknya telah direncanakan oleh pemerintah untuk diperuntukan terhadap para pegawai pemerintah atau pegawai negeri. Namun hal ini tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan terdapatnya aksi-aksi pengambilan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak militer. Sehingga hal ini mengakibatkan para pegawai negeri yang telah dipersiapkan oleh pemerintah untuk dapat menempati rumah-rumah tersebut tidak dapat menempati rumah-rumah tersebut dan pada akhirnya banyak diantara mereka hanya dapat merelakan rumah-rumah tersebut.

Memasuki 1957 keadaan politik Indonesia menjadi semakin memburuk. Melihat keadaan ini maka pemerintah kemudian mengeluarkan perintah keadaan darurat perang (SOB). Dikeluarkannya perintah ini maka kekuasaan pemerintahan kemudian beralih dibawah pimpinan penguasa militer. Disisi lain setelah dipulangkannya sejumlah besar masyarakat Belanda di Indonesia pada 5 Desember 1957. Maka aksi pengambilan rumah-rumah Belanda yang telah

ditinggalkan oleh pemiliknya kembali muncul. Melihat hal ini maka pada 9 Desember 1957 letkol E. Dahyar mengumumkan bahwa semua rumah-rumah Belanda yang akan ditinggalkan oleh para pemiliknya akan diblokir di bawah pengawasan penguasa militer Jakarta Raya. Menurut Mayor Ali Amengku dari Dinas Perumahan Penguasa Perang Djakarta Raya mengatakan bahwa rumah-rumah Belanda yang telah berada di bawah kekuasaan penguasa perang akan diberikan kepada para pegawai negeri, militer dan instansi sipil.⁶³ Dikeluarkannya pengumuman dari Dinas Perumahan Penguasa Perang tersebut maka tindakan pengambilan rumah-rumah Belanda kemudian berakhir. Namun dalam perkembangannya kemudian muncul permasalahan baru yaitu mengenai status kepemilikan syah terhadap rumah-rumah Belanda tersebut.

IV. 3 Dirubahnya Nama-Nama Belanda Ke Dalam Bahasa Indonesia.

Setelah dikeluarkannya perintah oleh G. A. Maengkom pada 5 Desember 1957 untuk merepatriasi masyarakat Belanda di Indonesia. Maka kemudian dimulailah gelombang keberangkatan besar-besaran masyarakat Belanda meninggalkan Indonesia. Keberangkatan masyarakat Belanda tersebut dalam perkembangannya telah mengakibatkan memudarnya lapisan sosial masyarakat Belanda di Indonesia. Memudarnya lapisan sosial masyarakat Belanda tersebut tentunya semakin memperlemah pengaruh masyarakat Belanda di Indonesia. Sehingga pada akhirnya berbagai bentuk pengaruh masyarakat Belanda juga ikut memudar. Begitu halnya dengan di Jakarta. Setelah direpatriasinya masyarakat Belanda di Indonesia maka hal ini juga mengakibatkan memudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta. Disisi lain memudarnya pengaruh masyarakat Belanda ini selain disebabkan oleh banyaknya masyarakat Belanda yang meninggalkan Indonesia. Namun hal ini juga disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah kedatangan masyarakat Belanda di Indonesia. Berkurangnya jumlah kedatangan masyarakat Belanda ini dapat dilihat dari tabel berikut.

⁶³ "321 Rumah Perusahaan Bld Diduduki Oleh Penguasa Perang Djakarta, Akan Dibagi2kan Kepada Pegawai Dan Militer". (1958, 20 Febriari). *Pedoman*, No. 277, 2.

Tabel IV3
Angka Kedatangan Orang Dari Luar Negeri Berdasarkan
Kewarganegaraan

Tahun	Belanda	Inggris	Orang Eropa lainnya	Amerika
1951	13.934	2.037	1.533	2.454
1952	13.977	5.450	2.155	2.622
1953	11.840	6.321	2.332	2.919
1954	10.170	7.073	3.773	4.035
1955	9.123	8.367	5.071	4.650
1956	9.431	8.596	6.464	5.549
1957	8.943	7.907	5.736	5.610
1958	2.453	5.784	5.232	5.249
1959	1.495	7.224	3.786	6.714

Sumber: *Statistical Pocket Book of Indonesia*. (1960). Number of Person Arrived From Abroad By Nationality, Jakarta: Biro Pusat Statistik, 14.

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa diantara beberapa masyarakat Eropa yang terdapat di Indonesia seperti Belanda, Inggris, Amerika, dan masyarakat Eropa lainnya. Angka kedatangan masyarakat Belanda di Indonesia yang mengalami penurunan secara drastis jika dibandingkan dengan masyarakat Inggris, Amerika, dan masyarakat Eropa lainnya. Hal ini dapat dilihat ketika memasuki 1958-1959. Pada 1958 angka kedatangan masyarakat Belanda di Indonesia menurun drastis menjadi 2.453 kedatangan dengan selisih sebanyak 6.490 kedatangan pada 1957. Sedangkan pada 1959 angka kedatangan masyarakat Belanda menurun lebih drastis menjadi 1.495 kedatangan dengan selisih sebanyak 7.448 kedatangan pada 1957. Disisi lain menurunnya jumlah kedatangan masyarakat Belanda di Indonesia tersebut ternyata hal ini berbanding terbalik dengan keadaan penduduk Jakarta pada 1957, 1958, dan 1959. Pada 1957-1958 jumlah penduduk Jakarta mengalami peningkatan secara drastis sebanyak 882.000 orang. Sedangkan pada 1958-1959 jumlah penduduk Jakarta mengalami

peningkatan jauh lebih drastis yaitu sebanyak 7.587.000 orang.⁶⁴ Ketidakseimbangan angka kedatangan dan kepergian masyarakat Belanda dengan pertumbuhan penduduk Jakarta pada 1957-1958. Maka keadaan ini pada akhirnya mengakibatkan semakin memudahkan pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta.

Memudarnya pengaruh masyarakat Belanda tersebut hal ini dapat dilihat dari dirubahnya nama-nama Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Perubahan ini pada dasarnya tidak hanya terjadi ketika setelah dipulangkannya sebagian besar masyarakat Belanda di Indonesia. Namun hal ini juga telah terjadi secara bertahap sejak berakhirnya masa pemerintahan Belanda di Indonesia pada 1949. Setelah berakhirnya masa pemerintahan Belanda di Indonesia pada umumnya pengaruh masyarakat Belanda di lingkungan masyarakat Jakarta masih cukup kuat. Hal ini dapat dilihat dari masih terdapatnya berbagai pengaruh masyarakat Belanda di masyarakat Jakarta yaitu diantaranya seperti penggunaan bahasa Belanda. Pada awal 1950-an penggunaan bahasa Belanda di masyarakat Jakarta bukanlah merupakan suatu hal yang aneh. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penggunaan bahasa Belanda dalam berbagai keperluan yaitu diantaranya seperti pada iklan, surat kabar, majalah, nama toko, dan sebagainya. Banyaknya penggunaan bahasa Belanda dalam berbagai keperluan tersebut untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari contoh berikut.

Verrast Uw kinderen met
OEN'S Chocolade Repen! *Patisserie*

ZIJ ZIJN HEERLIJK **HOTEL SHUTTE RAAFF**

* Merdeka Timur 12
Tel. 2212 Gmb.
Tel. Kantoor 2400 Gmb.
„ Gasten 1877 „

Ook verkrijgbaar: *
Chocolade Bonbons
en Likeur Bonbons

Toko OEN
Noordwijk 24, Tl. G. 5001, Djakarta G.

Eerste klasse
ingrediënten:
Prima Vakmanschap:
*
HEERLIJK GEBAK !

Sumber: *De Huisvrouw*. (1954). No.7, 29. & *De Huisvrouw*. (1950-1951). No.3, 11.

⁶⁴*Statistical Pocket Book of Indonesia*. (1960). Increase of Population in Selected Towns, Jakarta: Biro Pusat Statistik, 11.

Berdasarkan contoh iklan diatas dapat dilihat bahwa pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta pada awal 1950-an masih cukup kuat. Namun dari contoh iklan tersebut dapat dilihat juga bahwa proses memudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta juga telah terlihat terutama dalam penggunaan nama jalan dari kedua contoh iklan tersebut. Selain dapat dilihat dari iklan kuatnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta dapat dilihat juga dari berbagai contoh lainnya yaitu diantaranya seperti nama-nama perusahaan Belanda, jalan, rumah sakit, hotel, gedung pertemuan dan sebagainya. Kuatnya pengaruh masyarakat Belanda tersebut untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

Tabel IV3

Daftar Nama Perusahaan Belanda, Jalan, Rumah Sakit, Hotel, Bioskop, dan Gedung Pertemuan di Jakarta pada awal 1950-an

Masa Pemerintahan Belanda	Masa Pemerintahan Indonesia (awal 1950-an)
<i>NV Machine Fabriek & Scheepswerf "Molenvliet"</i>	<i>NV Machine Fabriek & Scheepswerf "Molenvliet"</i>
<i>NV Nimaf</i>	<i>NV Nimaf</i>
<i>NV Philip`s Fabricage & Handel Mij</i>	<i>NV Philip`s Fabricage & Handel Mij</i>
<i>NV Boekhandel & Drukkerij G. Kolf & Co</i>	<i>NV Boekhandel & Drukkerij G. Kolf & Co</i>
<i>NV Handel Mij "Europa Azie"</i>	<i>NV Handel Mij "Europa Azie"</i>
<i>NV P. A. Regnault`s verf, inkt, & blikfabrieken</i>	<i>NV P. A. Regnault`s verf, inkt, & blikfabrieken</i>
<i>Molenvliet Oost</i>	<i>Molenvliet Timur</i>
<i>Molenvliet West</i>	<i>Molenvliet Barat</i>
<i>Dambrinkweg</i>	<i>Jalan Dambrink</i>
<i>Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting</i>	<i>Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (Rumah Sakit)</i>

CBZ)	
<i>Koninklijke Paketvaart</i>	<i>Koninklijke Paketvaart</i>
<i>Maatshcapij Ziekenhuis</i>	<i>Maatshcapij Ziekenhuis</i> (Rumah Sakit KPM)
<i>Societeit de Harmonie</i>	<i>Societeit de Harmonie</i>
<i>Hotel Galleries</i>	<i>Hotel Galleries</i>
<i>Hotel Des Indes</i>	<i>Hotel Des Indes</i>
<i>Bioskop Metropole</i>	<i>Bioskop Metropole</i>

Sumber: Firman Lubis. (2008). *Jakarta 1950-an, Kenangan Semasa Remaja*. Jakarta: Masup Jakarta. Bondan Kanumoyoso. (2001). *Nasionalisasi Perusahaan Belanda Di Indonesia 1957-1959*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Vereeniging van Huisvrouwen. (1950-1951). "Hoe kom ik daar?" *De Huis Vrouw*, 13.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada awal 1950-an pengaruh masyarakat Belanda masih cukup kuat di masyarakat Jakarta. Hal ini terlihat dari masih dipertahankannya nama-nama Belanda dalam berbagai tempat di Jakarta. Namun walaupun demikian proses memudarnya pengaruh masyarakat Belanda juga telah terlihat dari diterjemahkannya sebagian nama-nama yang menggunakan bahasa Belanda tersebut ke dalam nama-nama yang menggunakan bahasa Indonesia. Selain itu kuatnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta juga dapat dilihat dari masih dirayakannya tradisi *Sinterklaas* yang khas dengan *Zwarte Piet* (Pit Hitam) oleh masyarakat Jakarta. Tradisi ini pada umumnya dirayakan setiap 5 Desember bersamaan dengan hari raya Natal. Pada tradisi tersebut digambarkan bahwa Sinterklas akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang baik. Sedangkan bagi anak-anak yang nakal akan mendapatkan hukuman dari Pit Hitam.



Sinterklaas bersama dengan Zwarte Piet

Sumber: *De Huis Vrouw*. (1951-1952). No. 20, 5.

Disisi lain kuatnya pengaruh masyarakat Belanda tersebut juga mulai mendapatkan banyak kritikan dari berbagai pihak yaitu diantaranya terhadap penggunaan Bahasa Belanda dalam berbagai keperluan yang dinilai tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan bersifat kolonial. Kritikan-kritikan tersebut diantaranya juga ditujukan terhadap penggunaan Bahasa Belanda di perguruan tinggi. Penggunaan Bahasa Belanda pada dasarnya adalah merupakan sarana penghantar dalam berkomunikasi terhadap masyarakat Belanda. Begituhalnya dengan penggunaan Bahasa Belanda di perguruan tinggi yang masih banyak digunakan oleh para pengajar Belanda dalam memberikan kuliahnya. Namun dikarenakan masih dibutuhkannya bahasa tersebut dalam menunjang kegiatan pembelajaran. Maka bahasa ini masih diperbolehkan selama masa transisi dalam mempersiapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa penghantar utama.⁶⁵

Memasuki 1957 rasa kebencian masyarakat Indonesia terhadap masyarakat Belanda menjadi semakin meningkat seiring dengan semakin memanasnya permasalahan Irian Barat antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Dalam perkembangannya keadaan ini kemudian memuncak ketika gagalnya kembali resolusi Indonesia di PBB pada akhir 1957. Gagalnya kembali resolusi Indonesia

⁶⁵ Soesilowati. (1952, 21 Juni). "Di Sekitar Soal Bahasa Belanda Di Perguruan Tinggi". *Sikap: Madjalah Mimbar Politik*, No. 17-18, 2.

di PBB tersebut maka hal ini mengakibatkan dikeluarkannya berbagai tindakan keras pemerintah terhadap berbagai pengaruh masyarakat Belanda di Indonesia. Berbagai tindakan keras pemerintah tersebut diantaranya yaitu dapat dilihat dari dikeluarkannya larangan terhadap penerbitan semua hal yang menggunakan bahasa Belanda. Kebijakan ini mengakibatkan dihentikannya seluruh penerbitan menggunakan bahasa Belanda di Indonesia yang mencakup diantaranya seperti surat kabar, majalah, iklan, film, dan sebagainya. Memuncaknya kebencian masyarakat Indonesia terhadap masyarakat Belanda pada akhirnya mengakibatkan semakin memudahkan berbagai pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta. Memasuki 1958 sisa-sisa pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta kembali mendapatkan tindakan keras dari pemerintah yaitu diantaranya seperti pelarangan terhadap tradisi perayaan hari *Sinterklaas*.⁶⁶

Memasuki 1959 tindakan-tindakan keras pemerintah terhadap sisa-sisa pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta semakin gencar dilakukan terutama ketika setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.⁶⁷ Dikeluarkan Dekrit tersebut maka berbagai pengaruh asing yang masih tersisa di Jakarta kemudian dihapuskan. Hal ini dapat dilihat dari dikeluarkannya berbagai peraturan oleh walikota Jakarta yang diantaranya yaitu seperti peraturan kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dengan huruf Latin terhadap papan-papan nama di wilayah Jakarta.⁶⁸ Selain itu berbagai nama-nama Belanda yang terdapat di Jakarta yaitu seperti perusahaan-perusahaan Belanda, rumah sakit, hotel, bioskop, gedung pertemuan dan sebagainya juga ikut dihapuskan dan diganti dengan nama-nama yang bersifat ke Indonesian. Perubahan nama-nama tersebut untuk lebih jelasnya lihat tabel berikut.

⁶⁶ Utrecht, *op. cit.*, 141.

⁶⁷Selain ditujukan untuk kembali kepada UUD 1945. Namun Dekrit ini pun juga ditujukan untuk kembali kepada kepribadian bangsa Indonesia.

⁶⁸ Lembaran Kotapradja Djakarta Raja No. 22 tahun 1959 mengenai peraturan daerah tentang keharusan mempergunakan Bahasa Indonesia dengan huruf latin terhadap papan-papan nama dalam wilayah Kotapradja Djakarta Raja.

Tabel IV.3

Daftar Perubahan Nama Perusahaan Belanda, Jalan, Rumah Sakit, Hotel, Bioskop, dan Gedung Pertemuan di Jakarta pada akhir 1950-an

Masa Pemerintahan Belanda	Masa Pemerintahan Indonesia (awal 1950-an)	Masa Pemerintahan Indonesia (akhir 1950-an)
<i>NV Machine Fabriek & Scheepswerf "Molenvliet"</i>	<i>NV Machine Fabriek & Scheepswerf "Molenvliet"</i>	"Metalwork Sabang-Merauke"
<i>NV Nimaf</i>	<i>NV Nimaf</i>	PT Almina
<i>NV Philip`s Fabricage & Handel Mij</i>	<i>NV Philip`s Fabricage & Handel Mij</i>	PT Ralin
<i>NV Boekhandel & Drukkerij G. Kolf & Co</i>	<i>NV Boekhandel & Drukkerij G. Kolf & Co</i>	PT Gita Karya
<i>NV Handel Mij "Europa Azie"</i>	<i>NV Handel Mij "Europa Azie"</i>	PT Lakuna
<i>NV P. A. Renault`s verf, inkt, & blikfabrieken</i>	<i>NV P. A. Renault`s verf, inkt, & blikfabrieken</i>	PT Patna
<i>Molenvliet Oost</i>	<i>Molenvliet Timur</i>	Jalan Hayam Wuruk
<i>Molenvliet West</i>	<i>Molenvliet Barat</i>	Jalan Gajah Mada
<i>Dambrinkweg</i>	Jalan Dambrink	Jalan Latuharhari
<i>Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting</i>	<i>Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting</i> (Rumah sakit CBZ)	RSUP. Cipto Mangun Kusumo
<i>Hotel Galleries</i>	<i>Hotel Galleris</i>	Hotel Melati
<i>Hotel Des Indes</i>	<i>Hotel Des Indes</i>	Hotel Duta Indonesia
<i>Societeit de Harmonie</i>	<i>Societeit de Harmonie</i>	Wisma Nusantara
<i>Bioskop Metropole</i>	<i>Bioskop Metropole</i>	Bioskop Megaria
<i>Koninklijke Paketvaart</i>	<i>Koninklijke Paketvaart</i>	Rumah Sakit PELNI

<i>Maatshcapij Ziekenhuis</i> <i>Maatshcapij Ziekenhuis</i> (Rumah Sakit KPM)
--

Sumber: Firman Lubis. (2008). *Jakarta 1950-an, Kenangan Semasa Remaja*. Jakarta: Masup Jakarta. Bondan Kanumoyoso. (2001). *Nasionalisasi Perusahaan Belanda Di Indonesia 1957-1959*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Vereeniging van Huisvrouwen. (1950-1951). "Hoe kom ik daar?" *De Huis Vrouw*, 13.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa proses memudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta cukup jelas terlihat dari perubahan nama-nama Belanda di Jakarta dari masa ke masa. Pada awal 1950-an pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta masih cukup kuat di masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari masih dipertahankannya nama-nama Belanda dalam berbagai tempat di Jakarta. Disisi lain berdasarkan tabel diatas memudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta juga telah terlihat dari diterjemahkannya sebagian nama-nama Belanda tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Memasuki akhir 1950-an berbagai pengaruh masyarakat Belanda yang masih tersisa kemudian dihapuskan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari dirubahnya keseluruhan berbagai istilah nama-nama Belanda di Jakarta menjadi istilah nama-nama yang bersifat ke Indonesiaan. Dalam perkembangannya perubahan terhadap berbagai nama-nama di Jakarta tersebut kemudian menjadi semakin marak ketika setelah dikeluarkannya dekrit presiden pada 1959.

IV.4 Masuknya Masyarakat Indonesia Menggantikan Gaya Hidup Masyarakat Belanda

Setelah direpatriasinya sebagian besar masyarakat Belanda di Indonesia maka dalam perkembangannya hal ini mengakibatkan memudarnya berbagai pengaruh masyarakat Belanda di Indonesia. Begituhalnya dengan gaya hidup masyarakat Belanda yang pada akhirnya juga ikut memudar. Di Jakarta setelah dipulangkannya sebagian besar masyarakat Belanda di Indonesia maka berbagai gaya hidup masyarakat Belanda seperti mengunjungi tempat-tempat hiburan dan perkumpulan-perkumpulan elit masyarakat Belanda kemudian ikut memudar. Memudarnya gaya hidup masyarakat Belanda tersebut pada umumnya hal ini tidak hanya terjadi setelah dipulangkannya sebagian besar masyarakat Belanda di Indonesia. Namun hal ini juga telah terjadi sejak awal 1950-an dan terus memudar

secara bertahap. Setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar berbagai gaya hidup masyarakat Belanda yang telah dilakukan pada masa sebelumnya menguat kembali. Namun menguatnya kembali berbagai gaya hidup masyarakat Belanda tersebut pada umumnya hal ini lebih banyak digunakan sebagai bentuk pelampiasan kekecewaan mereka terhadap perubahan keadaan yang terjadi di Indonesia.⁶⁹

Perubahan keadaan yang terjadi di Indonesia tentunya telah membawa dampak yang besar terhadap kehidupan masyarakat Belanda. Para masyarakat Belanda kini tidak lagi berada pada puncak tatanan sosial dan disertai dengan hilangnya perlakuan-perlakuan istimewa⁷⁰ yang banyak dinikmatinya pada masa yang lalu. Hal ini tentunya tidak dapat dingkari. Namun walaupun demikian sebagian besar masyarakat Belanda tersebut berusaha untuk tetap mengingkarinya dan tetap menganggap bahwa kedudukan sosial mereka lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Indonesia. Lihat lampiran I. Sehingga hal ini tidak jarang menimbulkan perselisihan diantara masyarakat Indonesia dan Belanda. Dalam perkembangannya rasa kekecewaan masyarakat Belanda tersebut kemudian semakin diperburuk dengan diharuskannya para masyarakat Belanda di Indonesia untuk menentukan status kewarganegaraannya.

Keadaan ini pada akhirnya semakin membuat mereka terjepit hingga membawa mereka berada di dalam suatu kebimbangan dan ketidak pastiaan. Berubahnya kedudukan sosial masyarakat Belanda tersebut tentunya sangat tidak diinginkan oleh para masyarakat Belanda. Sehingga kemudian banyak diantara mereka mencoba untuk menghidupkan kembali suasana masa lalu dengan tetap bersikap eksklusif seperti halnya seorang tuan besar dan nona besar. Dalam meluapkan kekecewaan tersebut maka banyak diantara mereka kemudian melakukan berbagai kegiatan yaitu diantaranya seperti berplesir ke tempat-tempat hiburan dan mengikuti kegiatan perkumpulan elit masyarakat Belanda.

Dalam berplesir ke tempat-tempat hiburan pada umumnya para masyarakat

⁶⁹ "Wanita Indo, Pahit getir Wanita Indo di Indonesia, di negeri Belanda dan di Irian Barat", *Loc. Cit.*

⁷⁰ Hilangnya perlakuan-perlakuan istimewa masyarakat Indonesia terhadap masyarakat Belanda hanya sebatas dari kalangan intelektual atau terpelajar saja. Namun disisi lain bagi para masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pendidikan ataupun memiliki pendidikan yang kurang baik maka perlakuan-perlakuan istimewa yang khas dengan budaya feodal yang bersifat patron-klien tersebut masih tetap berlangsung dan mengakar di dalam masyarakat Indonesia.

Belanda tersebut mengunjungi tempat-tempat yang memiliki pengaruh kuat dari masyarakat Belanda dan memiliki nilai prestise yang tinggi. Tempat-tempat tersebut diantaranya yaitu seperti *Hotel des Indes*, *Jacht Club*, dan sebagainya. *Hotel des Indes* adalah merupakan salah satu hotel yang cukup terkenal di Jakarta dan memiliki nilai prestise yang tinggi. Hal ini dikarenakan para pengunjung dari hotel ini pada umumnya adalah berasal dari kalangan orang-orang tertentu saja. Pada saat-saat tertentu hotel ini sering mengadakan acara pertunjukan untuk menghibur para tamunya. Selain itu berbagai perkumpulan masyarakat Belanda di Jakarta juga menggunakan tempat ini untuk melakukan berbagai kegiatan acara perkumpulan. Berbagai acara yang ditampilkan di hotel ini diantaranya yaitu seperti pesta dansa, peragaan busana, dan sebagainya. Banyak kegiatan acara yang dilakukan di hotel tersebut maka hal ini pada akhirnya menjadikan sebuah hiburan tersendiri bagi masyarakat Belanda.

Begitu halnya dengan *Jacht Club*. *Jacht Club* adalah merupakan salah satu tempat hiburan yang banyak diminati oleh masyarakat Belanda di Jakarta terutama mereka yang tergabung di dalam perkumpulan ini. Pada akhir pekan banyak diantara para masyarakat Belanda menghabiskan waktu luang mereka dengan berlibur di tempat tersebut. Berbagai kegiatan hiburan yang dapat dilakukan oleh para masyarakat Belanda pada umumnya yaitu seperti berenang di pantai, bermain perahu layar dan ski air. Namun terkadang juga diadakan pesta dansa di tempat tersebut. Dalam mencari hiburan selain mengunjungi tempat-tempat yang hanya dapat dijangkau oleh kalangan tertentu saja. Namun para masyarakat Belanda juga mengunjungi tempat-tempat hiburan lainnya yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum yaitu seperti tempat-tempat hiburan yang berlokasi disekitar daerah Harmonie yaitu diantaranya seperti seperti *Cita Bar*, *restaurant Trocadero*, dan sebagainya.⁷¹

Disisi lain dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Belanda tersebut maka memudarnya gaya hidup masyarakat Belanda di Jakarta pada awal 1950-an juga telah terlihat dari diikutsertakannya masyarakat pribumi dan peranakan lainnya dalam perkumpulan-perkumpulan elite masyarakat Belanda. Seperti halnya pada *Jacht Club*. *Jacht Club* pada dasarnya adalah merupakan

⁷¹ "Wanita Indo, Pahit getir Wanita Indo di Indonesia, di negeri Belanda dan di Irian Barat". *Loc. Cit.* 21.

perkumpulan elite masyarakat Belanda yang keanggotaannya hanya dikhususkan kepada masyarakat Belanda. Keanggotaan perkumpulan ini bersifat tertutup dan hanya masyarakat Belanda yang berasal dari kalangan tertentu saja yang dapat menjadi anggota perkumpulan tersebut. Sedangkan bagi masyarakat pribumi untuk dapat menjadi anggota perkumpulan tersebut merupakan hal yang mustahil. Bahkan pada pagar perkumpulan tersebut menurut Lubis (2008) dituliskan larangan terhadap masyarakat pribumi yang berbunyi “*voor Bonden en Inheemschen verboden*” atau “anjing dan bumiputra dilarang”. Namun pada awal 1950-an hal tersebut kemudian memudar. Hal ini dikarenakan telah terjadi perubahan kedudukan sosial di dalam masyarakat Jakarta. Sehingga masyarakat pribumi dan peranakan lainnya kini dapat mengikuti perkumpulan tersebut. Namun para masyarakat Indonesia tersebut pada umumnya adalah berasal dari kalangan menengah ke atas.

Memasuki 1957 gaya hidup masyarakat Belanda tersebut menjadi semakin sulit. Hal ini dikarenakan semakin memburuknya keadaan politik di Indonesia yang diakibatkan oleh permasalahan Irian Barat. Memburuknya keadaan politik tersebut maka hal ini mengakibatkan kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat Belanda terhadap berbagai gejolak yang timbul di masyarakat. Sehingga banyak diantara mereka kemudian mulai menghentikan kegiatan gaya hidupnya. Dalam perkembangannya kekhawatiran masyarakat Belanda tersebut kemudian menjadi semakin mendalam ketika kemudian muncul berbagai aksi pembebasan Irian Barat yang diikuti dengan aksi intimidasi terhadap masyarakat Belanda.

Berbagai aksi intimidasi tersebut pada umumnya diluapkan dalam bentuk aksi corat-coret yang berisi makian dan kebencian terhadap masyarakat Belanda yaitu diantaranya seperti: “Andjing Belanda”, “Bunuh Belanda”, “Usir Belanda”. “Usir Andjing Belanda”, “Usir Kolonialis”, “Ganjang Belanda”, dan sebagainya.⁷² Munculnya berbagai tindakan tersebut maka pada akhirnya mengakibatkan semakin mudarnya gaya hidup masyarakat Belanda di Jakarta. Dalam perkembangannya keadaan tersebut kemudian menjadi semakin memburuk ketika gagalnya kembali resolusi Indonesia di PBB yang kemudian memuncak dengan direpatiasinya sebagian besar masyarakat Belanda di Indonesia.

⁷² “Aksi Irian Barat”, *Loc. Cit.*

Setelah direpatiasinya sebagian besar masyarakat Belanda di Indonesia maka berbagai gaya hidup masyarakat Belanda di Jakarta kemudian ikut memudar. Hal tersebut selain disebabkan oleh banyaknya masyarakat Belanda yang pergi meninggalkan Indonesia. Namun hal ini juga disebabkan oleh telah diambilalihnya sebagian besar tempat-tempat yang biasanya digunakan oleh masyarakat Belanda dalam mencari hiburan oleh penguasa militer. Dalam perkembangannya setelah dipulangkannya masyarakat Belanda tersebut maka berbagai kegiatan yang biasanya dilakukan masyarakat Belanda di tempat-tempat hiburan di Jakarta kemudian ikut memudar seperti halnya kegiatan berplesir masyarakat Belanda di *Hotel des Indes*. Setelah dipulangkannya masyarakat Belanda di Indonesia maka berbagai kegiatan acara hiburan yang biasa dilakukan oleh pengelola dan berbagai perkumpulan masyarakat Belanda di *Hotel des Indes* kemudian ikut memudar. Memudarnya berbagai kegiatan yang dilakukan di hotel tersebut maka pada akhirnya mengakibatkan memudarnya gaya hidup masyarakat Belanda di Jakarta. Bahkan memudarnya gaya hidup masyarakat Belanda tersebut juga dipercepat oleh pengelola baru *Hotel des Indes* dengan menghilangkan berbagai nuansa kolonial di hotel tersebut dan mengantikannya dengan nuansa ketimuran Indonesia.⁷³

Memudarnya gaya hidup masyarakat Belanda di *Hotel des Indes* maka hal yang sama terjadi juga terhadap tempat-tempat hiburan lainnya yaitu diantaranya seperti tempat-tempat hiburan di sekitar Harmoni. Tempat-tempat hiburan tersebut diantaranya yaitu seperti *Cita bar, restaurant Trocadero*, dan sebagainya. Hal yang sama juga terjadi dengan gaya hidup masyarakat Belanda di *Jacht Club* yang pada akhirnya ikut memudar. Sebagai gantinya memudarnya gaya hidup masyarakat Belanda tersebut maka dalam perkembangannya gaya hidup yang biasa dilakukan oleh masyarakat Belanda tersebut kemudian digantikan oleh masyarakat Jakarta terutama mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas.⁷⁴ Namun dalam perkembangannya gaya hidup yang biasa dilakukan oleh masyarakat Belanda juga mulai disesuaikan dengan budaya ketimuran Indonesia. Seperti halnya dalam

⁷³ Untuk lebih jelasnya lihat: D. Bassa Pulungan. (1958, 10 November). "Ada apa di Hotel Des Indes?" *Madjalah Merdeka*, No. 45, 8-9. Dan Pulungan, D. Bassa. (1959, 14 Februari). "Saudara Ingin Grill Indonesia, Masuklah the Gate of Java". *Madjalah Merdeka*, No. 7, 13.

⁷⁴ Firman Lubis. (2011, 10 Juni). Wawancara pribadi.

pesta dansa. Pada pesta dansa kini tidak lagi sepenuhnya menggunakan tarian dansa barat dan sebagai gantinya tari-tarian Indonesia mulai banyak digunakan dalam pesta-pesta dansa. Beberapa tarian tersebut diantaranya yaitu Serampang 12, Kaparinyo, dan sebagainya. Lihat lampiran 4.

Dalam perkembangannya memudarnya berbagai gaya hidup yang biasa dilakukan oleh masyarakat Belanda tersebut kemudian menjadi semakin cepat ketika setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 1959. Dikeluarkannya Dekrit tersebut selain mengajak bangsa Indonesia secara politis kembali ke UUD 1945. Namun dalam bidang lainnya yaitu seperti budaya dikeluarkannya Dekrit ini juga telah mengajak bangsa Indonesia untuk kembali ke dalam kepribadian nasionalnya.



BAB V KESIMPULAN

Setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar kedudukan sosial masyarakat Belanda di Jakarta telah melemah. Namun pada bidang-bidang tertentu seperti di lingkungan sosial dan ekonomi pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta masih cukup kuat. Di Jakarta kuatnya pengaruh masyarakat Belanda pada lingkungan sosial dapat dilihat dari masih banyak digunakannya bahasa Belanda dalam berbagai keperluan. Penggunaan bahasa Belanda pada saat itu bukanlah merupakan hal yang aneh dan juga banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia terutama mereka yang berasal dari kalangan terpelajar. Selain itu kuatnya pengaruh masyarakat Belanda pada lingkungan sosial hal ini dapat dilihat juga dari masih banyak dirayakannya tradisi masyarakat Belanda oleh masyarakat Indonesia yaitu diantaranya seperti tradisi *Sinterklaas* yang biasa dirayakan pada 25 Desember bersamaan dengan hari raya Natal.

Di bidang ekonomi kuatnya pengaruh masyarakat Belanda dapat dilihat dari mendominasinya kembali berbagai perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan Belanda tersebut pada umumnya dikenal dengan sebutan *The Big Five* yaitu terdiri dari *NV Borsumij*, *NV Jacobson van den Berg*, *NV Internatio*, *NV Lindevetes*, dan *NV Geo Wehry & Co*. Disisi lain mendominasinya kembali kegiatan perekonomian masyarakat Belanda tersebut hal ini dapat dilihat juga dari bidang transportasi. Di bidang transportasi berbagai perusahaan transportasi di Jakarta pada umumnya masih dikuasai oleh perusahaan-perusahaan transportasi Belanda yaitu diantaranya seperti *Koninklijke Luchvaart Maatschappij* (KLM), *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (KPM), *Batavia Verkeer Maatschappij* (BVM), dan sebagainya.

Menguatnya kembali pengaruh masyarakat Belanda di beberapa bidang tersebut. Namun hal ini tidak terjadi dalam kedudukan sosial masyarakat Belanda. Setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar kedudukan sosial masyarakat Belanda di Jakarta telah memudar. Memudarnya kedudukan sosial masyarakat Belanda ini telah mengakibatkan dampak yang besar terhadap kehidupan

masyarakat Belanda di Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari hilangnya berbagai perlakuan istimewa yang banyak dimiliki masyarakat Belanda pada masa yang lalu. Dalam perkembangannya memudarnya kedudukan sosial masyarakat Belanda ini telah mengakibatkan kekecewaan tersendiri bagi masyarakat Belanda. Sehingga pada umumnya mereka tidak dapat menerima hal ini dan tetap menganggap bahwa kedudukan social mereka lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat Indonesia dengan bersikap eksklusif sepertihalnya seorang tuan dan nona besar. Dalam melampiaskan kekecewaannya ini maka banyak diantara masyarakat Belanda berusaha untuk menghidupkan kembali suasana masa lalu dengan mengikuti perkumpulan-perkumpulan elit masyarakat Belanda dan berosok ke berbagai tempat hiburan. Beberapa tempat hiburan tersebut diantaranya yaitu seperti *Hotel des Indes*, *Societeit de Harmonie*, *Jacht Club*, dan sebagainya.

Disisi lain setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar hubungan Indonesia dan Belanda menjadi tidak harmonis. Hal ini disebabkan oleh tidak kunjung terselesaikannya permasalahan Irian Barat diantara kedua belah pihak. Memasuki pertengahan 1950-an hubungan Indonesia dan Belanda menjadi semakin memburuk dengan selalu gagalnya resolusi Indonesia di PBB dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini. Memburuknya hubungan Indonesia dan Belanda tersebut maka hal ini kemudian memuncak ketika gagalnya kembali resolusi Indonesia di PBB pada akhir 1957. Gagalnya kembali resolusi tersebut maka hal ini memicu dilakukannya berbagai tindakan keras terhadap masyarakat Belanda di Indonesia yaitu diantaranya seperti merepatriasi masyarakat Belanda di Indonesia dan sebagainya.

Dikeluarkannya kebijakan untuk merepatriasi masyarakat Belanda di Indonesia maka hal ini telah memaksa masyarakat Belanda untuk pergi meninggalkan Indonesia. Menurut G. A. Maengkom selaku menteri kehakiman menyatakan bahwa proses repatriasi masyarakat Belanda ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu:

1. Golongan *Steuntrekkers* (orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang-orang yang menggantungkan diri dari tunjangan pemerintah Belanda dan orang-orang yang pekerjaannya dapat dengan mudah

digantikan oleh para pekerja Indonesia).

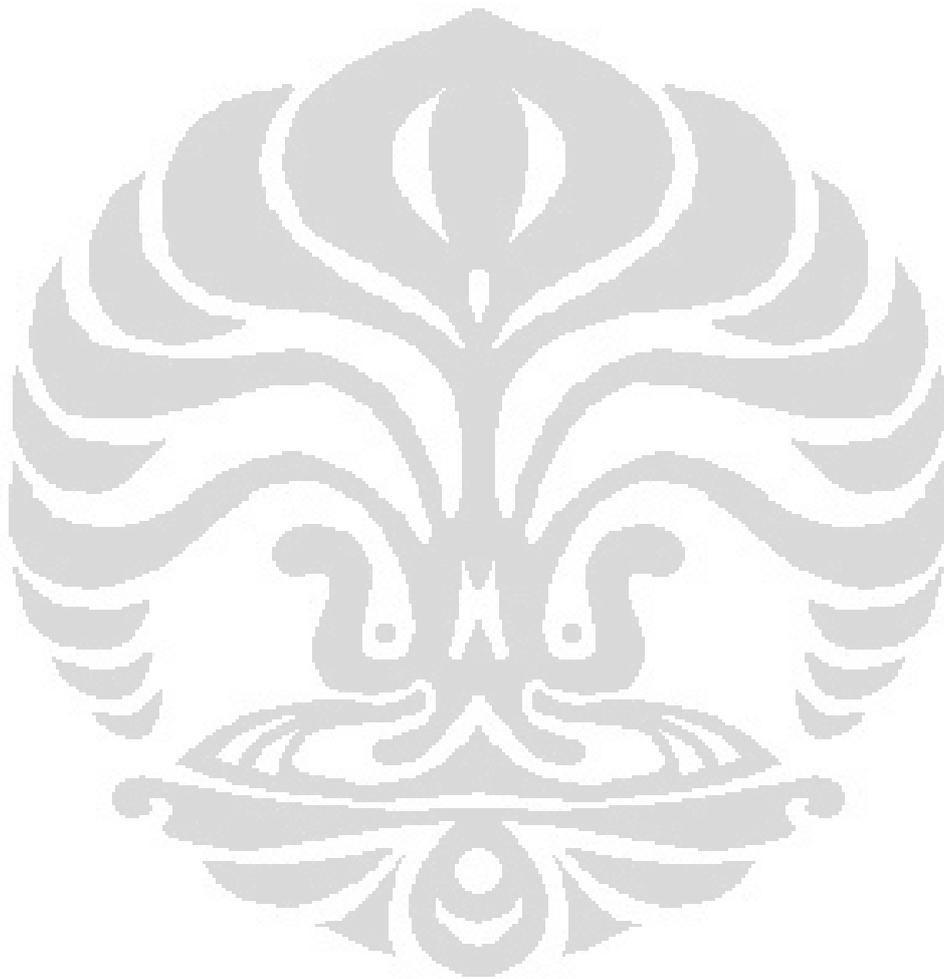
2. Golongan *Middenstanders* (orang-orang yang berasal dari kalangan menengah).
3. Golongan *Vakspecialisten* (orang-orang yang berasal dari kalangan ahli).

Di Jakarta gelombang keberangkatan pertama masyarakat Belanda tersebut dimulai pada 10 Desember 1957 dengan menggunakan jalur udara di Bandara Kemayoran. Pada gelombang keberangkatan pertama ini dimulai pada 13.30 dengan sekitar 15 orang masyarakat Belanda meninggalkan Indonesia menggunakan maskapai *Garuda Indonesian Air Ways* (GIA). Sedangkan keberangkatan berikutnya dimulai pada 17.00 dengan menggunakan maskapai *British Overseas Airways Corporation* (BOAC). Pada keberangkatan kedua ini terdapat sekitar lebih dari 50 orang masyarakat Belanda meninggalkan Indonesia dan kebanyakan dari mereka adalah terdiri dari para wanita dan anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Dalam perkembangannya gelombang keberangkatan masyarakat Belanda tersebut lebih banyak digunakan jalur laut untuk dapat mengangkut seluruh masyarakat Belanda di Indonesia.

Dalam mempercepat proses repatriasi masyarakat Belanda tersebut maka perdana menteri Belanda Willem Dress meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk membantu perepatriasian masyarakat Belanda di Indonesia. Menanggapi hal ini maka pemerintah kemudian melakukan berbagai tindakan yaitu diantaranya seperti membuat daftar rencana keberangkatan masyarakat Belanda di Indonesia dalam rentang waktu 30 Desember 1957-31 Januari 1958, meminta masyarakat Belanda untuk mendaftarkan diri pada kantor-kantor penjualan karcis di pelabuhan pemberangkatan yang terdekat dan melarang masyarakat Belanda untuk meninggalkan rumah sebelum menerima pemberitahuan untuk memastikan bahwa mereka telah terdaftar oleh pemerintah ataupun pada perusahaan pelayaran yang akan digunakan dalam proses perepatriasian tersebut.

Dalam perkembangannya setelah direpatriasikannya masyarakat Belanda di Indonesia maka hal ini telah mengakibatkan semakin mudarnya pengaruh masyarakat Belanda di Jakarta yaitu diantaranya seperti masuknya tenaga-tenaga Indonesia menggantikan jabatan-jabatan yang telah ditinggalkan oleh masyarakat

Belanda, pengambilan rumah-rumah Belanda oleh pihak Indonesia, dirubahnya istilah nama-nama Belanda ke dalam bahasa Indonesia, dan masuknya masyarakat Indonesia menggantikan gaya hidup masyarakat Belanda di Jakarta. Disisi lain semakin mudarnya pengaruh masyarakat Belanda tersebut maka dalam perkembangannya hal ini kemudian mendorong masyarakat Jakarta terutama mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas untuk menggantikan kedudukan sosial masyarakat Belanda tersebut.



DAFTAR REFERENSI

1. Dokumen Pemerintah atau Instansi

Kementerian Luar Negeri. "Hutang Apa Jang Kita Batalkan?" Jakarta: 1957.
Laporan Tahunan Universitas Indonesia 1957-1958.
Lembaran Kota Pradja Djakarta Raja No. 22 tahun 1959.
Peraturan Penguasa Militer No. Prt/PM/016/1957.
Statistical Pocket Book of Indonesia 1960.

2. Surat Kabar

Indonesia Raya (1953-1958).
Pedoman (1958-1959).
Suluh Indonesia (1958)
Pemandangan (1952 & 1957)

3. Majalah

Berita Masjumi (1951).
Berita BAPERKI (1954-1955).
De Huisvrouw (1950-1953.)
Het Motor Verkeer (1953).
Hikmah Mingguan Islam Populer (1957).
Ikhtisar Indonesia Sepekan (1951).
Kota Pradja (1951).
Merdeka (1957-1959).
Mingguan Sadar (1957).
Nasional (1953-1954).
Pembimbing (1953-1954).
Sikap: Madjalah Mimbar Politik (1951-1953).
The Commercial Weekly (1957-1958).
Wanita dan Rumah Tangga (1959-1960).
Warta Dagang Sepekan (1951).
Warta Imigrasi (1957).

4. Wawancara

Firman Lubis, Ia adalah seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ia dilahirkan pada 1943 dan cukup dekat dengan masyarakat Belanda.

Marietje Solarbesain, Ia adalah seorang ibu rumah tangga dan seorang repatrian masyarakat Ambon pada 1953. Ia dilahirkan pada 1950 dan ikut dalam gelombang keberangkatan masyarakat Ambon ke negeri Belanda pada 1950. Pada 1963 kemudian ia kembali ke Indonesia.

Haji Arifin Kaldjunin, Ia adalah seorang pensiunan pegawai swasta. Ia dilahirkan pada 1943. Namun tidak terlalu dekat dengan masyarakat Belanda.

5. Jurnal Sejaman

Gross, Andrew. *From Tong-Tong To Tempoe Doeloe: Eurasian Memory Work And The Bracketing Of Dutch Colonial History, 1957-1961*.

Van Der Kroef, Justus M. "Disunited Indonesia." *Far Eastern Survey*, 4 (1958): 49-63.

_____. "The Eurasian Minority In Indonesia." *American Sociological Review*, vol 18, no. 5 (1953): 483-493.

Van Der Veur, Paul W. "Eurasian Dilema In Indonesia" *The Journal of Asian Studies*, vol. 20. No. 1 (1960): 45-60.

6. Buku

Beng To, Oey. (1991). *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia (jilid I 1945-1958)*. Jakarta: Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI).

Hellwig, Tineke. (2007). *Citra Kaum Perempuan Di Hindia Belanda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

H. Dr. Subandrio. (2001). *Meluruskan Sejarah Perjuangan Irian Barat (cetakan ke dua)*. Jakarta: Yayasan Kepada Bangsaaku.

J.E. Ellemers dan R.E.F. Vaillant. (1985). *Indische Nederlanders en Gerechtvaardigen*. Muiderberg: Dick Coutinho.

Kraak, J.H. (1957). *De Repatriering uit Indonesie: Een onderzoek naar de integratie van de gerepatrïerden uit Indonesie in de Nederlandse samenleving*. Gravehage: Staatsuitgeverij.

Kahin, Audrey R. dan George McT. Kahin. (1997). *Subversi Sebagai Politik Luar Negeri, Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Grafiti.

Kanumoyoso, Bondan. (2001). *Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia 1957-1959*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Katoppo, E, Yamin Muhammad, Tambunan. (1955). *Perjuangan Irian Merdeka*. Bandung: Penerbitan Kilat Madju.

Legge, John D. (1972). *Sukarno Sebuah Biografi Politik*. Jakarta: Sinar Agape Press.

Lubis, Firman. (2008). *Jakarta 1950-an, Kenangan Semasa Remaja*. Jakarta: Masup Jakarta.

Ricklefs, M.C. (1994). *Sejarah Indonesia Modern (Cetakan Keempat)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Soekiman, Djoko. (2000). *Kebudayaan Indis dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya Di Jawa Abad XVIII-Medio Abad XX*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Siswadi., et al. (1988). *Batavia Kisah Jakarta Tempoe Doeloe*. Jakarta: Gramedia.

Taylor, Jean Gelman. (2009). *Kehidupan Sosial Di Batavia, Orang Eropa Dan Eurasia Di Hindia Timur*. Jakarta: Masup

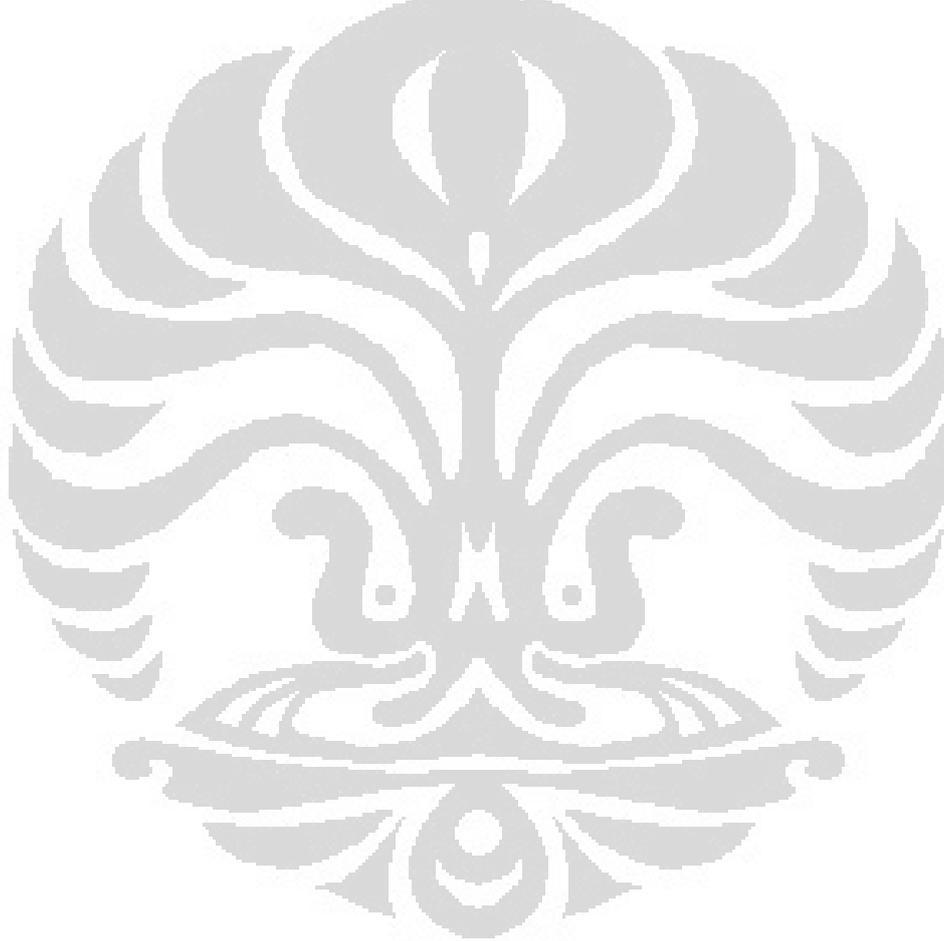
Utrecht, Elien. (2006). *Melintasi Dua Jaman, Kenangan Tentang Indonesia Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan*.

7. Novel

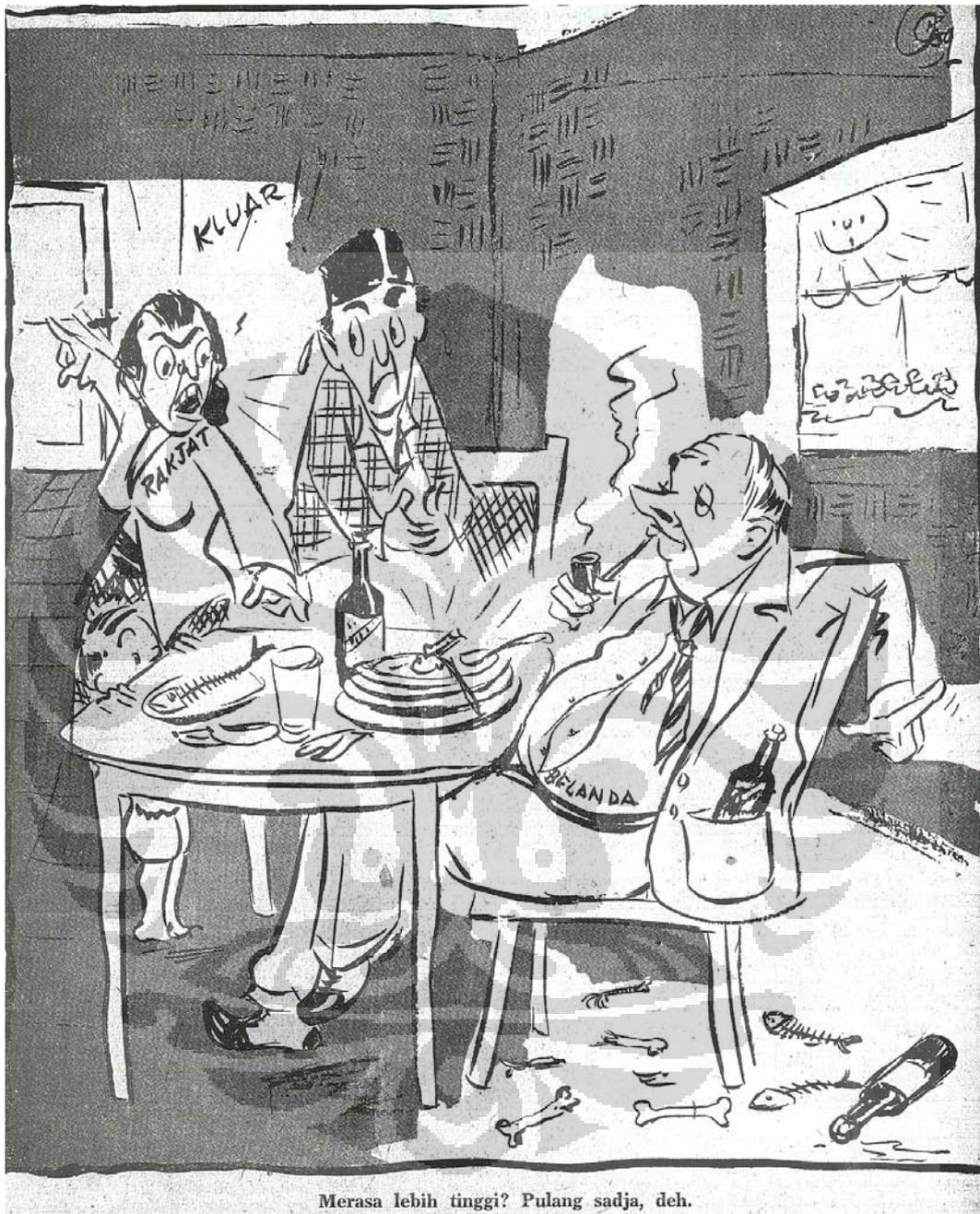
E. Breton de Nijs. (1975). *Bayangan Memudar, Kehidupan Sebuah Keluarga Indo*. Jakarta: P.T. Bumi Restu.

Mahieu, Vincent. (1976). *Cuk*. Jakarta: Djambatan.

_____. (1976). *Cis*. Jakarta: Djambatan.



LAMPIRAN I
TIDAK DAPAT MENERIMA PERUBAHAN



Gambaran umum masyarakat Belanda di Jakarta pada 1950-an
Sumber: Majalah Pembimbing. (1954). No. 29, 4.

LAMPIRAN II
JAVA BODE RIT 1953



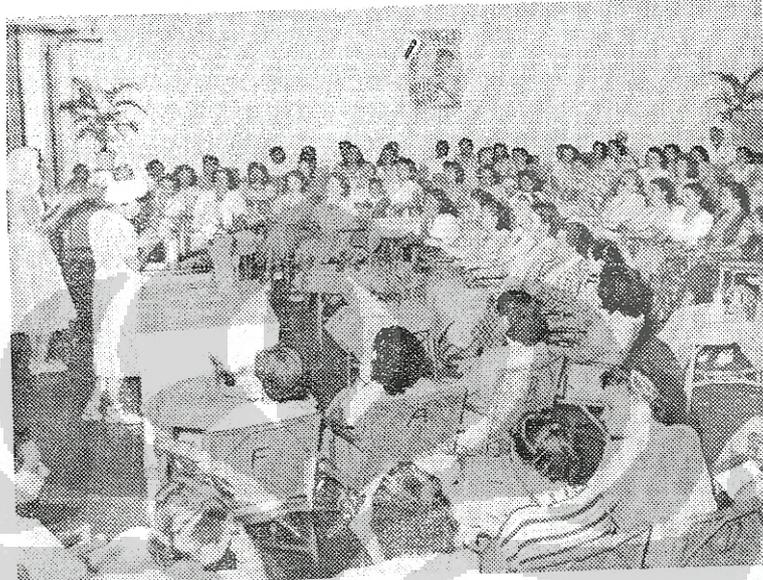
Dimulai sekitar pukul 05.00 pagi yang disponsori oleh jam Omega



Pemandangan ketika sedang melewati jalan menanjak di Lembang

Sumber: I. M. C. (1953, Oktober). "Java Bode Rit 1953" *Het Motorverkeer*, No. 10, 225-227.

LAMPIRAN III
KEGIATAN PERKUMPULAN *DE HUIS VROUW*



Demonstrasi memasak



Kursus Menjahit



Peragaan Busana



Bermain Kartu

Sumber: De Huis Vrouw (1951-1952) No. 4, 13, 17, 1.

LAMPIRAN IV
SUASANA KEBERANGKATAN DI BANDARA KEMAYORAN



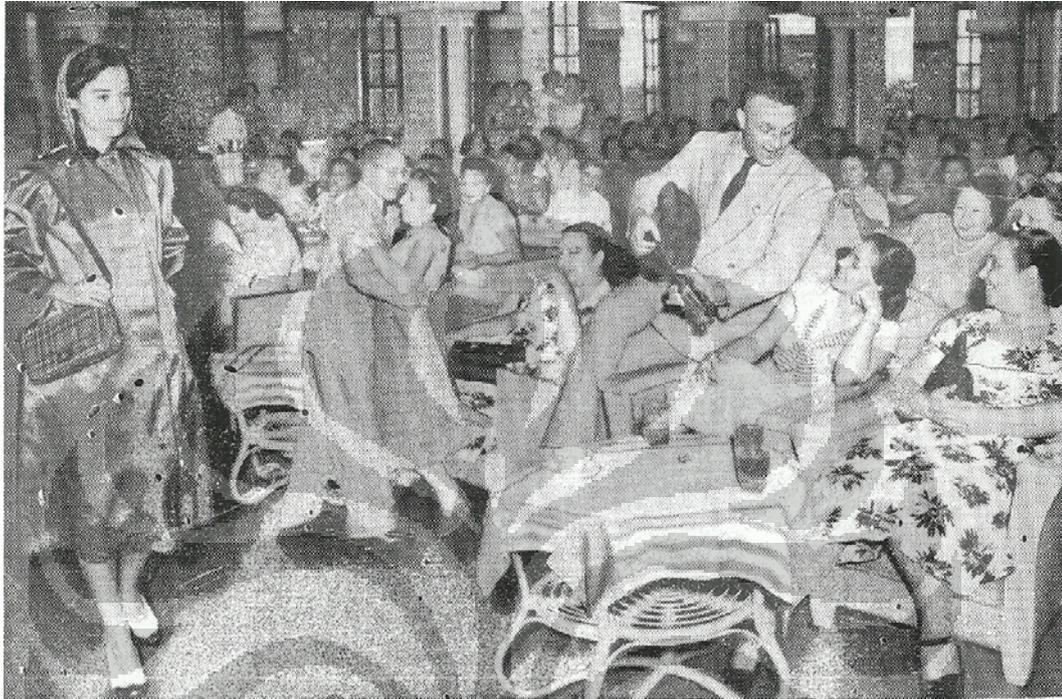
Susana haru perpisahan diantara saudara



Suasana keceriaan anak-anak yang akan diberangkatkan

Sumber: “Terompet Pemberangkatan Sudah Berbunyi”. (1957, 21 Desember). *Madjalah Merdeka*, No. 51, 16-17.

LAMPIRAN V
MEMUDARNYA GAYA HIDUP MASYARAKAT BELANDA



Pesta dansa masyarakat Belanda pada wal 1950-an
De Huis Vrouw. (1951), No. 12, 3.



Suasana Pesta Dansa di Jakarta Press Club

Sumber: "Pers dan Pembentukan Pikiran Serta Pembentukan Djiwa". (1958, 16 Agustus).
Madjalah Merdeka, No.33, 29.